



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL



KUMANDE SAMATURU' **BERDAULAT PANGAN** **DI KALUPPINI**



...uku ini tidak diperju

Nurbaya



KUMANDE SAMATURU' **BERDAULAT PANGAN** **DI KALUPPINI**



Buku ini tidak diperjualbelikan.

Diterbitkan pertama pada 2023 oleh Penerbit BRIN

Tersedia untuk diunduh secara gratis: penerbit.brin.go.id



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share Alike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan:
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

KUMANDE SAMATURU' BERDAULAT PANGAN DI KALUPPINI

Nurbaya



Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

© 2023 Nurbaya

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Kumande Samaturu': Berdaulat Pangan di Kaluppini/Nurbaya–Jakarta: Penerbit BRIN, 2023.

xix + 142 hlm.; 14,8 × 21 cm

ISBN 978-623-8372-23-2 (PDF)

1. Persediaan Bahan Makanan
2. Masyarakat Adat Kaluppini
3. Tradisi Berbagai Makanan

363.8


Copy editor : Apriwi Zulfitri
Proofreader : Emsa Ayudia Putri & Noviasuti Putri Indrasari
Penata isi : Dyah Arum Kusumastuti & Hilda Yunita
Desainer sampul : Dyah Arum Kusumastuti

Edisi pertama : Desember 2023



Diterbitkan oleh:

Penerbit BRIN, Anggota Ikapi
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B. J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Whatsapp: +62 811-1064-6770
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id

 PenerbitBRIN

 @Penerbit_BRIN

 @penerbit.brin

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini kupersembahkan kepada segenap masyarakat
adat Indonesia.

Kepada Masyarakat Adat Kaluppini, Sulawesi Selatan,
terima kasih telah mengizinkan kami menginjakkan
kaki di tanah adat Kaluppini dan berbagi hikmah dari
hampanan pengetahuan tradisional di tanah leluhur
Kaluppini, Tanah Onko Sa'pulo Tallu.



Buku ini tidak diperjualbelikan.

Daftar Isi

Daftar Gambar.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
Pengantar Penerbit.....	xiii
Kata Pengantar	xv
Prakata	xvii
BAB 1 Prolog: Kerawanan Pangan dan Upaya Membangun Kedaulatan Pangan di Indonesia.....	1
A. Masalah Pangan di Indonesia	2
B. Potensi Kerawanan Pangan pada Masyarakat Adat	9
C. Membangun Kedaulatan Pangan Masyarakat Adat	15
BAB 2 Konsep Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	23
A. Konsep Ketahanan Pangan	23
B. Pilar Ketahanan Pangan.....	25
C. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi	28
D. Konsep Kerawanan Pangan.....	30
E. Penyebab Kerawanan Pangan.....	34
F. Mengukur Ketahanan Pangan.....	40
G. Dampak Kerawanan Pangan	49
H. Kerawanan Pangan sebagai Sebuah Kontinum.....	51
I. Konsep Strategi Bertahan (<i>Coping Strategy</i>) di Masa Rawan Pangan.....	52

BAB 3	Mengenal Masyarakat Adat Kaluppini	59
	A. Definisi Masyarakat Adat.....	59
	B. Letak Geografis dan Sejarah Masyarakat Adat Kaluppini	60
	C. Struktur Adat, Ritual, dan <i>Peppasang</i> Kaluppini	64
BAB 4	Ketahanan Pangan pada Masyarakat Adat Kaluppini ...	75
	A. Status Ketahanan Pangan dan Gizi pada Masyarakat Adat Kaluppini	75
	B. Ketersediaan Pangan.....	78
	C. Akses Pangan	83
BAB 5	Strategi Bertahan Masyarakat Adat Kaluppini	89
	A. Strategi Bertahan di Masa Rawan Pangan.....	90
	B. Mencari Tambahan Penghasilan.....	92
	C. Perubahan Pola Makan	95
	D. Akses Cepat terhadap Pangan.....	98
	E. Akses Cepat terhadap Uang Tunai.....	102
	F. Strategi Bertahan Tradisional	106
BAB 6	Epilog: Merawat Tradisi, Menjaga Kedaulatan Pangan Masyarakat Adat.....	115
	Daftar Singkatan.....	121
	Glosarium.....	123
	Daftar Pustaka	127
	Tentang Penulis	139
	Indeks.....	141

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Distribusi Masalah Gizi Kurang di Dunia Tahun 2018.....	3
Gambar 1.2	Gambaran Status Gizi Balita Indonesia Tahun 2007–2018	4
Gambar 1.3	Hubungan antara Kerawanan Pangan, Masalah Gizi, dan Kemiskinan	5
Gambar 1.4	Persentase Penurunan Jumlah Kabupaten Prioritas 1 dan 2 Tahun 2005–2015.....	6
Gambar 1.5	Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan di Indonesia Tahun 2015 dan 2019	8
Gambar 1.6	Ciri-ciri Masyarakat Adat	10
Gambar 1.7	Seorang suku Mentawai sedang mengolah sagu dengan cara tradisional.....	14
Gambar 2.1	Hubungan Empat Pilar Ketahanan Pangan	25
Gambar 2.2	Kerangka Hubungan Ketahanan Pangan dan Gizi.....	28
Gambar 2.3	Kerangka Analisis Kajian Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi.....	30
Gambar 2.4	Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia.....	32
Gambar 2.5	Faktor-Faktor Penyebab Kerawanan Pangan	35
Gambar 2.6	Tiga Penyebab Utama Kerawanan Pangan di Dunia.....	38

Gambar 2.7	Tingkatan dan Ciri-Ciri Ketahanan Pangan pada Rumah Tangga	41
Gambar 2.8	Gambaran Tingkat Kerawanan Pangan yang Diukur dengan FIES	47
Gambar 2.9	Kontinum Ketahanan Pangan	51
Gambar 3.1	Letak Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan..	61
Gambar 3.2	Penyelenggaraan <i>Damulu</i> di dalam Masjid Tua Kaluppini... 66	
Gambar 3.3	Suasana ketika Masyarakat Adat Kaluppini Melaksanakan Ritual Adat.....	68
Gambar 3.4	Hidangan pada Saat Ritual Menggunakan Daun Jati sebagai Wadah	69
Gambar 3.5	Proses Pembagian Makanan Saat Ritual	70
Gambar 3.6	Tokoh adat menampilkan tari Pa'jaga.....	72
Gambar 4.1	Status Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Kaluppini	76
Gambar 4.2	Hubungan Status Pangan, Gizi, Kesehatan, dan Pembangunan Ekonomi	77
Gambar 4.3	Ketersediaan dan Pengolahan Ayam pada Saat Upacara Adat.....	82
Gambar 4.4	Suasana Pasar Tradisional di Kaluppini	84
Gambar 5.1	<i>Nande Dalle</i> , nasi dimasak dengan campuran jagung.....	96
Gambar 5.2	Masyarakat Kaluppini menyimpan gabah sebagai cadangan bahan pangan.....	99
Gambar 5.3	Stok Kacang Tanah yang Dibiarkan Utuh dengan Kulit	103
Gambar 5.4	Cadangan Jagung yang Siap Dicampur dengan Beras Menjadi <i>Nande Dalle</i>	104
Gambar 5.5	Seorang masyarakat adat mengupas kulit kacang.	105
Gambar 5.6	Komposisi <i>Nande Sesa</i>	107
Gambar 5.7	<i>Nande Sesa</i> dikeringkan untuk diolah menjadi kerupuk.	108
Gambar 5.8	Memanfaatkan Pekarangan untuk Tanaman Pangan.....	111
Gambar 5.9	Cara Penyimpanan Cadangan Pangan Rumah Tangga ..	113
Gambar 5.10	<i>Leuit</i> juga ada di kawasan adat Kasepuhan Karang.....	114

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Rangkuman Penelitian tentang Masyarakat Adat di Beberapa Negara.....	12
Tabel 1.2	Perbedaan antara Pangan Korporat dan Sistem Kedaulatan Pangan.....	18
Tabel 2.1	Istilah dan Definisi Kedaulatan Pangan, Ketahanan Pangan, dan Gizi	28
Tabel 2.2	Perbedaan Jenis Kerawanan Pangan	33
Tabel 2.3	Perbedaan antara US-HFSSM dan HFIAS	43
Tabel 2.4	Komponen Kerawanan Pangan di Tingkat Rumah Tangga/Individu.....	50
Tabel 2.5	Empat Kategori Dasar Strategi Bertahan saat Rawan Pangan.....	53
Tabel 2.6	Strategi Bertahan yang Umum Dilakukan di Indonesia.....	55
Tabel 5.1	Bentuk Strategi Bertahan pada Masyarakat Adat Kaluppini	90



Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pengantar Penerbit

Sebagai penerbit ilmiah, Penerbit BRIN mempunyai tanggung jawab untuk terus berupaya menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas Penerbit BRIN untuk turut serta membangun sumber daya manusia unggul dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Setiap warga negara berhak atas ketersediaan pangan yang adekuat, beragam, sehat, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk masyarakat adat di seluruh Indonesia. Kebijakan transmigrasi, alih fungsi hutan, dan perubahan iklim diduga menjadi penyebab sulitnya masyarakat adat mengakses sumber pangan yang berasal dari hutan sehingga kelompok ini rentan mengalami kerawanan pangan.

Buku ini membahas secara umum kedaulatan dan kerawanan pangan pada masyarakat adat dunia, dan secara khusus pada masyarakat adat Kaluppini di Enrekang, Sulawesi Selatan. Masyarakat adat Kaluppini memiliki tradisi turun-temurun *kumande samaturu*’ atau makan bersama pada berbagai upacara adat sepanjang tahun. Tradisi ini merupakan strategi untuk menjaga kedaulatan dan ke-

tahanan pangan mereka dengan tetap merawat tradisi yang mereka yakini selama ini. Selain itu, berbagai pengetahuan tradisional dalam menyimpan cadangan makanan, berbagi, dan bekerja sama menjadi salah satu kunci ketahanan pangan masyarakat adat tersebut.

Semoga buku ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat adat serta tantangan dan upaya yang mereka hadapi dalam memenuhi hak asasi atas pangan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kata Pengantar

Ketahanan dan kedaulatan pangan adalah isu yang saat ini banyak mendapat sorotan, baik secara nasional maupun internasional, apalagi dalam kondisi Covid-19. Masyarakat adat dinilai sebagai kelompok yang rentan seiring dengan adanya pembatasan sosial dan keterbatasan akses atas pangan. Buku ini memberi sebuah perspektif baru bahwa di tengah kerentanan tersebut, masyarakat adat ternyata memiliki strategi tersendiri dalam menghadapi setiap krisis dan keterbatasan yang ada. Meskipun penelitian yang dilakukan penulis dilakukan sebelum terjadinya pandemi Covid-19, sedikit banyak memberi kita banyak gambaran tentang situasi yang terjadi di masyarakat adat dengan contoh kasus di masyarakat adat Kaluppini di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini, penulis dengan sangat baik menjelaskan bagaimana kerentanan yang ada dan bagaimana masyarakat adat kemudian menghadapinya, termasuk melalui ritual-ritual dan tradisi yang menunjukkan bagaimana masyarakat adat bisa saling mendukung satu sama lain. Konsep *kumande sumaturu*' yang kemudian menjadi

judul buku ini adalah sebuah wujud nyata bagaimana sikap kebersamaan dan gotong royong telah menjadi pilar utama dan bagaimana masyarakat adat bisa bertahan dari kerentanan yang ada. Hal yang menarik dalam buku ini adalah meskipun buku ini merupakan hasil penelitian ilmiah, narasi disajikan dalam bahasa populer yang lugas dan menarik, yang bisa dibaca dengan mudah oleh siapa pun.

Kami sebagai pimpinan kampus di mana penulis bekerja sebagai staf pengajar dan peneliti menyambut baik kehadiran buku ini yang bisa menjadi referensi penting untuk penelitian-penelitian terkait ketahanan dan kedaulatan pangan, khususnya di masyarakat adat yang belum banyak diteliti, terutama dari perspektif gizi dan kesehatan. Semoga buku ini bisa juga menjadi motivasi bagi dosen-dosen lain, khususnya dalam lingkup Poltekkes Kemenkes secara nasional.

Mamuju, Mei 2023

Andi Salim, S.K.M., M.Kes.
Direktur Poltekkes Kemenkes Mamuju

Prakata

Hak atas pangan adalah hak asasi manusia untuk mendapatkan ketersediaan dan akses pangan yang adekuat, beragam, sehat, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, masih banyak manusia yang belum mendapatkan pangan yang layak. Satu dari sembilan orang penduduk dunia mengalami kelaparan dan kekurangan gizi. Ini merupakan sebuah indikator bahwa hak asasi atas pangan belum sepenuhnya dimiliki oleh manusia.

Masyarakat adat merupakan salah satu kelompok rentan yang mengalami masalah kerawanan pangan. Mereka menggantungkan hidup sebagian besar pada hasil hutan dan pertanian yang tumbuh di atas tanah adat mereka. Namun, transmigrasi, alih fungsi hutan, degradasi kualitas tanah, kondisi geografis tempat tinggal, dan perubahan iklim menyebabkan masyarakat adat makin rentan mengalami kerawanan pangan. Ketersediaan dan akses ke hutan sebagai sumber utama pangan pun makin sulit.

Masyarakat adat Kaluppini merupakan salah satu masyarakat adat yang terkenal masih memegang teguh kepercayaan dan hukum adat yang mereka yakini. Mereka melaksanakan berbagai upacara adat sebagai bentuk syukur atas penghidupan yang mereka jalani selama ini dan sebagai upaya membangun hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.

Meskipun rentan mengalami kerawanan pangan, masyarakat adat Kaluppini mempunyai tradisi yang diwariskan turun-temurun dan menjadi penopang ketahanan pangan dalam wilayah adat mereka. Pengetahuan tradisional dalam menyimpan cadangan makanan, tradisi berbagi, dan bekerja sama menjadi salah satu kunci ketahanan pangan masyarakat adat tersebut.

Buku *Kumande Samaturu': Berdaulat Pangan di Kaluppini* hanya mengutip sebagian kecil dari kekayaan pengetahuan dan tradisi masyarakat adat di Indonesia, khususnya masyarakat adat Kaluppini. Buku ini berusaha memaparkan bagaimana masyarakat adat Kaluppini menjaga kedaulatan dan ketahanan pangan mereka dengan tetap merawat tradisi yang mereka yakini selama ini. Di saat tradisi berbagi makanan (*food sharing*) sudah mulai pudar di berbagai kelompok masyarakat di berbagai negara. Praktik *kumande samaturu'* dan berbagi *nande sesa* pada masyarakat adat Kaluppini justru masih sangat kental dilakukan. Hal ini menjadi salah satu upaya menjaga tradisi sekaligus menjadi salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan di masyarakat tersebut.

Buku ini merupakan hasil penelitian panjang yang mengutip sedikit pengetahuan tentang masyarakat adat Kaluppini. Terima kasih kepada para tetua adat dan masyarakat Kaluppini yang telah mengizinkan penggalan pengetahuan dan pengambilan gambar proses ritual dan kehidupan mereka sehari-hari. Semua gambar dan kutipan pada buku ini telah mendapatkan izin dari para informan. Terima

kasih kepada Neys-van Hoogstraten Foundation dan USAID-Prestasi yang telah mendanai penelitian ini. Semoga buku ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat adat, kehidupan, tradisi, serta tantangan dan upaya yang mereka hadapi dalam memenuhi hak asasi atas pangan.

Mamuju, Mei 2023

Penulis

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB 1

Prolog: Kerawanan Pangan dan Upaya Membangun Kedaulatan Pangan di Indonesia

Secara global, manusia terus berjuang mengatasi masalah kelaparan (*hunger*) dan kerawanan pangan (*food insecurity*) yang banyak terjadi di berbagai negara. Untuk mengatasi masalah global tersebut, para ahli pun merumuskan tujuan pertama pada Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals-MDGs*), yaitu menghilangkan kelaparan dan kemiskinan pada tahun 2015. Oleh karena itu, ketahanan pangan (*food security*) baik di tingkat rumah tangga maupun individu telah menjadi perhatian khusus di dunia internasional.

Secara umum, program MDGs yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia menemui berbagai kendala. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi mulai dari integrasi hingga implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat ke pemerintah di tingkat masyarakat serta permasalahan *good governance*, seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta maraknya korupsi dana pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan dan kelaparan (Cangara, 2022). Akhirnya, tujuan tersebut kemudian ditransformasi ke dalam Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*) yang dituangkan pada tujuan kedua, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi serta mendukung sistem pertanian yang berkelanjutan pada tahun 2030 (Charlton, 2016; IFPRI, 2016).

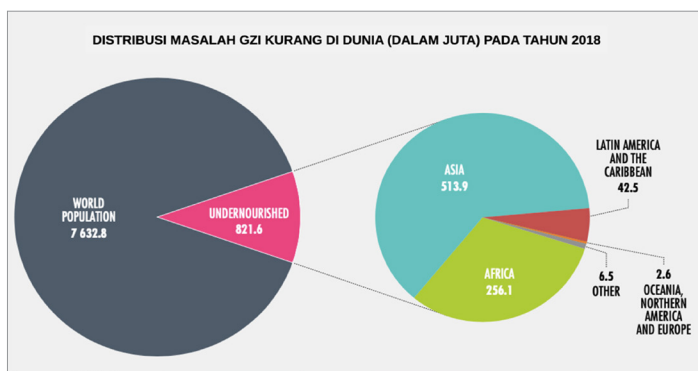
Namun sayang, hingga akhir tahun 2015, tujuan pembangunan milenium tersebut belum tercapai sesuai harapan. Salah satu penyebabnya adalah program MDGs hanya terfokus pada dinamika statistik penurunan angka penduduk miskin tanpa upaya optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat miskin, termasuk di Indonesia. Kemiskinan dan masalah pangan masih menjadi akar masalah penyebab masalah gizi di negeri ini.

A. Masalah Pangan di Indonesia

Masalah pangan merupakan masalah pembangunan global yang kompleks karena masih terdapat masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan fisik yang menghambat perkembangan intelektual akibat defisiensi mikronutrien atau kekurangan zat gizi mikro, yang salah satunya, disebabkan oleh kerawanan pangan. Masalah defisiensi zat gizi mikro, sering disebut sebagai *hidden hunger* atau kelaparan tersembunyi. Masalah ini terjadi karena rendahnya atau kurang tercukupinya kebutuhan zat gizi mikro di dalam tubuh akibat rendahnya asupan makanan yang beragam. Masalah kekurangan zat gizi mikro yaitu kekurangan vitamin dan mineral yang dapat menyebabkan masalah anemia pada ibu hamil, kekurangan vitamin A, kekurangan mineral yodium sehingga menjadi beban gizi yang perlu segera ditangani (Gödecke dkk., 2018).

Meskipun pemerintah dan berbagai lembaga dunia telah berupaya mencapai tujuan tersebut, hingga kini masih banyak penduduk dunia yang mengalami kerawanan pangan. Hingga saat ini, setidaknya terdapat sekitar 795 juta penduduk atau sekitar satu dari sembilan orang di dunia ini mengalami kelaparan dan kekurangan gizi pada tahun 2014–2016 (FAO, 2015b).

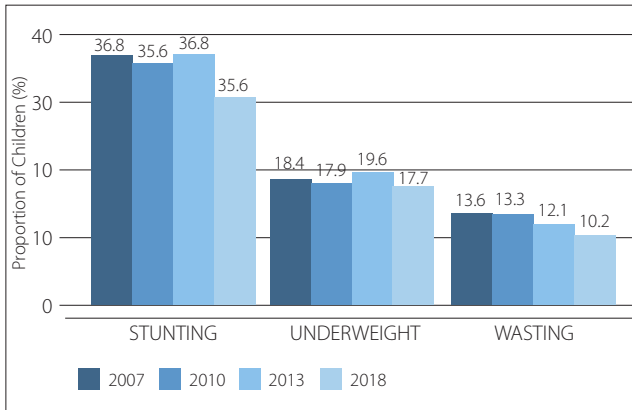
Masalah kurang gizi dan rendahnya status kesehatan merupakan salah satu akibat dari kerawanan pangan. Manifestasi lain dari kekurangan gizi, yaitu defisiensi zat gizi mikro yang dialami oleh sekitar 2 miliar penduduk dunia. Setiap tahun lebih dari 3 juta anak meninggal karena kekurangan gizi sebelum anak tersebut mencapai usia 5 tahun. Satu dari lima anak di negara berkembang mengalami masalah gizi; masalah gizi menjadi penyebab utama separuh kematian anak dari total kematian anak di seluruh dunia (Ashley, 2016).



Sumber: FAO dkk. (2019)

Gambar 1.1 Distribusi Masalah Gizi Kurang di Dunia Tahun 2018

Di Indonesia, *stunting* masih menjadi masalah gizi utama yang dapat mengancam masa depan generasi bangsa. Berdasarkan data riset kesehatan dasar (Riskesdas) yang disajikan pada Gambar 1.2, prevalensi masalah gizi balita sejak tahun 2007 hingga 2018 belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Prevalensi *stunting* masih tinggi, yaitu sebanyak 30,8% pada tahun 2018. Meskipun telah terjadi tren penurunan masalah gizi pada anak, angka tersebut masih cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia masih rentan mengalami rawan pangan karena salah satu indikasi kerawanan pangan pada suatu masyarakat adalah tingginya prevalensi masalah gizi pada balita.



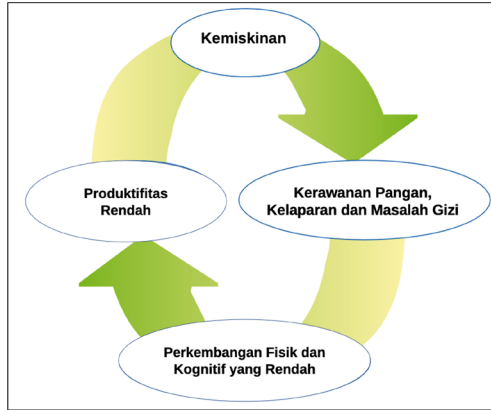
Sumber: Arif dkk. (2020)

Gambar 1.2 Gambaran Status Gizi Balita Indonesia Tahun 2007–2018

Ketika kerawanan pangan terjadi pada suatu daerah maka akan berpotensi menyebabkan masyarakat menjadi kelaparan. Kondisi kelaparan berarti masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi untuk tetap hidup sehat dan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Hal ini akan berdampak pada rendahnya kemampuan fisik dan kognitif yang dalam jangka panjang akan menyebabkan rendahnya produktivitas kerja. Gambar 1.3 memperlihatkan hubungan yang saling terkait antara kerawanan pangan, masalah gizi, dan kemiskinan.

Produktivitas kerja yang rendah akan berbanding lurus dengan rendahnya pendapatan seseorang yang dapat berujung pada kemiskinan. Sementara itu, kemiskinan menjadi faktor ekonomi yang menghambat seseorang memperoleh pangan yang cukup baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jika mata rantai ini tidak diputus, akan menciptakan masalah yang sama dan berulang terus-menerus.

Di Indonesia, kondisi kerawanan pangan di berbagai daerah berbeda-beda namun ada kecenderungan Indonesia bagian timur masih berpotensi mengalami kerawanan yang cukup tinggi (Kemen-



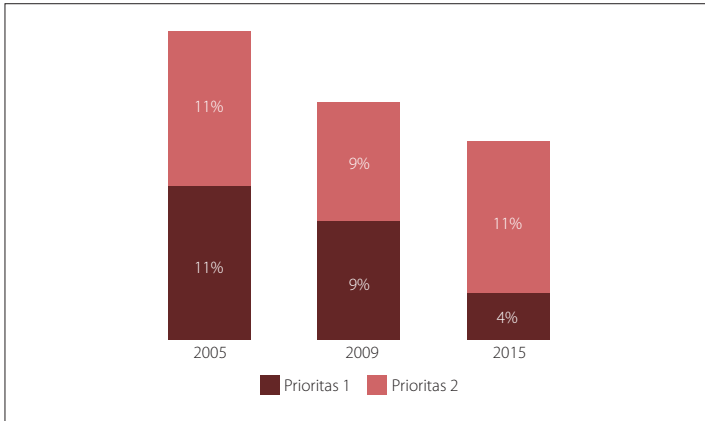
Gambar 1.3 Hubungan antara Kerawanan Pangan, Masalah Gizi, dan Kemiskinan

terian Pertanian, 2019). Kondisi geologis dan infrastruktur, kejadian bencana alam, dan perubahan iklim menjadi tantangan tersendiri bagi ketahanan pangan masyarakat. Perubahan iklim menjadi ancaman besar bagi ketahanan pangan dan gizi, terutama bagi rumah tangga yang mata pencariannya bergantung pada sektor pertanian.

Bahan pangan utama masyarakat Indonesia adalah beras. Meskipun Indonesia merupakan salah satu penghasil beras terbesar di kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), hingga saat ini Indonesia masih melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Meskipun demikian, rasio ketergantungan impor beras di Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. Hal ini mengindikasikan bahwa posisi ketersediaan beras nasional relatif cukup baik (Hermanto, 2015).

Berdasarkan data peta ketahanan dan kerentanan pangan Indonesia tahun 2015 menunjukkan bahwa akses pangan masyarakat Indonesia sangat berhubungan dengan status kemiskinan. Meskipun telah terjadi penurunan jumlah kabupaten yang sangat rentan mengalami kerawanan pangan dan termasuk kabupaten prioritas 1

dan 2, tingkat kemiskinan di Indonesia masih di sekitar angka 10,96% pada tahun 2014. Hal ini berarti bahwa masih terdapat 27,73 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan kesulitan dalam mengakses pangan (Dewan Ketahanan Pangan dkk., 2015).



Keterangan: Prioritas 1 merupakan kabupaten yang sangat rentan mengalami kerawanan pangan. Prioritas 2 merupakan kabupaten yang rentan mengalami kerawanan pangan. Karakteristik prioritas 1 dan 2 antara lain jumlah penduduk miskin, prevalensi balita *stunting*, dan jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih.

Sumber: Dewan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dan World Food Programme (2015)

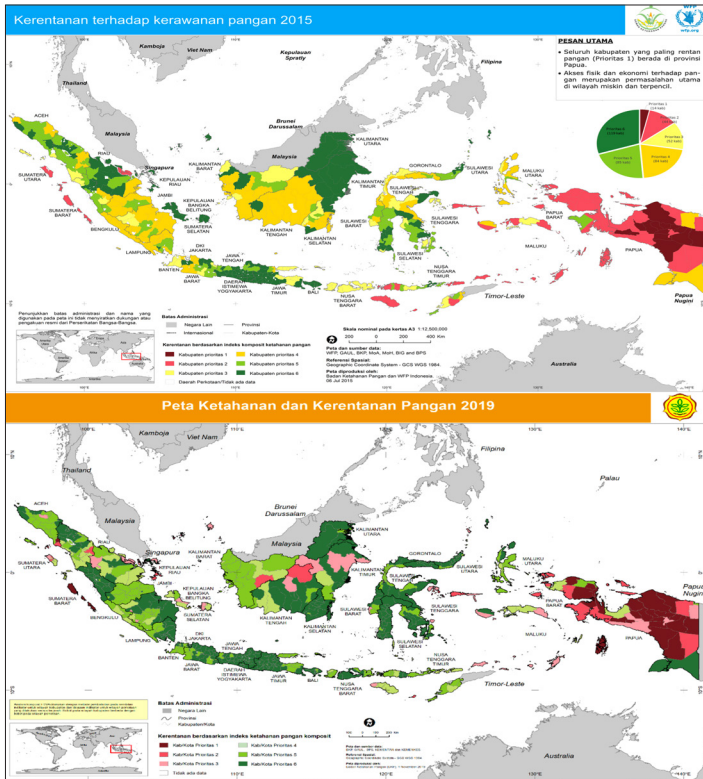
Gambar 1.4 Persentase Penurunan Jumlah Kabupaten Prioritas 1 dan 2 Tahun 2005–2015

Pada Gambar 1.4 terlihat persentase penurunan jumlah kabupaten yang mengalami kerawanan pangan dan menjadi prioritas 1 dan 2 sejak tahun 2005 hingga tahun 2015. Warna merah tua menunjukkan daerah prioritas 1 dan warna merah muda menunjukkan daerah prioritas 2. Daerah prioritas 1 dan 2 merupakan daerah berisiko tinggi terhadap kerawanan pangan sehingga menjadi daerah prioritas untuk program pangan dan gizi dalam rencana pembangunan nasional.

Meskipun terlihat bahwa pada tahun 2019 telah terjadi penurunan jumlah daerah prioritas, namun sebagian besar wilayah Papua dan sebagian daerah Kalimantan masih menjadi daerah prioritas 1 dan 2.

Terdapat 14 kabupaten yang masih termasuk ke dalam kabupaten prioritas 1 dan semua kabupaten tersebut berada di Provinsi Papua. Adapun kabupaten yang masih berada pada prioritas 2 sebanyak 44 kabupaten yang tersebar di Provinsi Papua (12 kabupaten), Papua Barat (9 kabupaten), Nusa Tenggara Timur (9 kabupaten), Maluku (7 kabupaten), Sumatra Utara (4 kabupaten), dan 1 kabupaten masing-masing di Sumatra Barat, Riau, dan Maluku Utara. Daerah prioritas tersebut merupakan kabupaten yang berisiko tinggi mengalami kerawanan pangan. Daerah rentan mengalami kerawanan pangan ditandai dengan tingginya prevalensi balita *stunting*, tingginya rumah tangga tanpa akses ke air bersih, tingginya penduduk miskin, tingginya rumah tangga dengan pengeluaran pangan >65% terhadap total pengeluaran, dan rendahnya angka harapan hidup (Kementerian Pertanian, 2019).

Sementara itu, distribusi daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi dapat dilihat pada Gambar 1.5 yang menampilkan perbandingan daerah rawan pangan antara tahun 2015 dan 2019. Gradasi warna merah menunjukkan gradasi tingkat kerawanan pangan suatu daerah. Makin merah makin rawan pangan daerah tersebut. Begitu pula gradasi warna hijau, semakin hijau berarti tingkat ketahanan pangan daerah makin baik. Adapun kabupaten yang mengalami perbaikan status ketahanan pangan paling tinggi berturut-turut adalah Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur yang terlihat dari perubahan warna dari hijau muda menjadi hijau tua. Peningkatan status ketahanan pangan pada kabupaten-kabupaten tersebut secara umum disebabkan oleh penurunan persentase pengeluaran pangan >65%, peningkatan akses rumah tangga terhadap air bersih, dan penurunan persentase balita *stunting*.



Sumber: Dewan Ketahanan Pangan, dkk. (2015); Kementerian Pertanian (2019)
Gambar 1.5 Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan di Indonesia Tahun 2015 dan 2019

Peningkatan status juga disebabkan oleh perbaikan kondisi indikator pada kabupaten/kota tersebut lebih tinggi jika dibandingkan kota-kota lain. Hal ini menyebabkan nilai indeks ketahanan pangannya secara agregat relatif lebih tinggi jika dibandingkan kota lainnya di seluruh Indonesia (Kementerian Pertanian, 2019).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

B. Potensi Kerawanan Pangan pada Masyarakat Adat

Bank Dunia (World Bank) menyatakan bahwa masyarakat adat merupakan masyarakat terpinggirkan dan menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap kerawanan pangan, kesehatan, dan berbagai aspek kehidupan di berbagai negara (Montenegro & Stephens, 2006; Perry dkk., 2006). Jika dibandingkan masyarakat pada umumnya, masyarakat adat jauh lebih rentan mengalami kerawanan pangan (Anglicare, 2012; Egeland dkk., 2011). Berapa kajian menemukan bahwa kebijakan pemerintah mengubah budaya pangan dan melakukan intensifikasi pertanian dengan membangun lahan persawahan yang baru. Kebijakan ini berdampak pada kebiasaan konsumsi pangan masyarakat adat dari sugu menjadi beras sebagaimana ditemukan pada masyarakat adat Mentawai (Pradipta, 2019). Kurangnya ketersediaan dan aksesibilitas pangan lokal yang biasa masyarakat adat konsumsi sehari-hari membuat mereka cenderung rawan pangan (Nurbaya, 2017).

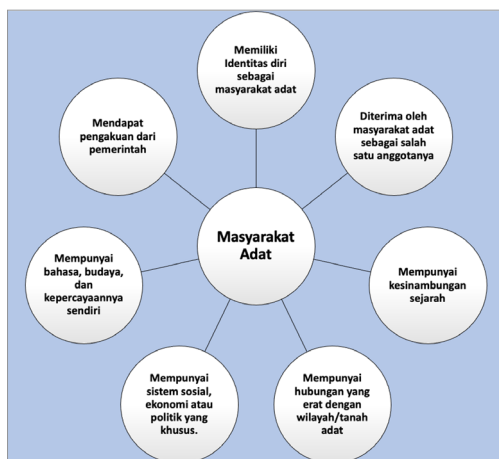
Selain itu, konflik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat adat menyebabkan peningkatan ketidakamanan di sekitar wilayah adat yang secara negatif memengaruhi sistem pangan mereka. Hal ini terjadi mulai dari masyarakat Amazon hingga masyarakat adat di perbukitan Himalaya. Masyarakat adat makin sulit mengakses pangan lokal yang biasa mereka konsumsi sehari-hari karena tingginya aktivitas penebangan kayu atau aktivitas tambang di sekitar wilayah adat yang menyebabkan mereka makin rentan mengalami kerawanan pangan (FAO, 2021).

Meskipun populasi masyarakat adat hanya sekitar 5% dari populasi dunia, mereka mewakili 15% dari populasi masyarakat miskin global (Kuhnlein, 2017). Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa masyarakat adat, seperti Aborigin Australia dan *Torres Strait Islander* secara signifikan lebih berisiko mengalami kerawanan pangan daripada masyarakat umum yang bukan penduduk asli, terutama mereka yang tinggal di daerah perdesaan atau terpencil (Pollard

& Booth, 2019). Namun, sebelum membahas lebih jauh tentang kerawanan pangan pada masyarakat adat, perlu dipahami dengan baik tentang siapa yang disebut sebagai masyarakat adat (*indigenous people*).

Indigenous people adalah istilah yang digunakan secara global untuk menyebutkan masyarakat adat. Masyarakat adat pada tingkat individu adalah seseorang yang menjadi bagian dari satu populasi masyarakat adat dengan mengidentifikasi dirinya sebagai penduduk asli, diakui dan diterima oleh kelompok masyarakat adat tersebut sebagai salah satu anggotanya (FAO, 2010; UNDESA, 2013).

Masyarakat adat memiliki hukum adat, bahasa, dan sosial budaya yang beragam yang sangat berbeda dari kelompok etnolinguistik dalam suatu negara (AIPP & IWGIA, 2010). Masyarakat adat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tanah leluhur mereka yang berakar pada budaya dan sejarah serta merupakan bagian inti dari spiritualitas dan identitas mereka. Kepemilikan terhadap tanah adat merupakan aspek penting dari identitas dan budaya masyarakat adat yang tidak bisa dilepaskan (UNPFII, 2007).



Sumber: FAO (2010)

Gambar 1.6 Ciri-ciri Masyarakat Adat

Dengan mempertimbangkan beragam definisi tentang masyarakat adat, Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat (*Working Group on Indigenous Peoples*) menolak gagasan tentang pemberian definisi formal untuk istilah masyarakat adat. Hal ini karena definisi masyarakat adat cukup kompleks dan beragam. Oleh karena itu, definisi resmi masyarakat adat belum diadopsi oleh berbagai lembaga dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Namun, kelompok kerja tersebut tetap mengembangkan pemahaman umum tentang ciri-ciri masyarakat adat berdasarkan hal-hal pada Gambar 1.6, yaitu

- 1) mempunyai identitas diri sebagai masyarakat adat pada tingkat individu dan diterima oleh masyarakat adat sebagai salah satu anggotanya;
- 2) mempunyai kesinambungan sejarah dengan masyarakat prakolonial dan/atau prapemukim;
- 3) mempunyai hubungan yang erat dengan wilayah/tanah adat dan sumber daya alam sekitarnya;
- 4) mempunyai sistem sosial, ekonomi, atau politik yang khusus;
- 5) mempunyai bahasa, budaya, dan kepercayaannya sendiri yang berbeda dari masyarakat secara umum; dan
- 6) melestarikan lingkungan dan sistem leluhur mereka sebagai kelompok adat.
- 7) Sebagai kriteria tambahan, Food and Agriculture Organization (FAO) juga menyebutkan bahwa masyarakat adat juga harus mendapat pengakuan dari pemerintah bahwa mereka adalah masyarakat adat.

Sebuah studi di Kanada menunjukkan bahwa anak-anak dalam komunitas adat di negara tersebut mengalami tingkat kerawanan pangan yang lebih tinggi dibanding dengan orang dewasa yang tinggal dalam rumah tangga yang sama (Power, 2008). Hal yang sama ditemukan pada studi yang dilakukan di Selandia Baru dan Brasil,

bahwa masyarakat adat memiliki tingkat kerawanan pangan dan masalah gizi yang lebih tinggi dibanding masyarakat pada umumnya (Ferreira dkk., 2012; McKerchar dkk., 2014).

Di Indonesia sendiri, penelitian tentang masyarakat adat Ciptagelar di Jawa Barat menemukan prevalensi anak *stunting* pada masyarakat tersebut cukup tinggi, yaitu 31,2%. Studi tersebut juga mengukur ketersediaan pangan di masyarakat yang mulai menurun. Ketersediaan pangan pada masyarakat Ciptagelar terlihat dari kepemilikan *leuit*, istilah untuk tempat penyimpanan cadangan pangan di masyarakat Ciptagelar (Khomsan dkk., 2013).

Tabel 1.1 Rangkuman Penelitian tentang Masyarakat Adat di Beberapa Negara

Penulis, Tahun	Subjek Penelitian	Hasil Penelitian
Skinner dkk., 2016	Masyarakat adat di daerah perkotaan di Kanada, Amerika Serikat, dan Australia	Kerawanan pangan pada populasi masyarakat adat yang tinggal di perkotaan merupakan masalah di ketiga negara tersebut, yaitu Kanada, Amerika Serikat, dan Australia.
McKerchar dkk., 2014	Masyarakat adat Māori di Selandia Baru	Masyarakat adat Māori memiliki tingkat kerawanan pangan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat Selandia Baru pada umumnya.
Khomsan dkk., 2013	Masyarakat Adat Ciptagelar di Jawa Barat, Indonesia	Prevalensi <i>underweight</i> pada balita sebanyak 12,5%, <i>stunting</i> 31,2%, dan <i>wasting</i> 12,5%. Strategi bertahan yang dilakukan adalah membeli makanan yang lebih murah, mengurangi jenis makanan yang dikonsumsi, dan mengubah prioritas makanan
Skinner dkk., 2013	Masyarakat Aborigin (First Nations, Métis, dan Inuit) tinggal di Kanada.	Kombinasi membeli makanan lokal dan membeli makanan di toko merupakan bagian dari strategi bertahan dan solusi yang disarankan untuk mengatasi kerawanan pangan pada masyarakat adat.

Penulis, Tahun	Subjek Penelitian	Hasil Penelitian
Ferreira dkk., 2012	Anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun di masyarakat adat Xavante, Brasil	Gizi kurang, terutama gangguan pertumbuhan linier adalah masalah kesehatan utama bagi anak-anak Xavante. Temuan ini kontras dengan profil gizi pada anak-anak Brasil secara nasional.
Montenegro dkk., 2006	Penduduk asli Amerika Latin dan Karibia	Penduduk asli di Amerika Latin dan Karibia telah hidup selama berabad-abad dan berhubungan dekat dengan lingkungan mereka. Beberapa komunitas adat masih berpotensi mengalami kerawanan pangan. Mereka mempertahankan tradisi dan cara hidup mereka yang lebih harmonis dalam ekosistem.
Usfar dkk., 2007	Rumah tangga di dua wilayah perkotaan dan empat pedesaan di Indonesia	Mayoritas rumah tangga rawan pangan sebanyak 77% di daerah perkotaan dan 84% pedesaan.
Usfar, 2007	Rumah tangga di 6 provinsi di Indonesia	Nusa Tenggara Timur dan Barat menderita kerawanan pangan yang kronis dan lebih parah

Potensi kerawanan pangan pada masyarakat adat Mentawai di Sumatra Barat mulai terlihat. Salah satu penyebab kerawanan pangan pada masyarakat adat ini adalah adanya kebijakan transmigrasi yang menyebabkan penduduk dari luar Pulau Sumatra berpindah ke daerah Mentawai. Program transmigrasi tersebut telah merusak hutan adat tempat mereka selama ini tinggal dan mencari penghidupan (Pradipta, 2019).

Hutan adalah sumber pangan utama masyarakat adat Mentawai. Mereka kini kesulitan mengakses sugu yang menjadi bahan pangan utama mereka. Selama ini sugu tumbuh liar di sekitar rumah mereka di dalam hutan. Namun, kini sudah mulai langka karena adanya alih fungsi hutan menjadi permukiman atau perkebunan. Bagi masyarakat

adat, ketika hutan sebagai sumber pangan utama telah rusak berarti ketersediaan pangan utama pun akan berkurang (Pradipta, 2019).



Sumber: Sagurung (2016)

Gambar 1.7 Seorang suku Mentawai sedang mengolah sagu dengan cara tradisional.

Kerawanan pangan merupakan masalah yang cukup kompleks, terlebih lagi pada masyarakat adat yang tinggal di daerah terpencil dan terisolasi. Konseptualisasi ketahanan pangan pada masyarakat adat masih kurang dipahami karena kurangnya penelitian terkait, khususnya di Indonesia (Skinner dkk., 2013). Informasi tentang konsep ketahanan pangan tersebut diperlukan untuk memahami bagaimana masyarakat adat dapat menghadapi situasi rawan pangan.

Tambahan lagi, strategi bertahan untuk mengatasi situasi rawan pangan pada masyarakat adat menjadi cukup unik dan kompleks karena hal ini terkait dengan hukum adat, budaya, dan kepercayaan mereka. Namun sayang, data tentang kerawanan pangan pada masyarakat adat di Indonesia masih sangat terbatas. Oleh karena itu, kajian tentang ketahanan pangan dan strategi bertahan pada masyarakat adat menjadi sangat penting untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tentang masalah ini.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

C. Membangun Kedaulatan Pangan Masyarakat Adat

Istilah ketahanan pangan (*food security*) sering disandingkan dengan istilah kedaulatan pangan (*food sovereignty*). Hal ini karena kedua istilah tersebut saling terkait satu sama lain. Banyak yang sering menganggap ketahanan pangan dan kedaulatan pangan merupakan dua konsep yang sama. Sebenarnya, konsep kedaulatan pangan jauh lebih luas dibanding dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan hanya menitikberatkan pada empat pilar, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan tanpa memperhatikan siapa yang memproduksi pangan. Konsep kedaulatan pangan merupakan respons radikal terhadap kegagalan sistem pangan untuk menyediakan ketahanan pangan pada masyarakat (Trauger, 2015).

Pada tahun 1993, koalisi internasional gerakan petani, perempuan, dan masyarakat adat melakukan pertemuan di Meksiko untuk membahas keprihatinan mereka tentang dampak sistem pertanian yang makin mengglobal dan terkonsentrasi pada mata pencarian, komunitas, dan ekologi. Koalisi ini kemudian disebut sebagai *La Via Campesina*. Pada pertemuan inilah mulai dimunculkan paradigma baru yang disebut sebagai kedaulatan pangan. Para pakar berusaha memberikan definisi yang pas untuk istilah kedaulatan pangan, salah satu di antaranya Wittman (2011) menyatakan,

Kedaulatan pangan adalah hak masyarakat atas pangan yang sehat dan dapat diterima secara budaya yang diproduksi melalui metode yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan masyarakat mempunyai hak untuk menentukan sistem pangan dan pertanian mereka sendiri.

Konsep kedaulatan pangan merupakan sarana untuk melindungi sistem pertanian lokal dari dumping harga pangan yang disebabkan oleh perjanjian perdagangan bebas. Konsep kedaulatan pangan tersebut menempatkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi makanan sesuai

dengan sistem dan kebijakan pangan yang mereka bentuk, tidak terikat pada tuntutan pasar dan perusahaan. Kedaulatan pangan mengusulkan tercapainya otonomi lokal dan kebebasan memilih petani dalam memutuskan bagaimana mengolah tanah pertanian mereka. Konsep ini pun akan menjaga kepentingan dan inklusi generasi berikutnya (Trauger, 2015).

Konsep kedaulatan pangan menawarkan strategi untuk melawan dan membongkar sistem perdagangan pangan oleh perusahaan. Kedaulatan pangan memberikan hak pada masyarakat untuk menentukan sistem pangan dan pertanian yang dikelola oleh produsen dan pengguna lokal. Kedaulatan pangan memprioritaskan ekonomi, pasar lokal dan nasional, serta memberdayakan pertanian yang digerakkan oleh rakyat di mana produksi, distribusi dan konsumsi pangan berdasarkan kelestarian lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi.

Konsep kedaulatan pangan mempromosikan perdagangan yang transparan yang menjamin pendapatan yang adil bagi semua orang serta hak konsumen untuk mengontrol makanan dan gizi mereka. Konsep ini memastikan bahwa hak untuk menggunakan dan mengelola tanah, wilayah, perairan, benih, ternak, dan keanekaragaman hayati berada di tangan masyarakat yang memproduksi makanan. Kedaulatan pangan menempatkan hak atas pangan yang cukup, sehat, dan sesuai dengan budaya untuk semua individu, masyarakat, dan komunitas sebagai pusat kebijakan pangan, pertanian, dan peternakan serta menolak pangan difungsikan sebagai komoditas untuk nonpangan (Akram-Lodhi, 2013).

Kedaulatan pangan menyiratkan hubungan sosial baru yang bebas dari penindasan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, kelompok masyarakat, kelompok ras, kelas, serta generasi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, salah satu perjuangan masyarakat adat Indonesia saat ini adalah untuk mencapai kedaulatan pangan sehingga dapat memenuhi ketahanan pangan mereka secara mandiri (Wittman,

2011). Secara konseptual, setidaknya ada tujuh prasyarat utama untuk mewujudkan kedaulatan pangan (Adiasih dkk., 2020), yaitu

- 1) pembaruan agraria;
- 2) hak akses pada rakyat terhadap pangan;
- 3) pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- 4) pemanfaatan pangan untuk pangan/makanan dan bukan untuk komoditas yang diperdagangkan;
- 5) pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi;
- 6) pelarangan penggunaan pangan sebagai senjata; dan
- 7) pemberian akses ke petani kecil untuk merumuskan kebijakan pertanian mereka sendiri.

Sebagai sebuah konsep yang lahir dari gerakan-gerakan sosial masyarakat, prinsip kedaulatan pangan sangat berseberangan dengan politik neoliberal dan sistem pangan berbasis korporasi. Kedaulatan pangan menempatkan produsen pangan (para petani) dan konsumen pangan sebagai pusat pengambil keputusan tentang masalah pangan dan menolak struktur pemerintahan yang bergantung pada perdagangan internasional yang tidak adil dan memberikan kekuasaan kepada korporasi. Sebagai konsep alternatif, kedaulatan pangan menawarkan strategi untuk melawan dan membongkar sistem pangan yang tidak adil dan tidak berkelanjutan serta merugikan masyarakat kecil. Dampak sistem ini berupa meningkatnya masalah gizi buruk, *stunting*, serta masalah obesitas di satu sisi (Bernstein & Bachriadi, 2014). Perbedaan antara sistem pangan korporasi dan konsep kedaulatan pangan dapat dilihat pada Tabel 1.2..

Tabel 1.2 Perbedaan antara Pangan Korporat dan Sistem Kedaulatan Pangan

	Konsep Kedaulatan Pangan	Sistem Pangan Korporat/ Neoliberal
Memberi Makan Dunia	Akses/ketahanan pangan dengan memprioritaskan produksi pertanian lokal dan melindungi pasar lokal dari dumping/impor pangan bersubsidi.	Akses/ketahanan pangan melalui produksi intensif berdasarkan prinsip keunggulan komparatif dan didistribusikan melalui mekanisme pasar.
Peran Pertanian dalam Memajukan Pembangunan Nasional	Pertanian berkelanjutan sebagai bagian dari ekonomi yang terdiversifikasi akan meningkatkan kesejahteraan nasional melalui peningkatan ketahanan pangan dan memastikan lingkungan yang sehat. Perdagangan yang adil akan memacu pertumbuhan ekonomi.	Meningkatkan neraca perdagangan yang positif melalui peningkatan ekspor komoditas pertanian. Masyarakat yang berhasil secara ekonomi akan berinvestasi dalam infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (misalnya rumah sakit, sekolah).
Peran Teknologi dalam Memajukan Pembangunan Pertanian	Petani harus menjadi efisien dan kompetitif melalui diversifikasi produksi, penggunaan teknologi alternatif, dan meminimalkan penggunaan dari input eksternal. Pemecahan masalah didasarkan pada pendekatan holistik untuk adopsi teknologi tepat guna, termasuk agroekologi.	Peningkatan produktivitas datang melalui inovasi ilmiah, adopsi teknologi, dan manajemen modern. Pemecahan masalah berdasarkan pendekatan yang terkotak-kotak masalah kesuburan tanah, penyakit, serangan hama, dll.
Sistem Tata Lingkungan	Kebijakan pertanian dan lingkungan tidak dapat dipisahkan; pertanian berkelanjutan melindungi keanekaragaman hayati dan menyisakan ruang untuk kawasan konservasi.	Kawasan lindung, taman nasional, dan peraturan lingkungan sudah cukup, asalkan tidak merugikan potensi perluasan tanaman ekspor pertanian.

Pada Tabel 1.2 diperlihatkan perbedaan antara sistem pertanian dan konsep kedaulatan pangan yang diinginkan oleh masyarakat lokal. Kedaulatan pangan sangat penting untuk menegaskan prinsip-prinsip praproduksi, produksi, distribusi, dan konsumsi yang diinginkan dan dijalankan oleh masyarakat lokal dan masyarakat adat (Bernstein & Bachriadi, 2014; Trauger, 2015). Dari uraian tersebut setidaknya kedaulatan pangan meliputi beberapa komponen, antara lain:

- 1) upaya produksi pangan untuk memenuhi pasar domestik dan lokal secara mandiri;
- 2) pemanfaatan usaha petani kecil dan keluarga dengan pendekatan agroekologis;
- 3) jaminan masyarakat terhadap akses tanah dan sumber-sumber daya yang vital;
- 4) jaminanterciptanya harga yang adil;
- 5) penghormatan dan pelibatan peran wanita dalam berbagai kegiatan produksi pangan;
- 6) dorongan terhadap kontrol komunitas lokal atas sumber daya produktif; dan
- 7) perlindungan benih dari berbagai pematenan (Santoso & Falatehan, 2021).

Kedaulatan pangan juga mencakup hak atas ketahanan pangan serta terdapat transformasi hubungan sosial. Dalam hal ini, khususnya, antara gender dan ras dan pengelolaan berbagai sumber daya produktif yang bebas dari ancaman pengusiran dan privatisasi dari pihak pemerintah maupun swasta (Trauger, 2015).

Kedaulatan pangan dibangun di atas keterampilan dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal atau masyarakat adat sebagai penyedia pangan dan kelembagaan lokal mereka yang melestarikan, mengembangkan, dan mengelola sistem pangan tepat guna dan menolak teknologi yang merusak. Oleh karena itu, konsep kedaulatan pangan berusaha mengadvokasi kepentingan dan hak

masyarakat sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Konsep ini juga mencakup menjaga kemampuan masyarakat adat untuk menentukan sistem pangan mereka untuk mengurangi masalah kelaparan dan masalah gizi dalam segala bentuk. Karena itulah upaya kedaulatan pangan merupakan prasyarat logis bagi terciptanya ketahanan pangan pada masyarakat adat (Patel, 2009).

Buku *Kumande Samaturu': Berdaulat Pangan di Kaluppini* akan membahas lebih jauh tentang konsep kedaulatan pangan dan ketahanan pangan pada masyarakat adat Kaluppini. Bab 1 pada buku ini secara umum membahas tentang masalah pangan dan potensi kerawanan pangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia terutama pada masyarakat adat dan daerah-daerah terpencil. Hal inilah yang membuat penulis perlu menyusun Bab 2 yang khusus membahas tentang konsep kedaulatan pangan, ketahanan pangan, dan kerawanan pangan, serta dampak yang ditimbulkan atas status kerawanan pangan tersebut.

Untuk mengetahui status ketahanan pangan suatu masyarakat atau bahkan status ketahanan pangan rumah tangga hingga pada level individu dibutuhkan alat yang objektif untuk mengukur status ketahanan pangan tersebut. Bab 2 juga menjelaskan tentang metode pengukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui status ketahanan pangan. Bab ini juga membahas tentang upaya bertahan dari situasi rawan pangan dan bagaimana masyarakat melakukan berbagai cara untuk bisa mengatasi masalah tersebut.

Secara spesifik, buku ini membahas tentang masyarakat adat Kaluppini, falsafah hidup, dan keunikan masyarakat tersebut pada Bab 3. Lebih lanjut, penulis memaparkan status ketahanan pangan dan bentuk *coping strategy* masyarakat tersebut pada Bab 4. Masyarakat adat Kaluppini secara tradisional terus bertahan dalam situasi rawan pangan dengan mengandalkan pengetahuan tradisional yang mereka miliki. Pelaksanaan berbagai ritual adat dan tradisi *kumande samaturu'* menjadi hal penting pada sistem kedaulatan pangan dan ketahanan pangan masyarakat tersebut.

Sebagai penutup, buku ini menekankan bagaimana masyarakat adat Kaluppini berusaha menjaga kedaulatan dan ketahanan pangan mereka dengan tetap merawat tradisi yang mereka yakini selama ini salah satunya adalah tradisi berbagi *nande sesa* secara komunal. Menjaga tradisi dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan di masyarakat tersebut.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB 2

Konsep Ketahanan dan Kedaulatan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi manusia untuk tetap bertahan hidup dan sehat setiap hari. Pangan sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan pangannya setiap hari.

Ketersediaan pangan saja tidak cukup untuk memberikan ketahanan pangan pada masyarakat karena akses terhadap pangan sering kali menjadi penyebab kurangnya ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Faktor ekonomi seperti kemiskinan sering kali menjadi penyebab seseorang sulit membeli pangan dan memenuhi ketersediaan pangan untuk kehidupan sehari-hari. Akses masyarakat terhadap pangan hingga ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga merupakan satu kesatuan yang saling terkait dalam menciptakan ketahanan pangan.

A. Konsep Ketahanan Pangan

Istilah ketahanan pangan tidak begitu dipahami dengan baik oleh masyarakat umum, bahkan istilah ini lebih sering diasosiasikan

dengan ketersediaan pangan. Padahal definisi ketahanan pangan jauh lebih luas dari sekadar ketersediaan pangan yang mencakup akses ekonomi, sosial, dan fisik ke pangan dan komponen gizi; pemanfaatan; serta keamanan pangan.

Para pakar pada World Food Summit tahun 1966 mendefinisikan ketahanan pangan sebagai “suatu kondisi ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi ke bahan makanan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan makanan dan preferensi makanan untuk hidup aktif dan sehat.” (Ecker & Breisinger, 2012; Pieters dkk., 2013).

Sementara itu, FAO mendefinisikan ketahanan pangan sebagai “situasi ketika masyarakat memiliki akses terhadap makanan yang aman dan bergizi dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan normal serta untuk kehidupan yang aktif dan sehat” (Ashley, 2016).

Di Indonesia sendiri, Undang-Undang No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tecermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Selain itu, ketahanan pangan dan gizi juga mensyaratkan efektivitas pangan dan sanitasi (Kementerian Pertanian, 2019; Sufyan dkk., 2021)

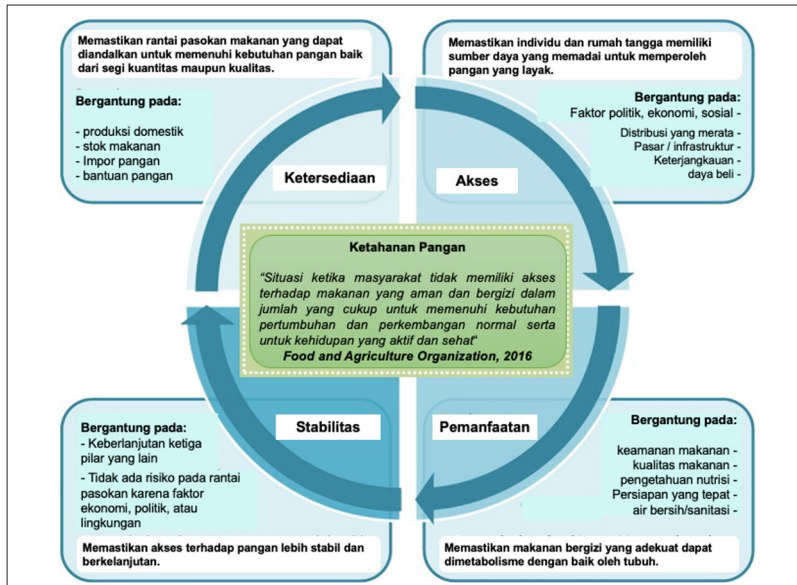
Secara umum ketahanan pangan adalah istilah yang mengacu pada kemampuan fisik, sosial, dan ekonomi suatu masyarakat, rumah tangga, dan individu untuk mendapatkan makanan yang cukup baik dari kuantitas dan kualitas agar dapat hidup sehat. Ketahanan pangan mempunyai beberapa komponen yang saling terhubung satu sama lain dan semua komponen tersebut harus terpenuhi untuk mencapai status ketahanan pangan yang diharapkan dan tentu saja untuk mencegah terjadinya situasi rawan pangan. Ketahanan pangan memiliki empat pilar, yaitu ketersediaan (*availability*), aksesibilitas terhadap kecuku-

pan pangan (*accessibility*), pemanfaatan pangan bergizi (*utilization*), dan stabilitas ketersediaan pangan (*stability*) (Charlton, 2016).

Definisi ketahanan pangan dari FAO juga menekankan bahwa ketahanan pangan mencakup ketahanan gizi (*nutrition security*) yang mengacu pada akses pangan yang dapat menjamin kecukupan asupan zat gizi makro dan mikro tanpa asupan kalori, lemak, gula rafinasi, dan garam yang berlebihan (Arnold dkk., 2011).

B. Pilar Ketahanan Pangan

Ada empat pilar ketahanan pangan yang dinyatakan dalam Ringkasan Kebijakan FAO, yaitu *availability*, *accessibility*, *utilization* dan *stability*. Keempat pilar tersebut dan faktor yang memengaruhinya dapat dilihat lebih jelas pada Gambar 2.1 (Dewan Ketahanan Pangan dkk., 2015; Russell dkk., 2011):



Sumber: Dewan Ketahanan Pangan dkk. (2015); Russell dkk. (2011)

Gambar 2.1 Hubungan Empat Pilar Ketahanan Pangan

1) Ketersediaan pangan (*food availability*)

Ketersediaan pangan berarti suatu kondisi tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup, beragam, dan kualitas yang sesuai, yang dipasok baik melalui produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, maupun impor dari luar negeri, termasuk juga bantuan pangan luar negeri. Ketersediaan pangan bukan hanya berarti bahwa pangan tersebut tersedia di pasar, namun harus dipastikan bahwa pangan tersedia di dalam rumah tangga. Ketersediaan pangan dapat dihitung baik di tingkat nasional, regional, kabupaten hingga tingkat rumah tangga atau individu.

2) Aksesibilitas pangan (*food accessibility*)

Aksesibilitas pangan berarti kemampuan rumah tangga dan individu untuk mengakses pangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan yang adekuat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk asupan bergizi sehari-hari. Akses pangan juga ditentukan oleh harga pangan dan sumber daya ekonomi yang ada dalam rumah tangga. Apakah masyarakat mempunyai cukup uang atau tidak untuk membeli bahan pangan yang tersedia di pasar (Pieters dkk., 2013).

Selain faktor ekonomi, akses pangan juga dipengaruhi oleh kendala fisik, seperti lokasi yang terpencil, jalan rusak, atau sulitnya akses terhadap transportasi untuk menjangkau pasar (Ashley, 2016). Oleh karena itu, meskipun tersedia di suatu daerah, pangan tidak dapat diakses oleh rumah tangga dan individu jika mereka tidak mampu mengakses secara fisik, ekonomi, dan sosial.

Akses fisik terhadap pangan dapat berupa infrastruktur pasar termasuk sarana transportasi yang memadai untuk mencapai pasar. Akses ekonomi berarti masyarakat mempunyai kemampuan keuangan untuk membeli makanan yang cukup, beragam, dan bergizi. Sementara itu, akses sosial berarti terdapat modal sosial di masyarakat yang dapat digunakan untuk mendapatkan mekanisme dukungan informal, seperti adanya sistem barter, meminjam, atau adanya program dukungan sosial lainnya seperti bantuan tunai bahan pangan.

3) Pemanfaatan pangan (*food utilization*)

Pemanfaatan atau konsumsi pangan meliputi pemanfaatan pangan yang bisa diakses oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap zat gizi–pemanfaatan makanan secara efisien oleh tubuh.

Pemanfaatan pangan biasanya bergantung pada beberapa faktor, yaitu:

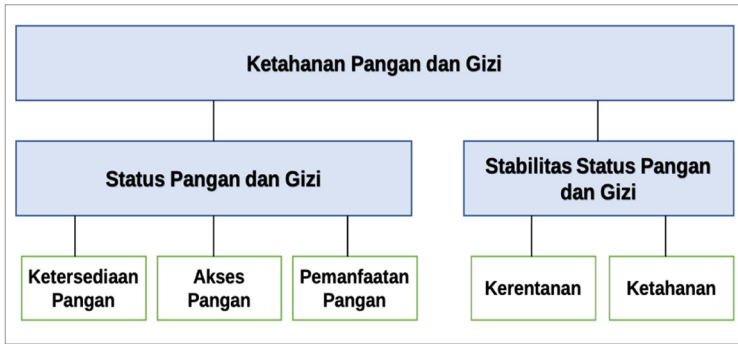
- a) fasilitas yang tersedia untuk menyimpan makanan dan mengolah bahan pangan di rumah tangga;
- b) pengetahuan dan praktik pemberian makan pada bayi dan anak-anak;
- c) kepercayaan budaya dan tabu makanan;
- d) distribusi makanan dalam rumah tangga;
- e) status kesehatan individu, yang mungkin terganggu oleh penyakit, dan kebersihan yang buruk.
- f) Ketersediaan air dan sanitasi serta akses ke fasilitas kesehatan dan perawatan kesehatan.

Meskipun pangan dapat diakses dengan mudah dan tersedia di dalam rumah tangga, jika tidak dimanfaatkan dan dikonsumsi dengan benar oleh semua anggota rumah tangga dapat menyebabkan masalah gizi. Bahkan, jika tidak diolah dengan benar dapat menyebabkan ketidakamanan pangan yang menyebabkan keracunan atau diare.

4) Stabilitas pangan (*food stability*)

Untuk menjamin keamanan pangan di tingkat populasi, rumah tangga hingga individu, masyarakat harus memiliki ketersediaan pangan yang cukup dan dapat diakses kapan saja. Stabilitas pangan biasanya terkait dengan potensi kerentanan dan faktor-faktor risiko lainnya yang dapat menyebabkan kerawanan pangan, seperti faktor stabilitas ekonomi dan sosial-politik. Penyebab lain yang dapat mengganggu stabilitas rantai pasokan pangan adalah peristiwa perubahan musim seperti musim kemarau yang berkepanjangan yang menyebabkan hasil

panen menurun (Pieters dkk., 2013). Berikut ini adalah kerangka hubungan antardimensi ketahanan pangan:



Sumber: Pieters dkk. (2013)

Gambar 2.2 Kerangka Hubungan Ketahanan Pangan dan Gizi

C. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

Konsep ketahanan pangan dan gizi telah berkembang dan menjadi pembahasan utama dalam agenda kebijakan internasional selama beberapa dekade terakhir. Istilah ketahanan pangan dan gizi telah banyak digunakan untuk memadukan aspek ketahanan pangan dan ketahanan gizi sekaligus untuk menunjukkan bahwa pangan dan gizi merupakan satu kesatuan yang saling terkait.

Istilah ketahanan pangan dan gizi merupakan gabungan konsep antara ketahanan pangan dan ketahanan gizi. Untuk membedakan kedua istilah ini dapat dilihat pada Tabel 2.1 (El Bilali dkk., 2019).

Tabel 2.1 Istilah dan Definisi Kedaulatan Pangan, Ketahanan Pangan, dan Gizi

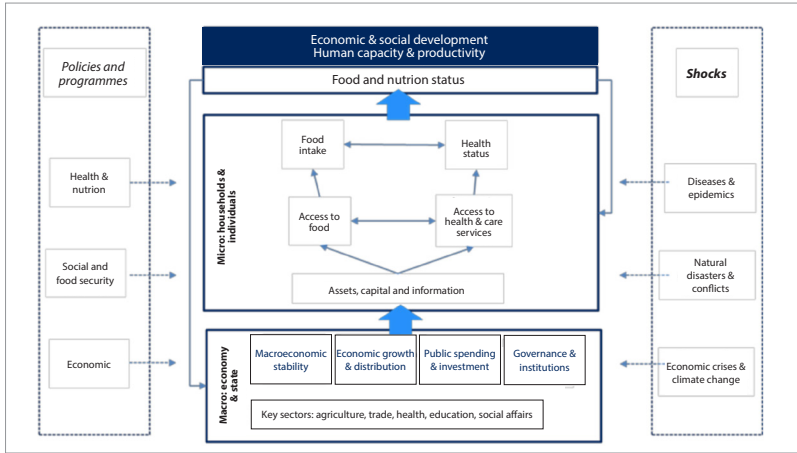
Istilah	Definisi
Kedaulatan Pangan (<i>Food Sovereignty</i>)	Kedaulatan pangan adalah hak masyarakat atas pangan yang sehat dan dapat diterima secara budaya yang diproduksi melalui metode yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dan masyarakat mempunyai hak untuk menentukan sistem pangan dan pertanian mereka sendiri.

Istilah	Definisi
Ketahanan Pangan (<i>Food Security</i>)	Suatu kondisi ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial dan ekonomi ke bahan makanan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan makanan dan preferensi makanan untuk hidup aktif dan sehat.
Ketahanan Gizi (<i>Nutrition Security</i>)	Suatu kondisi ketika ketahanan pangan dipadukan dengan sanitasi yang baik, layanan kesehatan yang memadai, pola asuh yang optimal, serta praktik pemberian makan yang benar untuk memastikan kehidupan yang sehat bagi semua anggota rumah tangga.
Ketahanan Pangan dan Gizi (<i>Food and Nutrition Security</i>)	Suatu kondisi ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup dalam hal keragaman, kandungan gizi, dan keamanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan preferensi pangan untuk kehidupan yang aktif dan sehat yang dilengkapi dengan lingkungan sanitasi yang bersih, kesehatan, pendidikan dan pola asuh yang memadai.

Sumber: El Bilali dkk. (2019)

Ketahanan pangan dan gizi didefinisikan sebagai kondisi dengan ketersediaan pangan yang memadai (kuantitas, kualitas, keamanan, penerimaan sosial budaya) dan dapat diakses, serta dimanfaatkan secara maksimal oleh semua individu setiap saat untuk menjalani hidup yang sehat dan bahagia. Konsep ketahanan pangan dan gizi menggabungkan kedua konsep menjadi lebih terintegrasi (Pangaribowo dkk., 2013). Namun, tidak ada konsensus universal tentang parameter definisi ketahanan pangan dan gizi yang memiliki keterkaitan kompleks dengan masalah lain termasuk kesehatan, kemiskinan, dan kelestarian lingkungan (Pritchard, 2016).

Kerangka konsep kerja ketahanan pangan dan gizi yang saling terintegrasi dapat dilihat pada Gambar 2.3. Ketahanan pangan merupakan salah satu syarat untuk mencapai status ketahanan gizi yang baik.



Sumber: Arif dkk. (2020)

Gambar 2.3 Kerangka Analisis Kajian Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi

D. Konsep Kerawanan Pangan

Selama beberapa dekade terakhir, istilah *kerawanan pangan* atau rawan pangan telah menjadi salah satu alat penilaian yang paling banyak digunakan untuk mengukur kekurangan pangan yang terjadi pada masyarakat maupun individu. Istilah kerawanan pangan tidak hanya tentang konsep kelaparan dan kekurangan gizi, tetapi juga tentang pengalaman masyarakat yang rentan bahkan terkena dampak kerawanan pangan.

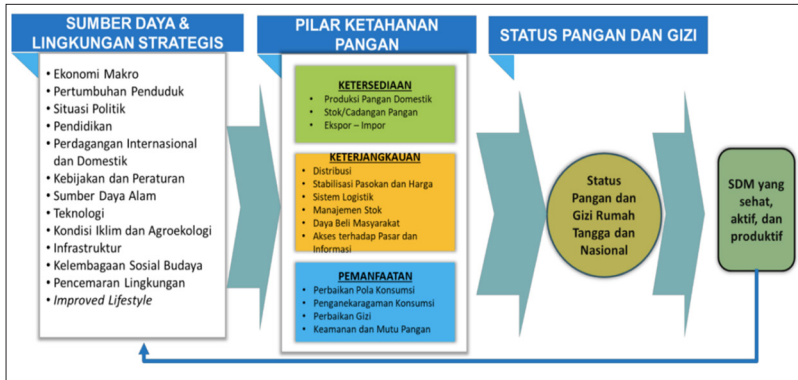
Permentan Nomor 43 Tahun 2010 menyebutkan bahwa kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Kerawanan pangan juga dapat diartikan sebagai kondisi suatu masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya

tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat. Sementara itu, Balitbangkes menyebutkan bahwa kerawanan di tingkat individu terjadi ketika individu hanya mengonsumsi kurang dari 70% angka kecukupan gizi (AKG) orang Indonesia atau sekitar 1.400 kalori (Badan Ketahanan Pangan, 2019).

Secara umum, kerawanan pangan adalah rendahnya akses terhadap pangan sehat dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat (Skinner dkk., 2016). Definisi lain dari kerawanan pangan adalah “suatu kondisi ketika ketersediaan pangan yang cukup, aman dan bergizi, serta kemampuan untuk mengakses pangan tersebut menjadi terbatas dan tidak ada kepastian” (Parnell & Gray, 2014). Kerawanan pangan terjadi ketika ketersediaan pangan yang aman dan bergizi menjadi terbatas atau akses untuk memperoleh pangan tersebut menjadi sulit karena keterbatasan jumlah.

Kerawanan pangan dapat bersifat sementara yang durasinya relatif singkat misalnya karena terjadi musim kemarau selama satu tahun. Jika pemerintah dan masyarakat tidak cukup siap menghadapi tantangan ini, konsekuensinya cukup serius. Sebaliknya, kerawanan pangan pun dapat terjadi dalam jangka panjang. Hal ini dapat terjadi akibat perubahan iklim yang merusak sistem pertanian, krisis harga pangan, atau bahkan konflik dalam suatu daerah atau negara (Kementerian Pertanian, 2019).

Gambar 2.4 merupakan kerangka konseptual ketahanan pangan dan gizi di Indonesia yang menjabarkan bagaimana sumber daya dan kondisi lingkungan yang strategis akan memengaruhi pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan. Ketika sumber daya dan kondisi lingkungan berubah, misalnya terjadi krisis ekonomi atau bencana maka akan mengganggu stabilitas ketiga dimensi ketahanan pangan tersebut sehingga berakibat terjadinya kerawanan pangan pada masyarakat.



Sumber: Kementerian Pertanian (2019)

Gambar 2.4 Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia

Kerawanan pangan memiliki dampak yang luar biasa pada status kesehatan fisik dan mental masyarakat. Pada banyak penelitian disebutkan bahwa kerawanan pangan lebih sering terjadi di daerah pedesaan dibandingkan daerah perkotaan pada suatu negara. Namun, kerawanan pangan di tingkat rumah tangga dapat terjadi baik di negara-negara dengan penghasilan sedang maupun tinggi (Huchet-Bourdon & Laroche-Dupraz, 2014; Skinner dkk., 2013). Hal ini berarti siapa pun dapat berisiko mengalami kerawanan pangan. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang dampak kerawanan pangan dapat dilihat pada subbab “Dampak Kerawanan Pangan”.

Secara umum kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang transien atau kronis. Kerawanan pangan pada tingkat transien umumnya merupakan akibat dari keadaan darurat, relatif berjangka pendek, dan sering kali membutuhkan tindakan segera untuk menyelamatkan nyawa manusia. Contohnya pada masa bencana alam, seperti gempa bumi dan banjir ketika kondisi masih dalam keadaan darurat, akses jalan terputus, dan kerusakan infrastruktur lain yang membuat akses terhadap pangan menjadi cukup sulit. Atau bahkan ketika terjadi konflik yang menciptakan ketidakstabilan harga serta mengganggu mata pencarian masyarakat (Dewan Ketahanan Pangan dkk., 2015).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dalam kasus kerawanan pangan transien, penyediaan bantuan makanan yang diberikan secara cepat dan bantuan kebutuhan dasar lainnya sangat diperlukan untuk menyelamatkan nyawa korban bencana alam atau konflik. Untuk pemulihan jangka panjang, dapat berupa pemulihan mata pencarian dan pemulihan sistem pertanian untuk menunjang akses ekonomi terhadap pangan. Kerawanan pangan transien yang berulang dan tidak ditangani segera dengan baik dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

Sementara itu, kerawanan pangan yang bersifat kronis dan terjadi dalam jangka panjang biasanya berhubungan dengan faktor-faktor yang tidak berubah secara cepat, seperti kemiskinan, perubahan iklim, sistem politik pemerintahan, dan kondisi sosial ekonomi lainnya. Kondisi ini membutuhkan inisiatif pembangunan dari pemerintah dan badan internasional, seperti World Health Organization (WHO), Food and Agriculture Organization (FAO), World Food Programme (WFP), dan lembaga internasional lainnya yang bergerak di bidang pangan dan gizi. Inisiatif tersebut perlu dirancang dengan baik untuk membangun mata pencarian masyarakat yang sifatnya berkelanjutan (Ashley, 2016). Tabel 2.2 menunjukkan perbedaan lebih detail antara kerawanan pangan transien dan kronik.

Tabel 2.2 Perbedaan Jenis Kerawanan Pangan

Perbedaan	Jenis Kerawanan Pangan	
	Transien	Kronik
Durasi	Jangka pendek dan bersifat sementara.	Jangka panjang atau bersifat persisten.
Terjadi ketika	Tiba-tiba terjadi penurunan kemampuan untuk memproduksi atau mengakses makanan yang cukup dan bergizi untuk mempertahankan status gizi yang baik.	Rumah tangga dan individu tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan minimum mereka selama periode waktu yang lama dan berkelanjutan.

Perbedaan	Jenis Kerawanan Pangan	
	Transien	Kronik
Penyebab	Bencana alam jangka pendek dan fluktuasi dalam ketersediaan dan akses pangan, termasuk variasi dari tahun ke tahun dalam produksi pangan dalam negeri, harga pangan, dan perubahan pendapatan rumah tangga.	Kemiskinan yang berkepanjangan, perubahan iklim, kurangnya aset, dan akses yang tidak memadai ke sumber daya produktif atau keuangan.
Upaya penanganan	Kerawanan pangan transien relatif tidak dapat diprediksi dan dapat muncul secara tiba-tiba sehingga membuat perencanaan dan penyusunan program menjadi lebih sulit dan membutuhkan kapasitas dan jenis intervensi yang berbeda, termasuk peningkatan kapasitas peringatan dini serta penguatan program jaring pengaman sosial bagi korban bencana.	Upaya pembangunan jangka panjang untuk mengatasi kemiskinan, seperti peningkatan pendidikan atau akses ke sumber daya produktif, seperti kredit. Peningkatan akses fisik dan ekonomi masyarakat terhadap pangan secara langsung sehingga memungkinkan masyarakat dapat meningkatkan kapasitas produksi mereka.

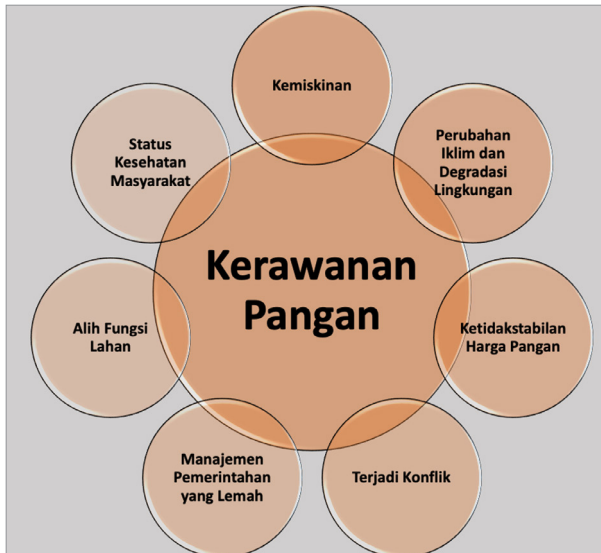
Sumber: FAO (2013)

E. Penyebab Kerawanan Pangan

Kerawanan pangan terjadi akibat berbagai faktor yang saling berhubungan satu sama lain. Gambar 2.4 pada subbab “Konsep Kerawanan Pangan” telah menunjukkan bahwa sumber daya dan lingkungan strategis dapat memengaruhi sistem ketahanan pangan. Jika sumber daya dan lingkungan tersebut mengalami perubahan, masyarakat akan berpotensi mengalami kerawanan pangan. Faktor-faktor tersebut antara lain menurunnya stok pangan dunia, ledakan populasi yang terjadi di banyak negara berkembang terutama di perkotaan, fluktuasi harga pangan dan bahan bakar, perluasan

produksi biofuel yang dulunya adalah lahan untuk tanaman pangan, dan terjadinya perubahan iklim.

Memahami faktor-faktor yang berhubungan dengan kerawanan pangan dapat membantu dalam mengidentifikasi upaya penanganan yang efektif. Secara umum, setidaknya ada tujuh faktor penyebab utama terjadinya kerawanan pangan di suatu daerah atau negara menurut Ashley (2016).



Sumber: Ashley (2016)

Gambar 2.5 Faktor-Faktor Penyebab Kerawanan Pangan

1) Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu akar masalah penyebab kerawanan pangan. Kemiskinan berhubungan dengan sulitnya akses ekonomi dan fisik untuk mendapatkan pangan yang cukup dan bergizi. Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (*Organization for Economic Cooperation and Development/OECD*) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi yang “mencakup berbagai aspek

deprivasi yang terkait dengan kemampuan manusia termasuk konsumsi dan ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, hak, suara, keamanan, martabat dan pekerjaan yang layak”.

Kemiskinan dan harga pangan yang relatif mahal terkait dengan pendapatan yang masih rendah menjadi tantangan utama dalam upaya peningkatan akses pangan (Osmani dkk., 2020). Kemiskinan bukan hanya tentang kemiskinan dari pendapatan atau konsumsi, tetapi juga dari berbagai kesempatan yang adil pada semua sektor kehidupan. Kemiskinan dapat berupa kekurangan gizi, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan buta huruf, rendahnya akses terhadap fasilitas umum termasuk layanan sosial dan fasilitas kesehatan. Jadi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi seseorang atau sekelompok orang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Murdiyana & Mulyana, 2017).

2) Perubahan Iklim dan Degradasi Lingkungan

Perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia memiliki dampak besar di seluruh dunia. Perubahan iklim merupakan perubahan kondisi fisik atmosfer bumi yang berdampak luas pada berbagai sektor kehidupan manusia terutama pada sektor pertanian (IFPRI, 2014). Iklim menjadi lebih tidak stabil dan sulit diprediksi. Perubahan iklim yang terjadi dapat berupa perubahan tren curah hujan, suhu, serta perubahan iklim yang ekstrem.

Kekeringan, banjir, penyakit, wabah penyakit, dan apa yang disebut sebagai bencana alam sebagai dampak perubahan iklim telah memengaruhi ketersediaan pangan untuk konsumsi manusia. Perubahan iklim menyebabkan perubahan pola hujan serta curah hujan sehingga berakibat terjadinya degradasi lingkungan, seperti degradasi kualitas tanah, air, serta pertumbuhan dan produksi pangan yang akan memengaruhi sistem pertanian secara luas. Hal ini akan mengakibatkan penurunan jumlah dan kualitas hasil panen dan secara tidak langsung akan memengaruhi harga pangan (Utami, 2019). Oleh

karena itu, perubahan iklim merupakan ancaman nyata bagi sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.

3) Ketidakstabilan Harga Pangan

Kenaikan harga pangan dan ketidakstabilan harga pangan secara global disebabkan oleh kekeringan, pertumbuhan populasi dunia, peningkatan permintaan, kenaikan harga bahan bakar internasional, krisis ekonomi global, dan faktor terkait perdagangan lainnya. Perubahan harga tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan pada dimensi ketahanan pangan yang lain (Hermanto, 2015).

Banyak rumah tangga di negara-negara berkembang menghabiskan lebih dari setengah penghasilan mereka untuk belanja bahan pangan. Terjadinya kenaikan harga pangan secara tiba-tiba akan berdampak pada kemampuan rumah tangga dalam membeli dan mengakses bahan pangan (Ashley, 2016). Untuk konteks Indonesia, harga beras dalam negeri relatif lebih tinggi berdasarkan standar harga internasional. Harga beras tersebut berdampak secara signifikan terhadap kemiskinan dan potensi kerawanan pangan sebab beras merupakan bagian yang substansial dari keseluruhan pengeluaran pangan di tingkat rumah tangga (Osmani dkk., 2020).

4) Konflik

Para pengambil kebijakan dan akademis telah sepakat selama bertahun-tahun bahwa terdapat hubungan erat antara kerawanan pangan dan konflik kekerasan serta hubungan erat antara ketahanan dan stabilitas pangan. Konflik di berbagai negara telah menyebabkan krisis berkepanjangan yang menyebabkan masyarakat berisiko mengalami kerawanan pangan dan kelaparan. Bahkan, konflik panjang, seperti yang terjadi di Suriah, telah merusak mata pencarian, produksi pangan, sistem pasar, dan pola konsumsi masyarakat.

Berbagai literatur telah menyelidiki dampak perang pada produksi pangan dan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara yang

menyebabkan kerawanan pangan. Konflik yang berkepanjangan, bencana alam seperti gempa bumi dan bencana nonalam seperti pandemi Covid-19, pemindahan paksa, dan diperparah oleh ketidakmampuan negara dan berbagai lembaga dunia dalam mengatasi konflik menghasilkan kondisi darurat kemanusiaan yang kompleks dan berlangsung lama. Akibatnya, masyarakat terjebak dalam konflik dan kerawanan pangan berkepanjangan (Brück dkk., 2016; Brück & d’Errico, 2019).

Data terakhir yang dirilis oleh *Food Security Information Network* (FSIN) bahkan menyebutkan konflik dan ketidakamanan kondisi suatu negara masih menjadi penyebab utama yang menyebabkan 77 juta penduduk dunia mengalami kerawanan pangan. Penyebab terbanyak kedua, yaitu cuaca ekstrem akibat perubahan iklim yang terjadi secara global. Selain itu, guncangan ekonomi di beberapa negara turut berperan dalam menyebabkan tingginya angka kerawanan pangan (Food Security Information Network, 2020).



Sumber: Food Security Information Network (2020)

Gambar 2.6 Tiga Penyebab Utama Kerawanan Pangan di Dunia

5) Manajemen Pemerintahan yang Lemah

Kebijakan dan undang-undang dalam suatu negara atau yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga internasional terkait pangan dan gizi sangat penting untuk mencapai ketahanan gizi global. Meskipun kebijakan dan undang-undang telah dirumuskan dengan sangat baik, tidak ada jaminan bahwa implementasinya dapat berjalan baik. Dibutuhkan komitmen dan kerja sama yang kuat antara lembaga pemerintah dan keterlibatan masyarakat.

Upaya mencapai status ketahanan pangan secara nasional sangat bergantung pada kebijakan yang tepat yang akan menjamin ketersediaan pangan yang cukup baik melalui produksi lokal atau melalui peningkatan volume perdagangan internasional. Merancang dan menerapkan kebijakan ketahanan pangan yang tepat tetap menjadi tantangan di negara berkembang.

Investasi pada layanan publik, seperti jalan dan drainase, pasokan air dan sanitasi, layanan kesehatan, dan perumahan yang bertujuan memudahkan akses masyarakat terhadap hak-hak dasar tersebut akan memberikan dampak positif yang sangat kuat pada ketahanan pangan dan gizi. Sebaliknya, kebijakan yang tidak linear antarinstansi justru dapat memperlambat upaya mencapai ketahanan pangan masyarakat (Ashley, 2016).

6) Alih Fungsi Lahan

Pertumbuhan jumlah penduduk yang makin pesat membuat permintaan terhadap pangan pun makin meningkat. Di satu sisi, kebutuhan dan permintaan pangan terus meningkat, namun di sisi lain terjadi perubahan pola tanam pada pertanian. Saat ini perubahan fungsi lahan pertanian yang dulunya digunakan untuk menanam tanaman pangan lokal beralih ke tanaman yang akan diproses menjadi bahan bakar sebagai energi alternatif, misalnya penggunaan kedelai atau minyak nabati serta lemak hewani yang diproses menjadi solar. Bahan pangan yang harusnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebu-

tuhan pangan penduduk dunia justru digunakan sebagai *biofuel* yang hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

Beberapa penelitian telah mengidentifikasi dampak negatif *biofuel* terhadap petani dan masyarakat miskin, baik secara langsung dalam bentuk perampasan tanah maupun secara tidak langsung melalui pemusatan sumber daya pada operasi pertanian skala besar. Belum lagi kerusakan yang diakibatkan oleh perubahan alih fungsi hutan dan lahan gambut (Mbow dkk., 2019).

7) Status Kesehatan Masyarakat

Kemiskinan, kerawanan pangan, dan status kesehatan merupakan sebuah mata rantai yang saling berhubungan dan menjadi sebab-akibat. Status kesehatan masyarakat menjadi salah satu sebab terjadinya kerawanan pangan, maksudnya adalah ketika seseorang sakit, misalnya, telah mengidap masalah gizi dan penyakit infeksi lainnya akan menghambat proses penyerapan zat gizi di dalam tubuh. Untuk itu, proses yang dibutuhkan untuk mencapai status ketahanan pangan menjadi lebih lama.

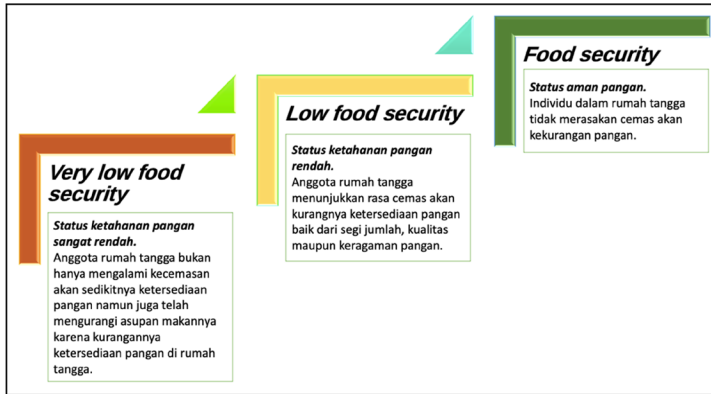
Manusia perlu mengonsumsi makanan yang beragam dalam jumlah yang sesuai untuk memuaskan rasa lapar, memenuhi kebutuhan gizi, serta mempertahankan metabolisme tubuh agar tetap berfungsi dengan baik. Ketidakseimbangan konsumsi antara kebutuhan dan asupan makanan akan berdampak pada kesehatan sehingga mengganggu produktivitas kerja (Ashley, 2016).

F. Mengukur Ketahanan Pangan

Kerawanan pangan adalah fenomena yang kompleks. Pengalaman kerawanan pangan dapat berbeda-beda pada setiap individu dalam suatu rumah tangga. Dalam menganalisis kerawanan pangan pada suatu masyarakat atau rumah tangga, tidak cukup hanya dengan mengetahui durasi kerawanan pangan yang dialami, tetapi juga perlu dianalisis seberapa besar dampak dari masalah kerawanan pangan

tersebut dan masalah gizi yang ditimbulkan secara keseluruhan. Termasuk juga mengukur aspek psikis yang ditimbulkan.

Secara umum kerawanan pangan dalam suatu rumah tangga dapat diklasifikasikan menjadi 3 tahap atau tingkatan (Gambar 2.7), yaitu:



Sumber: Diolah dari Ashley (2016)

Gambar 2.7 Tingkatan dan Ciri-Ciri Ketahanan Pangan pada Rumah Tangga

1) *Food security*

Tahap pertama, yaitu *food security* atau status aman pangan. Pada tahap ini individu maupun rumah tangga tidak merasakan cemas ataupun khawatir akan kekurangan pangan. Ketersediaan dan akses terhadap pangan relatif masih cukup, baik dari segi jumlah dan maupun kualitas untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari.

2) *Low food security*

Tahap kedua, yaitu *low food security* atau status ketahanan pangan yang rendah. Rumah tangga yang ketahanan pangannya rendah menunjukkan tanda-tanda adanya kecemasan akan kurangnya ke-

tersediaan pangan di rumah, baik dari segi jumlah, kualitas maupun keragaman pangan yang tersedia.

3) *Very low food security*

Tahap ketiga, yaitu *very low food security* atau status ketahanan pangan yang sangat rendah. Rumah tangga yang ketahanan pangannya sangat rendah bukan hanya mengalami kecemasan akan sedikitnya ketersediaan pangan, namun juga sudah mengalami perubahan pola makan atau pengurangan jumlah kalori dari kebutuhan kalori yang seharusnya karena kurangnya ketersediaan pangan di rumah tangga.

Skala ketahanan pangan tersebut merepresentasikan kondisi anggota rumah tangga secara berkelompok. Kondisi rawan pangan diyakini berdampak pada semua anggota rumah tangga meskipun dampaknya dapat berbeda-beda. Anak-anak cenderung lebih rentan terhadap situasi rawan pangan dibandingkan kelompok dewasa. Dampaknya pun lebih cepat pada anak-anak dengan terjadinya masalah kekurangan gizi.

Pengukuran dan pemantauan status ketahanan pangan sangat penting. Hal ini dapat membantu untuk mengidentifikasi dan memahami aspek dasar kesejahteraan penduduk atau wilayah dengan kondisi kerentanan masing-masing. Berbagai indikator diperlukan untuk menilai dan mengetahui status ketahanan pangan, pengalaman dan perilaku yang menunjukkan tingkat kerawanan pangan yang sedang dialami.

Hingga saat ini para pakar di bidang ketahanan pangan internasional mengakui bahwa tidak ada alat ukur tunggal yang sempurna yang mencakup semua aspek kerawanan pangan. Kerawanan pangan bukanlah kondisi homogen yang mudah diukur dari segi ekonomi, asupan kalori atau pengukuran antropometri saja (Hendriks, 2016).

Ada banyak cara pengukuran status ketahanan pangan yang dapat digunakan untuk mengukur berbagai aspek ketahanan pangan. Namun, yang biasa digunakan untuk mengukur status ketahanan pangan di tingkat rumah tangga adalah The United States Household Food

Security Survey Module (US-HFSSM) dan Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS). Kedua alat ukur ini mampu mengukur status ketahanan pangan di tingkat individu dan rumah tangga secara valid dan dengan biaya yang relatif lebih rendah. Tabel 2.3 berikut memberikan ringkasan perbedaan kedua alat ukur ketahanan pangan tersebut.

Tabel 2.3 Perbedaan antara US-HFSSM dan HFIAS

Nama Pengukuran	Kelebihan	Kelemahan
US-HFSSM	<ul style="list-style-type: none"> • Mengukur apakah rumah tangga mempunyai cukup uang atau tidak untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk makanan. • Tidak membebani responden • Mengukur tingkat kerawanan pangan. • Sejalan dengan strategi bertahan yang dilakukan. • Jangka waktu pengukuran adalah 12 bulan, namun bisa juga digunakan untuk masa 30 hari. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan di tingkat rumah tangga. Status ketahanan pangan merepresentasikan kondisi anggota rumah tangga sebagai satu kesatuan kelompok.
HFIAS	<ul style="list-style-type: none"> • Diadaptasi dari formulir US-HFSSM untuk mengestimasi prevalensi kerawanan pangan di tingkat rumah tangga. • Untuk menentukan seberapa sering kondisi rawan pangan terjadi di rumah tangga khususnya dalam hal kurangnya akses terhadap pangan. • Waktu pengukuran adalah 4 minggu atau 30 hari. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan di tingkat rumah tangga, tetapi tidak dapat membedakan tingkat pengalaman di setiap anggota rumah tangga.

1. US-Household Food Security Survey Module

The United States Household Food Security Survey Module (US-HFSSM) atau modul survei ketahanan pangan rumah tangga Amerika Serikat dapat digunakan untuk menilai kondisi ketahanan pangan rumah tangga. US-HFSSM terdiri dari 15 *item* pertanyaan dan 3 *subitem* yang menilai situasi dan frekuensi kejadian rawan pangan. Selain itu, US-HFSSM dapat menilai tingkat keparahan kerawanan pangan dalam suatu rumah tangga (Hromi-Fiedler dkk., 2009).

US-HFSSM telah diadaptasi di berbagai daerah dan negara sehingga dapat digunakan pada populasi yang beragam. US-HFSSM berfokus pada apakah rumah tangga memiliki cukup makanan atau uang untuk memenuhi kebutuhan pangan utama dan untuk mengetahui tanggapan perilaku dan tanggapan subjektif lainnya terhadap kondisi kerawanan pangan.

Namun, perlu dipastikan bahwa pertanyaan dalam formulir US-HFSSM memiliki arti yang sama untuk setiap populasi. Perbedaan budaya dan bahasa serta kondisi fisiologis tertentu, seperti kehamilan, usia, atau jenis kelamin, dapat memengaruhi pemahaman dan makna kata-kata yang dapat menimbulkan bias dalam pengukuran ini. Oleh karena itu, sebelum menggunakan formulir US-HFSSM sebaiknya dilakukan validasi untuk memastikan bahwa bahasa yang digunakan telah sesuai dengan makna yang diharapkan pada formulir pengukuran status ketahanan pangan tersebut.

Hasil pengukuran menggunakan formulir US-HFSSM menggambarkan tingkat keparahan kerawanan pangan pada suatu rumah tangga yang dikategorikan menjadi empat kategori, yaitu:

1) *Food secure* atau kondisi tahan pangan.

Kondisi tahan pangan artinya rumah tangga tidak menunjukkan tanda-tanda kekurangan pangan dan tidak mengalami kesulitan dalam mengakses pangan. Termasuk tidak mengalami rasa cemas atau khawatir akan kurangnya ketersediaan pangan di rumah tangga.

- 2) *Food insecure without hunger* atau kondisi rawan pangan tanpa kelaparan.

Rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan mulai khawatir tentang kecukupan pasokan pangan dalam jangka waktu tertentu. Pada kelompok ini tidak ditemukan adanya pengurangan asupan makanan yang dapat menyebabkan kelaparan.

- 3) *Food insecure with hunger (moderate)* atau kondisi rawan pangan dengan kelaparan (tingkat sedang).

Rumah tangga telah mengalami kerawanan pangan dan orang dewasa dalam rumah tangga tersebut telah mengurangi asupan makanannya hingga beberapa kali merasakan sensasi lapar karena tidak tersedia pangan yang cukup di rumah.

- 4) *Food insecure with hunger (severe)* atau kondisi rawan pangan dengan kelaparan (parah).

Pada tingkat ini, rumah tangga mengalami kerawanan pangan yang cukup parah yang ditunjukkan dengan pernyataan bahwa anak-anak di dalam rumah tangga tersebut sering mengalami kelaparan karena pengurangan asupan makanan sehari-hari. Sementara itu, pada rumah tangga rawan pangan yang tidak memiliki anak kecil, ditandai dengan pernyataan bahwa orang dewasa dalam rumah tangga tersebut mengalami rasa kelaparan yang lebih sering karena mengalami penurunan asupan makanan yang cukup drastis.

2. Household Food Insecurity Access Scale

Berbagai indikator ketahanan pangan dibutuhkan untuk dapat mengukur kombinasi yang dialami oleh individu dan rumah tangga terkait kerawanan pangan, mulai dari kondisi, pengalaman, hingga perilaku yang mencirikan setiap kategori tersebut (Bourdon & Dupraz, 2014). Household food insecurity access scale (HFIAS) atau skala akses kerawanan pangan rumah tangga merupakan salah satu alat ukur ketahanan pangan untuk tingkat rumah tangga atau individu.

HFIAS telah digunakan untuk mengukur kerawanan pangan dalam berbagai konteks masyarakat. Informasi yang dihasilkan oleh HFIAS dapat digunakan untuk menilai prevalensi kerawanan pangan rumah tangga terutama dalam hal akses, misalnya kondisi geografis. HFIAS mampu mengukur status ketahanan pangan dengan biaya yang relatif rendah, namun valid untuk mengukur status ketahanan pangan pada suatu rumah tangga (Coates dkk., 2007). Salah satu kekurangan HFIAS adalah tidak dapat membedakan tingkat pengalaman pada setiap anggota rumah tangga meskipun pengukuran ini dilakukan di tingkat rumah tangga. Kuesioner HFIAS tidak mampu menggambarkan kerawanan pangan yang dialami oleh anak-anak di dalam rumah tangga (Nurbaya & Najdah, 2023).

HFIAS tersusun dari kuesioner singkat yang menangkap manifestasi perilaku dan psikologis rumah tangga atau individu terhadap akses pangan yang sulit. Misalnya ketika mereka harus mengurangi jumlah makanan yang dikonsumsi, mengurangi keragaman makanan, atau mengurangi kualitas makanan karena kurangnya sumber daya.

HFIAS berfokus pada apakah rumah tangga memiliki cukup makanan atau uang untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok serta pada tanggapan perilaku dan subjektif terhadap kondisi kerawanan pangan yang dihadapinya. HFIAS juga berfungsi untuk mendeteksi perubahan dalam situasi kerawanan pangan (akses) rumah tangga dari suatu populasi dari waktu ke waktu (misalnya untuk pemantauan dan evaluasi program sosial).

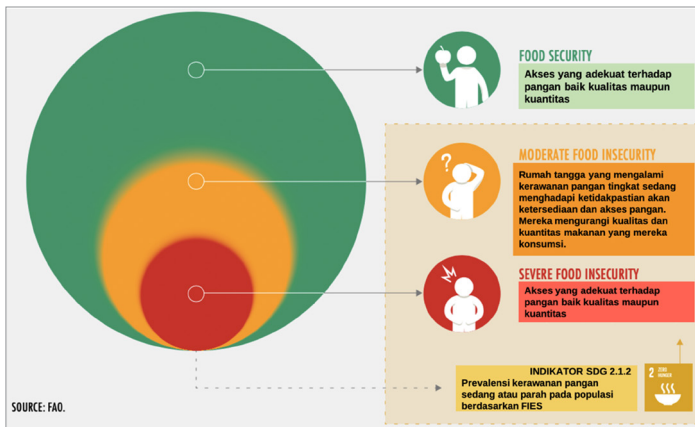
3. Food Insecurity Experience Scale

Selain US-HFSSM dan HFIAS, alat lain yang digunakan untuk mengukur ketahanan pangan rumah tangga atau individu adalah FIES. Food Insecurity Experience Scale (FIES) atau skala pengalaman kerawanan pangan adalah ukuran ketahanan pangan rumah tangga atau individu berbasis pengalaman. FIES dapat digunakan untuk mengukur periode satu bulan atau bahkan satu tahun (FAO dkk., 2019).

Secara umum FIES dapat digunakan untuk mengukur ketahanan pangan untuk tujuan sebagai berikut,

- 1) menilai prevalensi populasi rawan pangan, baik untuk pemantauan SDG maupun untuk pengukuran status ketahanan pangan nasional;
- 2) mengidentifikasi populasi yang rentan terhadap kerawanan pangan;
- 3) mengarahkan dan memantau dampak kebijakan dan program ketahanan pangan; dan
- 4) mengidentifikasi berbagai faktor risiko dan konsekuensi kerawanan pangan.

Adapun tingkat kerawanan pangan yang dapat diukur oleh FIES dapat dilihat pada Gambar 2.8 berikut ini (FAO dkk., 2019)



Sumber: FAO dkk. (2019)

Gambar 2.8 Gambaran Tingkat Kerawanan Pangan yang Diukur dengan FIES

FIES terdiri dari delapan pertanyaan mengenai akses masyarakat ke pangan yang adekuat. FIES mudah dilakukan dan dapat dengan

mudah diintegrasikan ke dalam berbagai jenis survei populasi di masyarakat. Pertanyaan FIES mengacu pada pengalaman individu atau rumah tangga responden secara keseluruhan yang difokuskan pada perilaku dan pengalaman terkait kesulitan dalam mengakses pangan karena sumber daya yang terbatas.

Manfaat dalam menggunakan FIES untuk mengukur status kerawanan pangan, sebagai berikut.

1) Manfaat pengukuran

FIES merupakan pengukuran kerawanan pangan secara langsung berdasarkan pengalaman yang dialami oleh individu dan rumah tangga.

2) Manfaat logistik (aplikasi lapangan)

FIES mudah diterapkan dengan biaya rendah dibanding survei individu atau rumah tangga lainnya. FIES juga menghasilkan data yang tepat waktu, dapat diandalkan, dan mudah diterapkan untuk mengetahui akses pangan di tingkat individu atau rumah tangga.

3) Manfaat analitis (pengembangan dan evaluasi kebijakan)

Ketika dimasukkan dalam survei populasi besar, FIES memberikan informasi yang dapat ditindaklanjuti untuk mengidentifikasi kelompok rentan yang akan dijadikan target intervensi. Jika digunakan pada tingkat individu, FIES mampu menganalisis tingkat kerawanan pangan berdasarkan gender. FIES juga mampu meningkatkan pemahaman tentang hubungan ketahanan pangan pada lintas sektor serta pemantauan dan evaluasi dampak kebijakan pada program ketahanan pangan.

4) Kontribusi untuk pengembangan pengetahuan (pengembangan teori)

FIES memperdalam pemahaman tentang determinan dan konsekuensi dari kerawanan pangan individu atau rumah tangga ketika digunakan dengan indikator lain.

G. Dampak Kerawanan Pangan

Kerawanan pangan adalah masalah dengan berbagai bentuk manifestasi. Kerawanan pangan dialami secara berbeda di tingkat rumah tangga dan di tingkat individu. Begitu pula pengalaman kerawanan pangan pada anak-anak dan orang dewasa pun berbeda-beda meskipun mereka tinggal di dalam satu rumah. Anak-anak yang mengalami kerawanan pangan menunjukkan tanda-tanda fisik, emosional, dan kognitif.

Tanda-tanda fisik, seperti anak merasa tidak nyaman, sering menangis karena merasa lapar, dan mudah lelah. Tanda-tanda emosional sering diperlihatkan melalui rasa khawatir, kesedihan, dan rasa marah. Sementara itu, tanda kognitif ditampilkan seperti muncul kesadaran dan pengetahuan pada anak tentang makanan yang hampir habis kemudian muncul kewaspadaan akan tidak adanya makanan (Kendall dkk., 1995). Penelitian yang dilakukan oleh Nurbaya dan Najdah (2023) menunjukkan bahwa remaja yang mengalami kerawanan pangan mengalami stres dan khawatir karena tidak ada makanan sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Dampak buruk kerawanan pangan pada anak-anak sudah dimulai sejak dalam kandungan hingga anak menjadi dewasa. Anak-anak merupakan kelompok yang lebih rentan mengalami kerawanan pangan dibanding orang dewasa meskipun tinggal dalam satu rumah (Fram dkk., 2015). Bahkan banyak penelitian yang menyebutkan bahwa anak-anak jauh lebih rentan dan lebih sering mengalami kerawanan pangan dibanding orang tua. Oleh karena itu, kerawanan pangan dan gizi (*food and nutrition insecurity*) menjadi dua istilah yang saling terkait satu sama lain.

Setidaknya ada empat komponen dari fenomena kerawanan pangan baik pada tingkat dewasa maupun anak-anak. Komponen ini dapat dilihat dari empat hal, yaitu kuantitatif, kualitatif, psikologis, dan sosial seperti yang dijelaskan pada Tabel 2.4 (Kendall dkk., 1995).

Tabel 2.4 Komponen Kerawanan Pangan di Tingkat Rumah Tangga/Individu

Komponen	Level/Tingkat	
	Rumah Tangga	Individu
Kuantitatif	Mengalami kekurangan bahan pangan	Asupan kalori yang rendah tidak memenuhi kebutuhan gizi.
Kualitatif	Pangan tidak sesuai selera.	Kandungan gizi tidak seimbang.
Psikologis	Munculnya rasa cemas akan kekurangan bahan pangan	Tidak banyak pilihan makanan dan mulai merasa kekurangan makanan.
Sosial	Mengganti bahan pangan dengan bahan pangan yang tidak biasa diterima secara sosial	Perubahan pola makan

Sumber: Kendall *et al.* (1995)

Pada komponen kuantitatif, misalnya ketika rumah tangga mengalami kerawanan pangan, mereka akan mengalami kekurangan bahan pangan yang ditandai dengan rendahnya asupan kalori pada tingkat individu. Begitu pula pada komponen kualitatif, rumah tangga mulai mengganti pangan yang biasa mereka konsumsi sehari-hari dengan bahan pangan lain yang mungkin kualitasnya lebih rendah, jenisnya lebih sedikit, dan tidak sesuai dengan selera dan pola konsumsi mereka selama ini yang ditandai dengan asupan gizi yang tidak seimbang.

Kerawanan pangan bukan hanya ditinjau dari aspek kuantitatif dan kualitatif saja. Namun, juga ditinjau dari sisi psikologis, yaitu ketika anggota rumah tangga mulai merasa cemas dan khawatir akan kekurangan bahan pangan. Individu di dalam rumah tangga tersebut sudah merasa cemas tidak mempunyai banyak pilihan makanan karena berkurangnya ketersediaan pangan. Akhirnya, individu dalam rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan kemungkinan besar mengonsumsi makanan yang kurang bervariasi dan bahkan mengganti makanannya menjadi makanan yang tidak dapat diterima

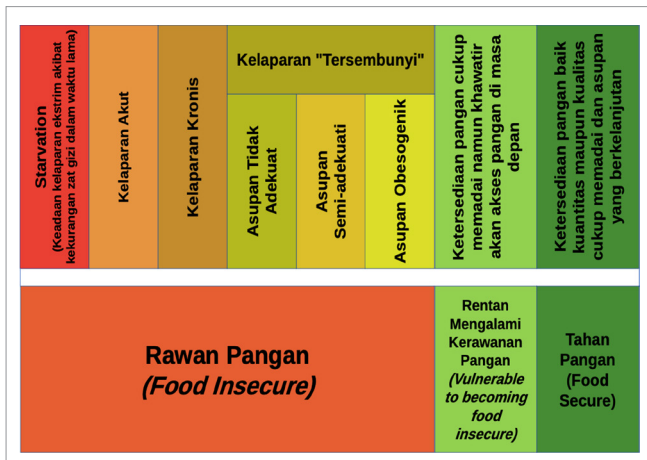
secara sosial yang dapat berdampak negatif terhadap pola makan dan status gizi individu secara keseluruhan.

H. Kerawanan Pangan sebagai Sebuah Kontinum

Perubahan status ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga dan nasional dapat bersifat sementara, jangka menengah, jangka panjang, dan dapat berupa sebuah siklus. Perubahan tersebut disebabkan oleh perubahan mendadak dalam kemampuan ekonomi atau kemampuan dalam mengakses makanan yang cukup baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk memenuhi kebutuhan tubuh.

Perubahan status ketahanan pangan dan dampak yang ditimbulkannya di tingkat rumah tangga atau individu bersifat kontinum yang terkadang sangat tahan pangan dan sangat rentan terhadap kerawanan pangan. Inilah yang disebut ketahanan pangan sebagai sebuah kontinum (Hendriks, 2016).

Gambar 2.9 memperlihatkan kontinum ketahanan pangan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa status ketahanan pangan individu atau rumah tangga tidak statis atau tidak tetap. Perubahan



Sumber: Hendriks (2016)

Gambar 2.9 Kontinum Ketahanan Pangan

status ketahanan pangan dapat berubah seiring waktu dan dapat pula bersifat sementara, musiman, jangka menengah, atau jangka panjang. Perubahan status tersebut dapat disebabkan oleh perubahan mendadak, misalnya kehilangan pekerjaan dan mata pencarian, terjadi kelangkaan pangan, harga pangan yang meningkat, dan yang dapat menghambat akses terhadap pangan.

Setiap perubahan status ketahanan pangan akan memberikan dampak yang berbeda. Ketika terjadi perubahan yang berpotensi menyebabkan kerawanan pangan, rumah tangga atau individu akan berusaha mengantisipasi kemungkinan tersebut dan mengambil tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko kekurangan pangan. Berbagai upaya atau kegiatan untuk mengatasi dan mengurangi potensi kerawanan pangan disebut sebagai strategi bertahan atau *coping strategy*.

I. Konsep Strategi Bertahan (*Coping Strategy*) di Masa Rawan Pangan

Pengalaman dalam melalui situasi kerawanan pangan dapat dimodifikasi di tingkat rumah tangga dan individu. Berbagai pengalaman dan upaya tersebut disebut sebagai strategi bertahan (*coping strategy*).

Istilah *coping* mengacu pada respons kognitif dan perilaku seseorang terhadap situasi stres. *Coping* sering digunakan untuk menunjukkan bahwa individu sedang berusaha mengatasi atau mengendalikan stres atau hal-hal yang menyebabkan stres. Namun, para ahli psikologi kesehatan yang fokus mempelajari stres dan *coping* mendefinisikan istilah *coping* secara luas sebagai semua pikiran dan perilaku yang terjadi sebagai respons terhadap pengalaman stres, apakah orang tersebut menanggapi situasi dengan baik atau buruk (Friedman, 2016).

Banyak fungsi psikologis, seperti emosi, motivasi, perhatian, kemauan, kognisi, dan komunikasi yang diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan fungsi psikologis tersebut berkontribusi dalam mengatasi stres. Banyak aspek sosial dan sistem budaya yang juga berkontribusi untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya,

hubungan keterikatan kekeluargaan dapat memberikan dukungan dan perlindungan yang aman selama masa-masa sulit. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa *coping* adalah suatu upaya untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi yang melibatkan tindakan, pikiran, dan fungsi-fungsi psikologis (Ghattas, 2014). Sementara itu, *coping strategy* atau strategi bertahan dalam konteks kerawanan pangan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang mengalami kerawanan pangan untuk dapat mengakses cukup pangan dan mengatasi situasi rawan pangan yang sedang dihadapinya (Balta dkk., 2015; Maxwell & Caldwell, 2008).

Perbedaan tingkat kerawanan pangan yang dialami oleh rumah tangga akan menerapkan jenis strategi bertahan yang berbeda pula. Upaya untuk mengeksplorasi strategi bertahan dalam suatu masyarakat akan berguna untuk memahami respons perilaku individu atau rumah tangga ketika mereka tidak dapat mengakses makanan yang cukup (Leroy dkk., 2015).

Pada umumnya, strategi bertahan dilakukan berbeda-beda pada setiap individu. Perbedaan pengalaman rawan pangan mengakibatkan perbedaan strategi bertahan yang dilakukan. Maxwell dan Caldwell (2008) mengklasifikasikan strategi bertahan ke dalam empat kategori dasar yang dapat dilihat pada Tabel 2.5

Tabel 2.5 Empat Kategori Dasar Strategi Bertahan saat Rawan Pangan

Kategori	Bentuk Strategi Bertahan
Perubahan pola makan	<ul style="list-style-type: none"> • Mulai memilih dan mengonsumsi makanan yang kurang disukai dan harga lebih murah.
Upaya jangka pendek untuk meningkatkan ketersediaan pangan rumah tangga.	<ul style="list-style-type: none"> • Meminjam bahan pangan dari teman atau kerabat • Membeli bahan pangan dengan cara berutang atau kredit • Mengumpulkan pangan liar melalui berburu atau memanen sebelum waktunya • Konsumsi stok benih yang disimpan untuk musim tanam berikutnya

Kategori	Bentuk Strategi Bertahan
Mengurangi jumlah orang	<ul style="list-style-type: none"> • Mengirim atau membiarkan anak-anak di rumah tetangga • Mengirim atau membiarkan anggota rumah tangga untuk pergi mengemis
Menjajah	<ul style="list-style-type: none"> • Membatasi porsi pada saat makan • Membatasi konsumsi orang dewasa agar anak kecil dapat makan • Memprioritaskan memberi makan anggota rumah tangga yang bekerja dan mengesampingkan anggota yang tidak bekerja • Mengurangi frekuensi makan dalam sehari • Melalui hari tanpa makan sama sekali

Sumber: Maxwell dan Caldwell (2008)

Coping strategies index (CSI) merupakan indikator ketahanan pangan rumah tangga yang relatif sederhana dan dapat digunakan dengan mudah, langsung dipahami, dan berkorelasi positif dengan status ketahanan pangan yang lebih kompleks. CSI ini terkadang digunakan sebagai indikator proksi untuk akses pangan (Umar & Musa, 2015). CSI merupakan indikator kerawanan pangan yang menilai frekuensi terjadinya strategi bertahan yang makin parah, yaitu perilaku yang dilakukan oleh individu atau rumah tangga ketika mereka tidak dapat mengakses makanan yang cukup.

CSI juga dapat digunakan untuk mengukur dampak program bantuan pangan sebagai indikator peringatan dini dari krisis pangan yang akan datang dan sebagai alat untuk menilai kebutuhan bantuan pangan serta apakah bantuan pangan tersebut telah ditargetkan untuk sebagian besar rumah tangga yang rawan pangan. CSI adalah alat yang tepat untuk mengukur status ketahanan pangan pada situasi darurat karena penggunaannya cukup mudah, cepat, dan murah. Terakhir, jika strategi penanggulangan dilacak dalam jangka panjang, CSI berguna untuk memantau tren jangka panjang pada kerawanan pangan dalam suatu negara (Maxwell dkk., 2003).

Menggabungkan pengukuran status ketahanan pangan dan CSI dapat memudahkan mengidentifikasi strategi ketahanan pangan transien. Sebuah studi di Indonesia menunjukkan bahwa status ketahanan pangan rumah tangga konsisten dengan semua strategi bertahan yang dilakukan oleh individu atau rumah tangga, kecuali untuk meminjam uang di perdesaan. Seiring dengan makin parahny status kerawanan pangan seseorang atau rumah tangga, makin tinggi pula persentase strategi bertahan yang dilakukan (Usfar dkk., 2007).

Pada kesempatan lain, Usfar dkk. (2007) juga melakukan penelitian di enam provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jakarta, Banten, dan Sulawesi Tengah. Penelitian tersebut menemukan bahwa terdapat lima strategi bertahan yang umum dilakukan oleh masyarakat di wilayah tersebut.

Tabel 2.6 Strategi Bertahan yang Umum Dilakukan di Indonesia

No	Jenis Strategi Bertahan yang dilakukan
1	Menambah pendapatan (misalnya mencari pekerjaan tambahan)
2	Melakukan perubahan pola makan (misalnya dengan memasak makanan apa pun yang tersedia, membeli makanan yang lebih murah atau berkualitas rendah, mengonsumsi makanan dengan nilai gizi lebih rendah, mengonsumsi biji-bijian, mengurangi pengeluaran makanan, mencari pangan liar, mengurangi frekuensi makan, mengurangi ukuran porsi dan mengolah makanan sendiri)
3	Berusaha secepatnya mengakses makanan (misalnya dengan meminjam makanan dari tetangga, keluarga, atau menerima bantuan makanan dari pemerintah)
4	Berusaha secepatnya mengakses uang tunai (misalnya meminjam uang dari tetangga atau keluarga, menjual aset, seperti menjual barang berharga, menjual hewan ternak, produksi pertanian/hutan, menjual perhiasan dan menarik uang dari tabungan)
5	Langkah drastis (misalnya ke luar pulau dan melakukan migrasi ke daerah lain dalam negeri, mempekerjakan anak atau bekerja ke luar negeri)

Sumber: Usfar dkk. (2007)

Tidak ada standar tertentu dalam melakukan strategi bertahan, namun biasanya dipengaruhi oleh faktor sosial budaya. Beberapa budaya percaya pada tabu makanan sehingga meskipun mereka sangat rentan mengalami kerawanan pangan, mereka tidak akan mengonsumsinya. Masyarakat melakukan strategi bertahan sesuai dengan pengalaman mereka di masa lalu (FAO, 2010).

Berbagai jenis strategi bertahan digunakan sebagai penanda untuk menilai tingkat keparahan kondisi kerawanan pangan individu maupun rumah tangga. Penelitian tentang tingkat kerawanan pangan remaja putri yang dilakukan di Nusa Tenggara Timur menemukan bahwa masalah atau tingkat kerawanan pangan yang dihadapi oleh remaja putri berbeda-beda sehingga strategi bertahan yang mereka lakukan pun berbeda, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.7 (Fatmaningrum dkk., 2016).

Tabel 2.7 Strategi Bertahan Remaja Putri di Tingkat Individu Maupun Rumah Tangga

Tingkat	Kondisi Kerawanan Pangan	Bentuk Strategi Bertahan
Strategi bertahan inisiatif remaja (tingkat individu)	Jagung tersedia dan beras tidak tersedia	Makan makanan yang kurang diinginkan
	Jagung tersedia dan beras tidak tersedia	Menyimpan uang saku
	makanan terbatas tapi masih tersedia	Mengurangi porsi makan
	Nasi tersedia namun sayur/ lauk tidak tersedia	Makan nasi saja tanpa sayur atau lauk
	Makanan terbatas dan para remaja putri khawatir jika mereka tidak mampu membeli makanan	Menghasilkan uang untuk membeli makanan
	Makanan sudah habis	Melewatkan satu atau dua kali makan

Tingkat	Kondisi Kerawanan Pangan	Bentuk Strategi Bertahan
Strategi bertahan yang diinisiasi oleh orang tua (tingkat rumah tangga)	Makanan pokok (jagung) masih tersedia	Penyimpanan jagung selama 6 bulan sampai 1 tahun
	Makanan terbatas	Menjual hasil ladang dan ternak mereka sendiri
	Makanan tidak tersedia	Meminta makanan
	Makanan tidak tersedia	Meminjam makanan

Sumber: Fatmaningrum dkk. (2016)

Penelitian Fatmaningrum dkk. (2016) menyebutkan dua jenis strategi bertahan yang dilakukan oleh remaja putri. Jenis strategi bertahan yang pertama adalah strategi yang diinisiasi oleh diri sendiri ketika menghadapi kerawanan pangan di tingkat rumah tangga. Mereka berinisiatif untuk menyimpan uang saku, makan nasi saja, atau melewatkan makan satu atau dua kali dalam sehari. Ini adalah mekanisme bertahan di tingkat individu.

Jenis strategi bertahan yang kedua di tingkat rumah tangga, yaitu strategi bertahan yang diinisiasi oleh orang tua yang kemudian diikuti oleh anaknya. Orang tua akan menyimpan jagung sebagai makanan cadangan selama 6 bulan hingga 1 tahun untuk menjaga ketersediaan jagung sebagai makanan pokok dalam rumah tangga (Fatmaningrum dkk., 2016).

Sementara itu, penelitian lain oleh Nurbaya dan Najdah (2023) pada sejumlah remaja di Mamuju menunjukkan bahwa remaja lebih rentan mengalami kerawanan pangan di tingkat rumah tangga, bahkan cenderung mengalami stres dan bingung harus melakukan apa untuk mengatasi masalah kerawanan pangan di rumah mereka selama masa sulit tersebut. Mereka melakukan beberapa strategi bertahan dalam mengatasi masalah kerawanan pangan ini antara lain dengan berjualan atau membantu orang tua berjualan di warung.



Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB 3

Mengenal Masyarakat Adat Kaluppini

Masyarakat adat adalah pemilik bahasa, sistem pengetahuan dan kepercayaan yang unik, serta memiliki pengetahuan yang sangat berharga mengenai praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Masyarakat adat mempunyai budaya dan kearifan lokalnya masing-masing. Budaya dan tradisi memiliki peran penting pada masyarakat adat untuk menentukan sistem produksi pangan, peran dan tanggung jawab mereka terkait dengan persiapan makanan, serta metode distribusi makanan hingga ke tingkat rumah tangga. Semua ini berdampak signifikan terhadap status kedaulatan pangan, ketahanan pangan, dan gizi di tingkat rumah tangga pada masyarakat adat (Nurbaya, 2017). Lalu siapa yang disebut sebagai masyarakat adat?

A. Definisi Masyarakat Adat

Di beberapa negara, banyak preferensi atau istilah yang digunakan untuk merujuk pada masyarakat adat, seperti *tribes*, *first peoples* atau *first nations*, *aboriginal peoples* di Kanada, Janajati di Nepal, orang

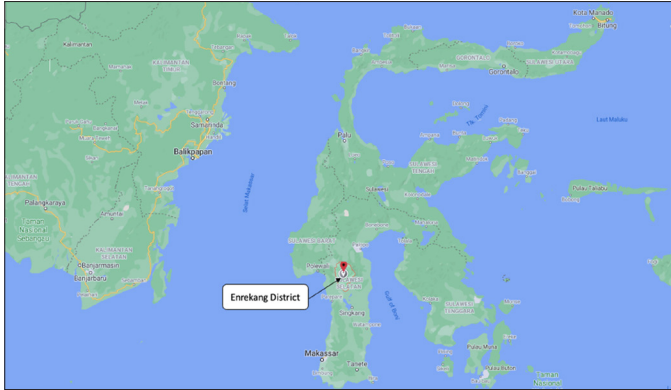
asli di Malaysia, atau *ethnic groups* (kelompok etnis) (UNPFII, 2006). Di Indonesia, selama tahun 1967–1998, berbagai istilah digunakan untuk menyebut masyarakat adat, seperti masyarakat terasing (*isolated tribes*), masyarakat terbelakang (*backward people*), masyarakat terpencil (*remote community*), atau komunitas adat, sebagaimana yang digunakan oleh Kementerian Sosial. Penggunaan istilah masyarakat terpencil ini biasanya berkonotasi negatif karena menekankan keterbelakangan masyarakat adat. Hal ini menimbulkan kesan diskriminasi, marginalisasi, dan pengucilan terhadap masyarakat adat.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendorong untuk menggunakan istilah *masyarakat adat* karena dapat memperkuat hak-hak masyarakat hukum adat secara holistik. Istilah ini telah digunakan dalam Undang-Undang Nomor 27/2007 pasal 1 ayat 33. Istilah masyarakat adat lebih diterima dan digunakan secara konsisten oleh masyarakat adat di Indonesia serta beberapa pejabat pemerintah, LSM, dan akademisi (ADB, 2002).

B. Letak Geografis dan Sejarah Masyarakat Adat Kaluppini

Masyarakat adat Kaluppini merupakan salah satu masyarakat adat di Sulawesi Selatan yang masih sangat kuat mempertahankan tradisi dan hukum adat yang mereka anut dalam kehidupan keseharian mereka. Mereka tinggal di daerah pegunungan, tepatnya di sekitar Gunung Latimojong yang menjadi wilayah adat mereka di Kabupaten Enrekang (Gambar 3.1). Sebanyak 85% daerah Kabupaten Enrekang adalah kawasan pegunungan sehingga masyarakat lokal menyebutnya *massenrempulu* yang berarti menyusuri gunung.

Jarak dari Kota Enrekang ke Desa Kaluppini relatif dekat, hanya sekitar 10–15 kilometer. Namun, jarak tersebut terasa sangat jauh karena medan yang harus ditempuh menyusuri jalan sempit, mendaki tanjakan yang terjal, lalu menuruni jalan licin yang tak kalah curamnya.



Sumber: Google Earth (2020)

Gambar 3.1 Letak Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan

Masyarakat Kaluppini tinggal di wilayah adat yang disebut sebagai *tanah onko sa'pulo tallu* 'tiga belas tanah onko'. Tanah onko tersebut dimiliki dan dikelola oleh adat. Pusat ritual berada di Desa Kaluppini, desa yang disebut sebagai *tanah pamula* dan menjadi pusat dilaksanakannya segala ritual, terutama ritual-ritual besar. Di desa inilah terdapat salah satu hutan adat yang di dalamnya terdapat situs sejarah yang telah berumur ratusan tahun. Situs ini berupa peti kayu tua yang telah berlumut yang disebut sebagai *duni* atau *erung*. Masyarakat adat Kaluppini meyakini di dalam *erung* tersebut terdapat tulang tengkorak kepala salah seorang leluhur mereka (Chandra, 2019).

Hutan *Liang* merupakan salah satu hutan adat yang terletak di wilayah adat Kaluppini yang tidak terlalu lebat dan banyak ditumbuhi pohon bambu. Bagi masyarakat Kaluppini, hutan mempunyai makna tersendiri. Mereka memaknai dan memperlakukan hutan sebagai ruang suci, di mana beragam ritual adat dilakukan tiap tahunnya. Hutan menjadi pusat ritual sehingga masyarakat Kaluppini menjaganya dengan baik.

Mereka dapat mengambil kayu dan hasil hutan lainnya setelah mendapat izin dari pemangku adat. Namun, ada aturan tertentu dalam pengelolaan kawasan hutan adat tersebut. Misalnya, untuk menebang pohon hanya diperkenankan satu pohon saja. Aturan lain seperti pengambilan madu atau pemasangan jerat untuk hewan, seperti ayam hutan, harus seizin adat setempat. Pengambilan sesuatu dalam hutan juga memiliki aturan tersendiri, harus ada pembagian yang adil kepada pihak-pihak tertentu. Berbagai aturan tersebut sebagian besar hanya berupa aturan lisan. Meskipun ada *lontara* yang membahas aturan tertentu, *lontara-lontara* tersebut jarang digunakan dan hanya bisa diakses oleh orang tertentu di kelembagaan adat.

Secara topografi, wilayah masyarakat adat Kaluppini dikelilingi oleh pegunungan dan bukit, berada pada ketinggian 500–1.070 mdpl. Meskipun demikian, wilayah adat Kaluppini tidak semuanya berupa hutan, tetapi juga berupa lahan pertanian yang menjadi sumber ekonomi dan pangan mereka. Mereka sangat bergantung pada hasil pertanian, perkebunan, dan hasil hutan. Mereka juga beternak sapi dan kambing. Wilayah hutan adat Kaluppini yang terletak di ketinggian 800 m dpl membuat kawasan ini menjadi sumber air bagi daerah lain di sekitarnya. Hutan bukan hanya menjadi pusat kegiatan ritual, melainkan juga sumber kehidupan masyarakat.

Kaluppini memiliki kearifan lokal terkait hubungan manusia dengan alam. Pemahaman yang lebih luas tentang masyarakat adat, makanan tradisional, dan sistem mata pencarian membawa pemahaman yang lebih besar tentang kebutuhan individu dan perhatian khusus pada masyarakat adat. Pada saat yang sama, keterlibatan aktif masyarakat adat sendiri dalam menghasilkan pengetahuan lokal dapat menimbulkan rasa memiliki pada wilayah adat mereka.

Sejarah berdirinya Kaluppini tidak tertulis dan hanya diwariskan berdasarkan budaya tutur dari generasi ke generasi. Dikisahkan oleh para pemangku adat bahwa pada suatu masa berdiri kerajaan di Kaluppini yang hidup berdampingan dengan adat. Pada masa itu, tidak selamanya kedua kelembagaan ini akur. Pihak kerajaan

terkadang hanya mementingkan keluarganya saja sehingga kemudian menimbulkan penentangan masyarakat yang diwakili oleh kelembagaan adat. Perilaku pihak kerajaan dianggap mengganggu kelangsungan adat sehingga terjadilah pemberontakan yang berakhir dengan diusirnya pihak kerajaan ke Enrekang.

Setelah kerajaan terusir maka pemerintahan di Kaluppini berada di tangan kelembagaan adat yang selama ini dianggap sebagai kelas *ata'* atau budak. Tersingkirnya kerajaan dari Kaluppini ditandai oleh sebuah perjanjian yang dalam bahasa Kaluppini disebut *bolelenia siruntu*, *bolelenia sipakaraya*. Artinya, antara adat di Kaluppini dan kerajaan di Enrekang kalau rumah dia bertemu, di rumah mereka saling hormat. *Canukkung pada kandi, keddengkii pada kandi* atau berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. *Na padang I nene siruntu, na padang si nene si pakarai*. Maksudnya, ketika di luar bertemu maka harus saling menyapa, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah.

Ketika kerajaan berpindah maka ada lima hal yang ikut serta padanya, yaitu darah biru (kebangsawanan), proses penjualan nasi, retribusi, judi, dan *lontara* (tulisan). Kebangsawanan dianggap merusak tatanan masyarakat karena adanya kasta-kasta. Kasta yang lebih tinggi kadang menindas yang lebih rendah. Oleh karena itu, masyarakat adat Kaluppini memegang prinsip *canukkung pada kandi, keddengkii pada kandi*.

Hal penting lainnya adalah tentang menjual nasi yang dianggap menghilangkan solidaritas sosial warga karena bersifat transaksional. Prinsip inilah yang membuat masyarakat adat Kaluppini tidak ada yang menjual nasi di wilayah mereka. Kita tidak akan menemukan warung yang menjual nasi di wilayah Kaluppini. Mereka membagikan nasi pada setiap acara ritual, baik yang dilakukan di rumah maupun yang dirayakan oleh masyarakat Kaluppini secara terbuka.

Hal lain yang menjadi pantangan bagi masyarakat ini adalah judi. Judi sabung ayam dianggap mengacaukan masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai adat dan juga nilai keagamaan. Retribusi di pasar dihapus karena menjadi beban bagi masyarakat.

Sementara itu, *lontara* (tulisan) turut dibawa agar para bangsawan tersebut tidak melupakan asal-usul mereka dan tetap menghargai masyarakat Kaluppini.

C. Struktur Adat, Ritual, dan *Peppasang* Kaluppini

Islam dan adat adalah hal yang tak terpisahkan bagi masyarakat Kaluppini. Seluruh ritual ataupun laku kehidupan tak terlepas dari dua entitas ini. Secara struktural, kelembagaan adat di Kaluppini dibagi atas dua bagian dan berpasang-pasangan, yakni *Parewa Ada'* (Pemangku adat) dan *Parewa Syara* (Pemangku syariat dan agama). Pemangku tertinggi pada *Pawera Ada'* adalah *Tomakaka* dan *Ada'*, sementara pemangku tertinggi pada *Pawera Sara'* adalah *Khali* dan *Imam*.

Dalam struktur adat Kaluppini, pucuk pimpinan tertinggi dipegang oleh keempat pemangku adat tersebut yang biasa disebut *Tau Appa'*. Mereka terdiri dari dua pasang pemangku, sepasang untuk adat dan sepasang untuk agama. Baik *Parewa Ada'* maupun *Parewa Syara* hidup secara harmonis dan tidak ada benturan antara adat dan agama. Keempat pemangku ini memiliki kedudukan yang sejajar dengan fungsi dan tugas masing-masing. Kesadaran akan rasa memiliki, kecintaan, kepedulian, dan kebersamaan untuk mempertahankan tradisi di Kaluppini merupakan perwujudan dari kegiatan ritual adat dan agama.

Meskipun masyarakat adat Kaluppini telah berinteraksi lama dengan masyarakat umum dan telah bersentuhan dengan teknologi, mereka masih berpegang pada kepercayaan dan hukum adat yang mereka yakini. Keunikan dalam sistem nilai yang mereka pegang tecermin dalam nilai-nilai, tradisi, hukum adat, makanan yang mereka makan, upacara adat, dan tingginya rasa keterikatan dengan tanah adat.

Banyak upacara adat yang dilaksanakan dalam setahun sebagai bentuk tradisi dan upaya untuk melestarikan warisan leluhur

mereka. Ada banyak ritual adat yang dilaksanakan sepanjang tahun. Secara garis besar ritual tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu ritual *rombu solo* dan *rombu tuka*. *Rombu solo* adalah ritual yang berhubungan dengan kematian. Sebaliknya, *Rombu tuka* adalah segala ritual yang berhubungan dengan kehidupan, misalnya kelahiran dan pernikahan (Nurbaya & Chandra, 2020). Hal ini dikonfirmasi oleh salah seorang kepala desa.

"... Masyarakat adat Kaluppini satu-satunya masyarakat adat di Enrekang yang banyak melakukan ritual dalam setahun." (AH, 50 tahun)

Kaluppini memiliki kearifan lokal yang berkaitan dengan hubungan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Hal ini tecermin dari pelaksanaan ritual adat yang terus dilakukan sepanjang tahun. Puncak ritual sekaligus upacara adat paling sakral adalah upacara *Pangewaran*, sebuah ritual yang dilakukan setiap delapan tahun sebagai wujud syukur atas hasil panen dan limpahan keberkahan dari Sang Pencipta (Nurbaya dkk., 2020).

Proses pelaksanaan upacara *Pangewaran* berlangsung selama tujuh hari tujuh malam. Meskipun dilaksanakan sekali dalam delapan tahun, masyarakat Kaluppini sangat antusias dalam menyambut tradisi tersebut dan masih melestarikannya sampai sekarang. Dalam menjaga kelestarian budayanya, masyarakat terlibat dan terjun langsung pada kegiatan adat atau tradisi. Semua ritual tersebut sebagian besar dilakukan di sekitar hutan adat sebagai sumber penghidupan mereka. Bagi mereka, kehidupan mengikuti siklus alam, yang saling menguntungkan bagi semua elemen, manusia, kehidupan dan kematian.

Pada proses pelaksanaan upacara adat *Pangewaran*, masyarakat yang menghadiri ritual tersebut tidak diperbolehkan memakai pakai-an berwarna kuning. Bagi masyarakat Kaluppini, warna kuning merupakan warna kebesaran *Tomanurung* dan hanya boleh digunakan oleh *Tomanurung*. Kepercayaan akan leluhur juga sangat kuat, termasuk masih diyakininya keberadaan *Tomanurung* sebagai orang suci

yang diturunkan dari langit. Sebuah peti tua yang disimpan di dalam sebuah gua di tengah hutan yang disebut *duni* adalah salah satu situs penting yang sangat dikeramatkan di Kaluppini. *Duni* berisi rangka atau tulang leluhur keturunan pertama dari *Tomanurung*. Orang-orang biasanya datang ke tempat tersebut untuk berdoa memohon berkah dan keselamatan (Chandra, 2019).



Gambar 3.2 Penyelenggaraan *Damulu* di dalam Masjid Tua Kaluppini

Beragam tradisi yang berkembang di Kaluppini sangat kental dengan nilai dan simbol Islam. Hal ini terwujud dalam salah satu ritual besar yang dilakukan setiap tahun, yaitu *Damulu*. Ritual ini merupakan peringatan maulid Nabi Muhammad Saw. Puncak ritualnya disebut *Damulu Banua* yang perayaannya dipusatkan di masjid tertua yang ada di wilayah adat tersebut (Gambar 3.2). Bahkan, masjid tua tersebut konon merupakan masjid tertua yang ada di Kabupaten Enrekang. Berbeda dengan daerah lain, perayaan maulid di Kaluppini dirayakan selama tiga bulan di seluruh wilayah adat. Pada

peringatan hari-hari besar Islam dan ritual-ritual adat yang penting inilah nilai-nilai Islam yang berpadu dengan nilai-nilai adat Kaluppini diekspresikan sebagai manifestasi keyakinan religius orang Kaluppini.

Penyelenggaraan maulid secara besar-besaran merupakan salah satu tradisi yang masih bertahan di Kaluppini. Ritual menjadi wadah bagi masyarakat Kaluppini untuk berkumpul dan bersinergi. Masyarakat Kaluppini akan datang dari berbagai penjuru kampung dan membawa beragam bahan makanan dari rumah mereka. Mereka membawa belasan ekor ayam, *songkolo* (nasi dari beras ketan), nasi putih, dan pisang bertandan-tandan (Gambar 3.3). Ritual *Damulu Banua* juga menjadi ajang bagi masyarakat Kaluppini yang telah merantau lama ke luar daerah Kaluppini untuk kembali merayakan maulid bersama keluarga.

Pada ritual *Damulu Banua*, masyarakat Kaluppini akan berbondong-bondong datang ke pusat perayaan. Mereka akan membawa ayam yang akan disumbangkan untuk ritual tersebut. Jumlah ayam yang dipotong dapat mencapai ratusan. Ada juga masyarakat yang menyumbang sapi untuk disembelih dan menjadi tahapan penting pelaksanaan *Damulu Banua*. Ayam dan sapi yang disumbangkan tersebut terlebih dahulu dipegang oleh pemangku adat dan pemangku syariat untuk didoakan. Ritual ini sebagai doa untuk mendapatkan berkah berupa perkembangbiakan hewan ternak dan kesuburan tanah.

Hewan-hewan ternak yang telah disumbangkan langsung dipotong oleh salah seorang pemangku adat. Ayam-ayam yang telah dipotong segera dibersihkan, direndam di air panas sebelum dicabuti bulu-bulunya. Setelah bersih, ayam itu dibakar hingga hangat dan benar-benar bersih. Puluhan lelaki kemudian memotong ayam-ayam itu dalam potongan kecil, lalu dikumpulkan, dan akhirnya dimasak menggunakan bumbu sederhana dengan hanya menambahkan garam dan serai.



Gambar 3.3 Suasana ketika Masyarakat Adat Kaluppini Melaksanakan Ritual Adat

Setiap kali pelaksanaan ritual, para perempuan akan membawa beras atau ayam dari rumah sebagai bahan utama makanan yang akan dikonsumsi pada upacara adat. Mereka juga membawa pisau, panci, dan peralatan dapur lainnya untuk memasak bersama dengan cara tradisional. Kaum laki-laki bertugas membawa kayu bakar yang akan digunakan untuk memasak. Beberapa dari mereka membawa daun jati yang akan digunakan sebagai wadah dan pembungkus makanan yang disajikan. Dalam setiap ritual, mereka akan membagikan makanan kepada semua orang yang hadir di acara tersebut. Hal ini tergambar pada pernyataan salah seorang warga adat Kaluppini.

“Rasa gotong royong telah tertanam sejak dulu pada setiap acara ritual yang kami lakukan di sini, meskipun ada yang hanya membawa kayu bakar atau sekedar menyumbangkan tenaga untuk membantu. Semua akan berpartisipasi dan bekerja sama” (PD, 55 tahun)

Selama *Damulu Banua*, para pemangku adat bersama warga duduk hikmat di dalam masjid sambil membaca barzanji. Barzanji adalah kumpulan atau bacaan doa dan puji-pujian yang menceri-

takan sejarah kehidupan Nabi Muhammad Saw. Barzanji dilafalkan berulang-ulang dengan irama tertentu, khas Kaluppini.

Laki-laki dan perempuan berkumpul di dalam masjid dalam aturan yang rapi dan terpisah antara barisan laki-laki dan perempuan. Di tengah-tengah masjid terdapat tumpukan pisang yang tersusun rapi, yang sekelilingnya dipenuhi makanan *songkolo* dan nasi putih yang terbungkus daun pisang atau daun jati (Gambar 3.4).



Gambar 3.4 Hidangan pada Saat Ritual Menggunakan Daun Jati sebagai Wadah

Setelah pembacaan barzanji, beberapa laki-laki biasanya membagikan wadah makanan berupa daun jati sebagai alas makanan pengganti piring dan batok buah maja atau batok kelapa (kadang digantikan dengan wadah berbahan plastik) yang dijadikan wadah untuk kuah ayam. Mereka juga bertugas untuk membagikan makanan, seperti *songkolo*, nasi, ayam, dan daging sapi siap santap kepada setiap warga yang hadir satu per satu (Gambar 3.5). Pemanfaatan daun jati sebagai alas telah menjadi tradisi pada masyarakat ini. Daun ini pula yang digunakan untuk membungkus makanan (*nande sesa*) yang telah

dibagikan untuk dibawa pulang ke rumah. Hal ini akan dijelaskan pada subbab “Strategi Bertahan Tradisional”.



Gambar 3.5 Proses Pembagian Makanan Saat Ritual

Kumande samaturu' atau makan bersama adalah salah satu tradisi yang masih bertahan sampai sekarang, menunjukkan kebersamaan dan kebersahajaan masyarakat adat Kaluppini. *Kumande samaturu'* selalu dilakukan di ritual-ritual adat dan keagamaan. Sebelum makan bersama dilakukan, makanan dikumpulkan dari warga yang kemudian diolah dan dimasak bersama, lalu dibagikan kepada seluruh masyarakat yang hadir dalam acara tanpa membedakan laki-laki, perempuan, tua atau muda. Pada proses *kumande samaturu'* ini makan disajikan menggunakan wadah dari daun jati atau dalam bahasa setempat dinamakan *ma'balla*. Kegiatan *kumande samaturu'* baru dimulai setelah seluruh rangkaian upacara dilaksanakan dan semua yang hadir dalam ritual adat telah mendapatkan makanan. Tradisi *kumande samaturu'* bermakna kesiturutan atau kebersamaan yang menggambarkan prinsip *canukkung pada kandi, keddengkii pada kandi*.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Berdasarkan hasil observasi selama ritual adat, keadaan desa menjadi sunyi karena semua kegiatan berpusat pada acara ritual tersebut. Seluruh masyarakat akan berkumpul di acara tersebut. Meskipun semua orang Kaluppini dipusatkan dalam ritual, desa itu tetap aman. Melaksanakan ritual adat adalah upaya masyarakat Kaluppini melestarikan adat istiadat mereka.

“Upacara adat menjadi sarana kami untuk menjaga kebiasaan kami dari perubahan zaman. Dan yang terpenting adalah menjaga keamanan desa. Karena jika kebiasaan itu hilang maka keamanannya pun akan hilang.” (AH, 50 tahun)

Upacara adat menjadi salah satu sarana bagi masyarakat Kaluppini untuk saling berbagi. Leluhur Kaluppini mewariskan *peppasang* (pesan/kebijaksanaan) yang telah menjadi falsafah hidup dan terus dipegang teguh oleh masyarakat Kaluppini hingga saat ini dan juga tecermin pada setiap pelaksanaan ritual adat. *Peppasang* tersebut, yaitu *sipakatau*, *malilu sipakainga*, *ra'ba sipatokkon*, *tokkon sipakaruddani*, dan *mali siparappe*.

Peppasang pertama, yaitu *sipakatau* berarti saling menghargai sesama manusia tanpa memandang latar belakang sosial seseorang. Prinsip *sipakatau* ini sangat penting dan menjadi dasar bagi *peppasang* lainnya. *Peppasang* yang kedua, yaitu *malilu si pakainga* yang artinya saling mengingatkan. Jika ada masyarakat yang melakukan kesalahan atau berbuat keliru, yang lain wajib mengingatkan. *Ra'ba sipatokkon* berarti bahwa masyarakat Kaluppini harus saling berempati. *Tokkon sipakaruddani* berarti masyarakat Kaluppini merupakan satu keluarga yang akan saling merindukan satu sama lain. *Mali siparappe* artinya bahwa masyarakat Kaluppini mempunyai keterikatan yang kuat pada adat, yang akan diterapkan oleh para pemangku adat kepada seluruh masyarakat Kaluppini (Siti, 2017).

Pada banyak masyarakat adat, pelaksanaan upacara adat merupakan simbol ucapan rasa syukur serta menghormati tradisi saling memberi dalam kehidupan ini. Seperti pada masyarakat adat Haudenosaunee, yang bermukim di negara bagian New York dan

Ontario, ketika dilakukan upacara adat, mereka selalu hadir untuk berkumpul di lokasi acara adat, mengungkapkan rasa terima kasih, dan mengakui tanggung jawab untuk menjadi penjaga bagi alam tempat mereka hidup. Kehadiran masyarakat adat pada setiap upacara adalah sebuah perayaan akan kehidupan. Sebuah kegiatan sosial untuk menikmati bersama pekerjaan yang telah dilakukan bersama dan berbagi hasil bersama (Delormier & Marquis, 2019).

Salah satu kesenian yang juga menjadi bagian penting pada banyak ritual adat di Kaluppini adalah *tari pa'jaga*. *Tari pa'jaga* merupakan kesenian yang dipentaskan pada acara pernikahan dan pada upacara adat *Pangewaran*. Kata *pa'jaga* terdiri dari dua suku kata, yaitu *pa'* dan *jaga*. *Pa'* artinya orang yang melakukan sesuatu pekerjaan, sedangkan *jaga* artinya siap siaga. *Pa'jaga* berarti orang yang bersiap siaga (menanti musuh yang akan mengganggu raja). *Tari pa'jaga* (Gambar 3.6) hanya dipentaskan oleh kaum lelaki yang sudah balig dan menggunakan atribut tradisional (Hikmah dkk., 2019; Siti, 2017).



Gambar 3.6 Tokoh adat menampilkan tari Pa'jaga

Dalam berbagai tradisi, atribut-atribut yang berwarna merah sering menyimbolkan keberanian, kewibawaan, dan semangat kepahlawanan. Hal ini menyimbolkan kaum lelaki Kaluppini yang

gagah berani dalam mempertahankan keutuhan wilayah adat mereka. Warna putih melambangkan kesucian dan warna hitam menggambarkan rasa percaya diri masyarakat tentang diri sebagai individu yang terikat pada komunitas adat mereka (Apriliani & Wilujeng, 2020; Kumalasari & Juwariyah, 2020; Nurbiyanti dkk., 2017)

Tari *pa'jaga* menjadi bagian penting dalam upacara adat dan diyakini dapat membawa keberkahan pada acara tersebut. Tarian tersebut menjadi sarana masyarakat Kaluppini untuk berdoa memohon keselamatan kepada Sang Pencipta terutama untuk mendoakan kedua mempelai agar dikaruniai rumah tangga yang bahagia. Tarian tersebut juga menjadi bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada umat manusia.



Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB 4

Ketahanan Pangan pada Masyarakat Adat Kaluppini

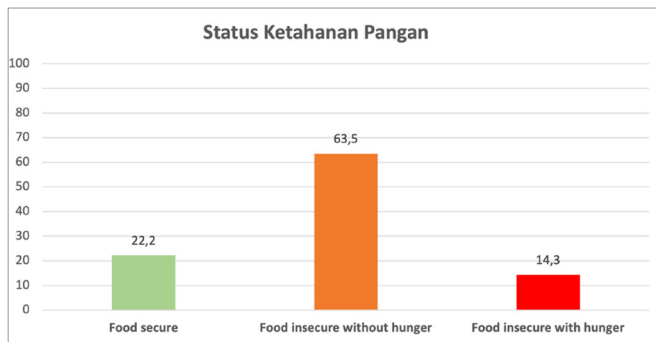
Masyarakat adat merupakan salah satu kelompok yang rentan mengalami kerawanan pangan. Banyak komunitas adat telah berupaya merevitalisasi sistem pangan lokal mereka dengan mengupayakan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan yang sering kali dinyatakan sebagai hak dan tanggung jawab masyarakat untuk memiliki akses terhadap pangan yang sehat dan sesuai dengan budaya, sambil terus berusaha mendefinisikan sistem pangan mereka sendiri.

A. Status Ketahanan Pangan dan Gizi pada Masyarakat Adat Kaluppini

Kerangka konseptual ketahanan pangan meliputi sistem pangan, sistem kesehatan, sistem ekonomi, kondisi lingkungan, dan status gizi masyarakat. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa masyarakat adat cukup rentan mengalami kerawanan pangan yang disebabkan oleh berbagai faktor (Yang & Hanson, 2009). Gambar 4.1 menunjukkan grafik status ketahanan pangan pada masyarakat adat Kaluppini yang diukur menggunakan indikator US-HFSSM.

Sebanyak 63,5% rumah tangga mengalami kerawanan pangan tanpa ada anggota keluarga yang mengalami kelaparan (*food insecure*).

rity without hunger) dan sebanyak 14,3% rumah tangga menjawab pernah mengalami kelaparan. Hanya sekitar 22,2% rumah tangga yang mempunyai status ketahanan pangan yang baik (*food secure*).



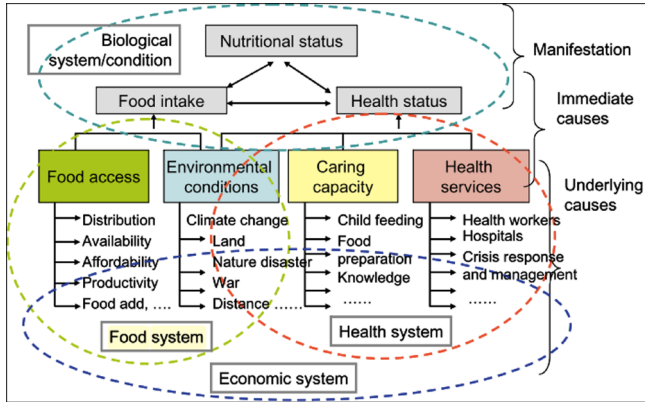
Keterangan: Status ketahanan pangan diukur menggunakan indikator US-HFFM.

Gambar 4.1 Status Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Kaluppini

Selain itu, hasil pengukuran status gizi pada balita menunjukkan sebanyak 41,2% balita di Kaluppini menderita *stunting*, 17,5% menderita *underweight*, dan 6,3% mengalami masalah gizi *wasting* (Nurbaya, tidak dipublikasikan). Data tersebut dikuatkan oleh hasil Riskesdas tahun 2018 yang menunjukkan bahwa Kabupaten Enrekang merupakan kabupaten tertinggi kelima dengan prevalensi *stunting* pada balita sebanyak 42%. Prevalensi tersebut jauh di atas rata-rata prevalensi *stunting* di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sebesar 35,8% (Kementerian Kesehatan, 2018).

Data tersebut menambah panjang daftar kerawanan pangan dan masalah gizi pada masyarakat adat di Indonesia. Orang Rimba di Provinsi Jambi mengalami kerawanan pangan sejak masuknya transmigran ke wilayah mereka, ditambah maraknya penebangan hutan secara ilegal yang menyebabkan degradasi hutan. Hal ini berdampak secara langsung pada mata pencarian Orang Rimba di Kawasan Bukit Dua Belas. Akses dan ketersediaan pangan makin

berkurang yang menyebabkan mereka makin rentan mengalami kerawanan pangan dan masalah gizi (Wardani, 2011). Hal yang sama terjadi pada masyarakat adat Mentawai di Sumatra Barat. Transmigrasi telah mengubah banyak hutan dan berdampak pada ketersediaan sagu sebagai makanan utama mereka (Pradipta, 2019).



Sumber: Yang dan Hanson (2009)

Gambar 4.2 Hubungan Status Pangan, Gizi, Kesehatan, dan Pembangunan Ekonomi

Jika melihat masalah ketersediaan dan dampaknya pada status gizi, akses kesehatan, lingkungan, dan status ekonomi, faktor-faktor tersebut saling terkait satu sama lain (Gambar 4.2). Produksi, ketersediaan, dan distribusi pangan merupakan faktor-faktor penentu utama keberhasilan sistem pangan pada suatu masyarakat, termasuk pada masyarakat adat. Jika ketersediaan pangan pada suatu masyarakat sudah mulai terganggu atau tidak stabil, akan menyebabkan masalah gizi dan kesehatan yang secara tidak langsung berdampak pada produktivitas kerja. Oleh karena itu, produksi pangan oleh petani lokal sangat penting untuk meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan dan keragaman pangan lokal sehingga dapat mengurangi

risiko kekurangan pangan pada suatu periode tertentu, misalnya pada musim paceklik.

B. Ketersediaan Pangan

Sebagian besar masyarakat Kaluppini bekerja sebagai petani. Mereka memiliki beberapa jenis tanaman jangka pendek, seperti jagung, kacang tanah, dan bawang merah. Tanaman jangka panjang termasuk cengkih, kemiri, kakao, dan pala. Mereka juga menanam padi walaupun hanya setahun sekali karena sawah mereka adalah sawah tadah hujan yang bergantung sepenuhnya pada ketersediaan air hujan.

Ketersediaan pangan pada masyarakat adat Kaluppini bergantung dari hasil produksi pertanian di wilayah tersebut dan ketersediaan pangan di pasar. Mereka membeli makanan dari pasar, termasuk beras sebagai makanan pokok mereka. Mereka menilai produksi beras di daerah mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga mereka tetap harus membeli beras. Salah satu penyebabnya ialah perubahan musim yang menyebabkan musim tanam berubah dan berdampak pada hasil panen yang rendah pula.

Selain beras, mereka juga memproduksi sorgum atau jewawut sebagai salah satu makanan pokok mereka. Masyarakat Kaluppini menyebut jewawut sebagai *ba'tang*. Dulunya, *ba'tang* adalah makanan utama mereka, namun kini produksi *ba'tang* sudah mulai berkurang. Dahulu, makanan pokok masyarakat Kaluppini tidak hanya nasi tapi juga sorgum. Namun, sejak bertahun-tahun lalu, produksi sorgum mulai menurun sehingga bahan makanan pokok yang utama berubah menjadi beras saja.

“Dulu ada kami menanam sorgum tapi sekarang orang malas menanam karena sekarang musimnya tidak bisa diprediksi. Lebih banyak yang memilih menanam jagung.” (AH, 50 tahun)

Ketersediaan beras dan juga sorgum sebagai makanan pokok pada masyarakat adat ini cenderung mulai berkurang. Hasil panen berkurang setiap tahun karena sawah yang ada di Kaluppini adalah sawah tadah hujan. Sementara itu, musim hujan di Kaluppini sudah

mulai berubah sehingga petani sulit menentukan kapan saat terbaik untuk menanam sekaligus mengurangi potensi kerugian jika ternyata musim hujan terlambat.

Informan menggambarkan bahwa sudah beberapa tahun hasil panen mereka makin menurun, gagal panen, bahkan ada yang sudah mulai tidak menanam padi karena musim hujan yang tidak menentu.

“Kami beli beras karena sawah kami sering gagal panen. Kadang karena di makan hama, ulat bulu atau kadang juga karena cuaca. Masyarakat di sini bergantung pada curah hujan. Makanya sawah kami selalu gagal panen.” (NR, 40)

“Sudah dua tahun terakhir ini kami tidak menanam padi. Pernah kami mulai menanam padi, tapi akhirnya gagal karena tidak ada air hujan. Jadi, kami mencoba menanam jagung.” (IN, 2)

Pertanian dan produksi pangan adalah salah satu sektor ekonomi yang paling sensitif terhadap iklim karena hasil tanaman tadah hujan bergantung pada curah hujan yang memadai dan suhu sedang. Perubahan iklim yang terjadi saat ini telah meningkatkan suhu global dan menyebabkan curah hujan yang tidak dapat diprediksi. Hal tersebut akan membawa dampak yang sangat besar terhadap sistem pertanian terutama pada masyarakat adat yang sebagian besar bergantung pada alam (IFAD, 2013). Perubahan iklim, pada akhirnya, akan menyebabkan penurunan hasil pertanian.

Perubahan iklim telah berdampak luas ke sistem pangan masyarakat. Sistem pangan terdiri dari kegiatan memproduksi hasil pertanian, menyimpan, memperdagangkan, mengolah, mengemas, mendistribusikan pangan, menyiapkan, hingga mengonsumsi makanan. Rendahnya produksi pertanian akan berdampak pada ketahanan pangan masyarakat Kaluppini. Ketahanan pangan masyarakat adat dapat dipengaruhi oleh akses terhadap pangan lokal dan akses terhadap pangan pasar. Faktor lain yang berkontribusi terhadap kurangnya ketersediaan pangan lokal, seperti kurangnya akses terhadap kawasan adat sehingga masyarakat adat tidak dapat memanfaatkan hasil alam yang ada di kawasan adat tersebut.

Pada banyak literatur dijelaskan bahwa pertanian skala kecil sangat rentan terhadap kegagalan panen akibat kejadian cuaca ekstrem karena selama ini mereka bergantung sepenuhnya pada iklim. Tambahan lagi, sumber daya dan kapasitas sangat terbatas untuk melakukan mitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim sehingga berdampak pada sistem pertanian mereka. Pada akhirnya, mereka menjadi lebih rentan mengalami kerawanan pangan kronis dan sering kali kesulitan mengakses ke jaring pengaman sosial (Gomez dkk., 2020).

Kemampuan memproduksi pangan lokal adalah inti penguatan pangan dan ekonomi masyarakat adat. Praktik ritual, produksi, pengolahan, dan penyiapan makanan memperkuat budaya dan identitas mereka. Hal tersebut dapat menjaga masyarakat adat dari situasi rawan pangan. Namun, ketergantungan masyarakat adat pada sumber daya alam juga membuat mereka rentan, terutama karena tanah yang mereka gunakan sering kali tidak dianggap sebagai milik mereka, oleh orang lain, baik secara hukum maupun fakta (Nurbaya, 2017).

Ada satu tradisi dan pengetahuan tradisional yang dipegang oleh masyarakat adat Kaluppini untuk menyokong ketahanan pangan mereka. Mereka tidak menjual hasil panen padi mereka. Hasil panen tersebut sepenuhnya digunakan untuk konsumsi rumah tangga dan disimpan sebagai cadangan pangan untuk masa depan. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan prasyarat penting bagi akses terhadap pangan lokal dan ketahanan pangan bagi masyarakat adat. Melestarikan pengetahuan tradisional tentang sistem pertanian dan cara pengolahan pasca panen pada masyarakat sangat penting. Selain itu, hukum adat tidak hanya mengatur interaksi antaranggota masyarakat adat tersebut, tetapi juga interaksi manusia dengan alam.

Desa adat di Bali, hingga kini masih melestarikan hukum adat yang mereka anut. Desa adat memiliki kewenangan berdasarkan hak, asal-usul, dan kewenangan lokal berskala desa adat. Beberapa kewenangan tersebut menyangkut pengelolaan hutan adat, sumber

air, sistem pertanian dan perkebunan, termasuk seni kerajinan rakyat. Sistem aturan dalam desa adat tersebut dikenal dengan *awig-awig*.

Dalam konteks ketahanan pangan, desa adat di Bali mempunyai sistem yang menyangga sistem pertanian dan ketahanan pangan pada masyarakat tersebut. Sistem tersebut disebut *subak*, suatu sistem organisasi tradisional petani yang bersifat otonom berdasarkan hukum adat. Sistem mengatur organisasinya, yaitu suatu kelompok wilayah hamparan yang memiliki sumber air yang sama namun dengan batas yang sangat jelas. Sistem *subak* menjaga ketersediaan air yang menopang sistem pertanian sehingga dapat menjaga kestabilan produksi pertanian di kawasan tersebut (Arnawa, 2011).

Namun, beberapa tahun terakhir, hasil panen para petani Kaluppini sudah mulai berkurang sebagai akibat dari perubahan iklim dan berdampak pada ketersediaan beras di tingkat rumah tangga. Mereka akhirnya harus membeli beras di pasar karena persediaan beras makin menipis akibat sudah beberapa tahun tidak panen padi.

“Sekarang, kami akhirnya harus membeli beras di pasar sekarang karena cadangan gabah kami hampir habis. Kami sudah jarang menanam padi.” (AH, 28)

Hal tersebut dibenarkan oleh salah seorang pimpinan adat, Ia mengatakan mayoritas masyarakat Kaluppini membeli beras.

“Sudah lebih dari tujuh tahun rata-rata masyarakat di sini gagal panen karena musim yang tidak menentu. Jadi, kebanyakan orang di sini membeli beras dari luar Kaluppini.” (AH, 50)

Selain sebagai petani, mayoritas penduduk Kaluppini juga berprofesi sebagai peternak sapi. Sebagian kecil penduduk memelihara ayam. Mereka beternak ayam untuk konsumsi rumah tangga dan memenuhi kebutuhan upacara ritual. Selain itu, beberapa masyarakat Kaluppini juga membuat gula aren untuk dijual ke pasar tradisional.

Untuk sumber protein, sebagian besar berasal dari daging sapi dan ayam. Walaupun demikian, Masyarakat Kaluppini mengonsumsi daging sapi dan ayam hanya saat melakukan ritual. Daging sapi dan

ayam menjadi santapan wajib di setiap acara, seperti yang disampaikan oleh beberapa informan bahwa mereka tidak pernah membeli daging. Biasanya mereka makan daging saat ada upacara adat yang menyajikan daging.

“Kami tidak pernah membeli daging. Kami hanya makan daging saat ada ritual. Jadi, hanya itu yang kami makan daging dari ritual.”
(NN, 37 tahun)

Setiap kali masyarakat Kaluppini mengadakan upacara, mereka akan bekerja sama dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan untuk ritual. Mereka menyumbangkan beras, ayam, atau bahkan sapi untuk diberikan kepada orang yang melakukan ritual. Gambar 4.3 memperlihatkan bagaimana masyarakat adat Kaluppini mengumpulkan ayam dan diolah bersama-sama untuk kebutuhan upacara adat.



Gambar 4.3 Ketersediaan dan Pengolahan Ayam pada Saat Upacara Adat

Tingginya kebutuhan pangan terutama beras dan ayam saat ritual belum mampu dipenuhi melalui produksi lokal. Kebutuhan beras dan ayam dipenuhi dari pasar. Namun, untuk kebutuhan daging sapi, mereka mampu mencukupi dari ternaknya sendiri.

“Hampir setiap orang punya sapi. Kadang dijual kalau ada kebutuhan dalam jumlah besar, tapi kami jarang menjual sapi karena kebutuhan ritualnya banyak. Masyarakat Kaluppini satu-satunya masyarakat adat di Enrekang yang banyak melakukan upacara adat dalam setahun. Bayangkan saja, ketersediaan ayam di Pasar Enrekang, mungkin sekitar 80% dibeli oleh masyarakat Kaluppini.” (KD, 45 tahun)

C. Akses Pangan

Selain ketersediaan pangan sumber karbohidrat yang mulai berkurang, masyarakat Kaluppini juga mengalami kesulitan akses terhadap pasar. Sebagian besar membeli pangan di pasar di kota Enrekang karena pangan tersebut tidak tersedia di lingkungan mereka atau jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pasar memainkan peran penting bagi rumah tangga, baik sebagai penjual pangan lokal maupun sebagai pembeli komoditas pertanian tersebut.

Sarana transportasi utama di daerah Kaluppini adalah sepeda motor dan truk. Butuh waktu lebih dari satu jam untuk mencapai desa terdekat karena akses yang sulit dan harus melewati jalan setapak yang rusak parah. Untuk mencapai desa lainnya, bisa menggunakan sepeda motor atau truk, tetapi banyak daerah di Kaluppini yang hanya bisa dijangkau dengan sepeda motor terutama untuk dusun yang jauh lebih terpencil.

Masyarakat adat Kaluppini yang mempunyai sepeda motor menggunakan kendaraan tersebut sebagai sarana transportasi pribadi untuk ke kebun, sekolah, atau pasar. Namun, sebagian besar masyarakat Kaluppini menggunakan truk sebagai sarana transportasi utama ke pasar. Mereka membutuhkan kendaraan yang lebih besar untuk mengangkut bahan alam dari kebun untuk dijual di pasar, seperti jagung, kemiri, kacang tanah, dan gula merah. Begitu pula sebaliknya, truk mampu menampung bahan makanan atau barang-barang lain yang mereka beli di pasar, seperti beras dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

Secara umum, masyarakat Kaluppini dapat mengakses dua jenis pasar, yaitu pasar tradisional dan pasar yang lebih besar yang terletak di kota kabupaten. Masyarakat Kaluppini mengeluhkan sulitnya mengakses pasar untuk membeli bahan pangan karena jarak yang jauh serta jalan rusak parah.

“Di sini makanan susah (susah akses) karena harus ke pasar. Pasar jauh dari sini. Apalagi jika hujan, jalanan berlumpur dan rusak parah.” (I, 23)

Pasar lokal yang skalanya lebih kecil digunakan untuk menjual dan membeli bahan pangan kebutuhan sehari-hari dalam jumlah yang kecil dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hanya ada satu pasar tradisional yang beroperasi di wilayah Kaluppini, namanya *Pasa' Kalimu*. Pasar tradisional tersebut disebut *Pasa' Kalimu* karena hanya beroperasi dari jam 5 subuh–jam 7 pagi ketika cuaca masih dingin dan masyarakat ke pasar dengan menggunakan selimut (*kalimu* berarti selimut). Itulah mengapa pasar tersebut sebagai *Pasa' Kalimu*.



Gambar 4.4 Suasana Pasar Tradisional di Kaluppini

Pasa Kalimu' hanya tersedia dua kali seminggu, yaitu hari Rabu dan Minggu. *Pasa Kalimu'* berperan penting dalam distribusi buah-buahan segar, sayuran, dan produk pangan lokal yang tidak dapat disimpan untuk waktu yang lama. Pedagang yang menjual pun tidak lebih dari 20 orang dan hanya menjual beberapa jenis pangan lokal hasil kebun warga seperti sayur dan buah-buahan yang jumlahnya sangat terbatas (Gambar 4.4).

Jumlah dan variasi pangan yang dijual di pasar tersebut sangat sedikit. Variasi makanan berbeda setiap hari pasar. Hal ini tergantung dari hasil kebun para penjual. Pangan yang paling banyak dijual adalah sayuran, seperti bayam, kangkung, jamur, tomat, dan cabai. Selain itu, pedagang juga menjual buah-buahan, seperti pepaya, pisang, dan sukun walaupun jumlahnya terbatas.

Selain *Pasa Kalimu'*, pasar lainnya adalah pasar Enrekang yang terletak di kota Enrekang. Pasar tersebut jauh lebih ramai, modern, dan menjual berbagai jenis pangan dalam jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan yang dijual di *Pasa Kalimu'*. Masyarakat Kaluppini yang tidak bisa mengakses pasar *Kalimu'* akan pergi ke pasar Enrekang setiap Senin dan Kamis dengan menggunakan sepeda motor atau truk sebagai alat transportasi utama. Selain untuk membeli bahan pangan, rumah tangga petani mengakses pasar Enrekang yang terletak di kota Enrekang untuk menjual hasil pertanian dan untuk membeli makanan dan kebutuhan lainnya.

Untuk menjangkau pasar Enrekang, mereka akan menggunakan sepeda motor pribadi. Bagi yang tidak punya kendaraan pribadi, mereka akan menggunakan truk sebagai transportasi umum yang utama. Mereka harus membayar sekitar Rp30.000,00 hingga Rp50.000,00 atau bahkan lebih setiap kali pergi ke pasar. Biaya tersebut dapat meningkat jika kelebihan bagasi. Terkadang, mereka kembali dari pasar dengan menyewa ojek walau biayanya akan lebih mahal, sekitar Rp70.000,00–Rp100.000,00.

Produk hasil pertanian, seperti jagung, kacang tanah, cokelat, cengkih, kemiri, pala, hingga gula aren dijual di pasar Enrekang. Pasar ini berjarak sekitar 10–15 km dengan kondisi jalan yang sangat terjal

dan hanya bisa diakses dengan truk. Uang yang didapatkan dari hasil penjualan hasil pertanian tersebut mereka gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, baik pangan maupun nonpangan.

Akses terhadap pangan ditentukan oleh berbagai faktor seperti daya beli masyarakat terhadap pangan, berbagai karakteristik masyarakat (seperti jumlah warung/toko dan transportasi), dan program bantuan pemerintah. Di tingkat yang lebih lokal, ketersediaan pangan sangat bergantung pada infrastruktur jalan dan ketersediaan pasar (Haering & Syed, 2009; Pieters dkk., 2013).

Menurut laporan yang dirilis oleh *The Health Canada*, ketahanan pangan pada suatu masyarakat adat sangat erat kaitannya dengan faktor berikut ini (Skinner dkk., 2016).

- 1) Kondisi geografis, misalnya lokasi pasar, toko atau warung, dan apa saja yang tersedia di toko tersebut. Lokasi pasar, toko, atau warung yang menjual bahan pangan yang letaknya jauh dari permukaan masyarakat membuat akses ke pangan makin sulit dan membutuhkan pengeluaran tambahan, seperti biaya transportasi untuk mengakses toko atau pasar tersebut.
- 2) Ketersediaan pangan mencakup jenis pangan yang tersedia dan berapa banyak jumlahnya.
- 3) Keterjangkauan pangan. Hal ini berhubungan dengan stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat.
- 4) Kualitas pangan berhubungan dengan kualitas gizi pangan yang tersedia di sekitar lingkungan.

Akses terhadap pasar untuk membeli makanan dan menjual produk pertanian lokal terbukti sangat penting untuk menjaga keragaman makanan di tingkat rumah tangga. Dalam kasus masyarakat Kaluppini, terdapat beberapa faktor yang menghambat ketersediaan dan akses pangan. Misalnya, jumlah pasar tradisional di desa Kaluppini hanya satu dan hanya menjual beberapa jenis pangan dengan jumlah terbatas. Hal ini kemudian diperparah dengan akses geografis yang sulit ke pasar lain yang terletak di kota Enrekang. Harga pangan juga

menjadi masalah di kalangan rumah tangga rawan pangan karena daya belinya cukup rendah.

Upaya meningkatkan akses masyarakat Kaluppini ke pasar melalui pembangunan infrastruktur yang lebih baik merupakan salah satu pendekatan untuk meningkatkan akses terhadap pangan yang dapat berkontribusi pada peningkatan pola makan beragam pada masyarakat adat. Selain itu, ketersediaan pangan lokal yang diproduksi sendiri oleh masyarakat adat sangat penting karena menyediakan keanekaragaman hayati pertanian yang kaya, dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, serta menjaga kelangsungan mata pencarian masyarakat tersebut (Ezeomah & Farag, 2016). Sebaliknya, ketika ketersediaan pangan lokal berkurang, hal ini akan menyebabkan potensi kerawanan pangan dan rendahnya keanekaragaman makanan.



Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB 5

Strategi Bertahan Masyarakat Adat Kaluppini

Strategi bertahan (*coping strategy*) adalah cara orang bertindak dalam batas-batas sumber daya yang ada dan rentang harapan untuk mencapai berbagai tujuan. Dalam konteks kerawanan pangan, anggota rumah tangga akan menerapkan beberapa strategi yang disebut sebagai strategi bertahan untuk mengatasi masalah kerawanan pangan yang mereka hadapi. Strategi tersebut dilakukan oleh masyarakat adat untuk mengatasi kekurangan pangan yang dapat dimodifikasi, baik di tingkat rumah tangga maupun individu sesuai dengan pengalaman kerawanan pangan mereka masing-masing (Balta dkk., 2015).

Tingkat ketahanan pangan rumah tangga yang berbeda akan menerapkan jenis strategi bertahan yang berbeda pula. Baik rumah tangga rawan pangan maupun tahan pangan pernah mengalami situasi kekurangan pangan dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Oleh karena pengalaman yang dirasakan berbeda-beda pada setiap rumah atau individu, strategi bertahan yang dilakukan pun berbeda-beda.

Jenis strategi bertahan yang dapat dilakukan akan bergantung pada sumber daya rumah tangga dan kemampuan untuk mengakses pasar, tabungan, kredit, asuransi, atau bantuan sosial dari pemerintah.

Dengan berusaha menerapkan beberapa strategi bertahan di masa rawan pangan, rumah tangga dapat mengurangi atau bahkan menghindari dampak buruk kerawanan pangan, seperti dampak terhadap kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidup secara umum (Pieters dkk., 2013).

A. Strategi Bertahan di Masa Rawan Pangan

Strategi bertahan masyarakat Kaluppini untuk mengatasi situasi rawan pangan cukup beragam. Strategi bertahan yang dilakukan oleh kelompok rumah tangga tahan pangan dan kelompok pangan berbeda-beda. Walaupun demikian, ada jenis strategi bertahan yang sama-sama dilakukan oleh kedua kelompok rumah tangga tersebut. Kesamaan strategi bertahan, seperti salah satu anggota rumah tangga, terutama suami atau anak tertua dalam suatu rumah tangga, akan mencari pekerjaan tambahan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Secara umum, bentuk-bentuk strategi bertahan yang dilakukan oleh masyarakat Kaluppini dapat dikelompokkan menjadi lima jenis, yaitu mencari tambahan penghasilan, mengubah pola makan, akses cepat pada pangan, akses cepat pada uang tunai, serta strategi bertahan tradisional. Perbedaan strategi bertahan antara kelompok rumah tangga tahan pangan (*food secure*) dan kelompok rawan pangan (*food insecure*) dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Bentuk Strategi Bertahan pada Masyarakat Adat Kaluppini

Kategori Strategi Bertahan	Jenis strategi bertahan		
	Dilakukan oleh rumah tangga rawan pangan dan tahan pangan	Dilakukan hanya oleh	
		Rumah Tangga Rawan Pangan	Rumah Tangga Tahan Pangan
Mencari tambahan penghasilan	Suami mencari pekerjaan tambahan	<ul style="list-style-type: none"> Suami mencari pekerjaan tambahan di luar desa 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Ma'sompa</i> (pergi merantau)

Kategori Strategi Bertahan	Jenis strategi bertahan		
	Dilakukan oleh rumah tangga rawan pangan dan tahan pangan	Dilakukan hanya oleh	
		Rumah Tangga Rawan Pangan	Rumah Tangga Tahan Pangan
		<ul style="list-style-type: none"> Anak berhenti sekolah untuk bisa bekerja 	
Perubahan pola makan	<ul style="list-style-type: none"> Makan hanya nasi saja <i>Membuat nande dalle/nande bettawe</i> (Memasak nasi yang dicampur dengan jagung atau ubi) 	<ul style="list-style-type: none"> Membeli makanan yang lebih murah Mengolah tepung untuk mengganti beras 	<ul style="list-style-type: none"> Menghemat pengeluaran
Akses cepat pada pangan	<ul style="list-style-type: none"> Mengolah gabah Mencari pangan di hutan 	<ul style="list-style-type: none"> Anak-anak makan di rumah kerabat Mengambil makanan yang dijual di warung sendiri 	–
akses cepat pada uang tunai	<ul style="list-style-type: none"> Meminjam uang dari keluarga Menjual persediaan kacang tanah dan jagung 	<ul style="list-style-type: none"> Mengambil uang dari tabungan 	–

Kategori Strategi Bertahan	Jenis strategi bertahan		
	Dilakukan oleh rumah tangga rawan pangan dan tahan pangan	Dilakukan hanya oleh	
		Rumah Tangga Rawan Pangan	Rumah Tangga Tahan Pangan
Strategi bertahan tradisional	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nande Sesa</i> • <i>Sumaro</i> (membantu kegiatan memanen dengan imbalan berupa sebagian dari hasil panen) • Menyimpan gabah/kacang tanah/jagung 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ma'kambi</i> (merawat ternak) • <i>Ma'tanan uma Sa'de bola</i> (menanam tanaman pangan di pekarangan rumah) 	---

Keterangan: --- artinya rumah tangga tahan pangan tidak melakukan strategi bertahan dalam bentuk akses cepat pada pangan, akses cepat pada uang tunai dan strategi bertahan tradisional.

Dengan melihat rangkuman strategi bertahan pada kedua kelompok rumah tangga terlihat bahwa strategi yang dilakukan oleh rumah tangga rawan pangan jauh lebih banyak. Hal ini menunjukkan tingkat keparahan status ketahanan pangan yang mereka alami. Makin banyak strategi bertahan yang dilakukan dalam suatu rumah tangga, makin tinggi pula tingkat kerawanan pangan yang dialami. Hal ini sejalan dengan pengalaman kerawanan pangan yang mereka lalui selama ini. Adapun penjelasan lebih rinci terkait Tabel 5.1 digambarkan pada subbab selanjutnya.

B. Mencari Tambahan Penghasilan

Mencari pekerjaan tambahan adalah jenis strategi bertahan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga. Biasanya, suami yang bertanggung jawab mencari pekerjaan tambahan untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Umumnya suami atau kepala rumah tangga di masyarakat adat Kaluppini bekerja sebagai petani atau peternak. Namun, saat mengalami kekurangan pangan, suami atau kepala rumah tangga akan mencari pekerjaan tambahan. Penambahan pendapatan menjadi sangat penting karena merupakan salah satu penentu dalam menjaga ketahanan pangan rumah tangga.

“Suami saya kadang mencari pekerjaan tambahan sebagai tukang kayu selain menanam jagung dan kacang.” (IN, 33 tahun)

Untuk kelompok rumah tangga rawan pangan, suami akan mencari pekerjaan tambahan di kota, misalnya menjadi tukang bangunan atau buruh harian. Sementara itu, bagi kelompok rumah tangga tahan pangan, saat menghadapi situasi rawan pangan mereka melakukan *ma'sompa*. *Ma'sompa* adalah istilah yang mengacu pada tindakan pergi merantau ke luar pulau seperti Pulau Papua atau bahkan ada yang jadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia.

“Suami saya pergi *ma'sompa* jadi TKI di Sendakan, Malaysia. Dia sudah dua tahun di sana karena masalah ekonomi kami di sini.” (FT, 34 tahun)

Perbedaan bentuk strategi dalam mencari pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh kedua kelompok rumah tangga tersebut berhubungan dengan kemampuan finansial masing-masing. Rumah tangga tahan pangan mempunyai kemampuan finansial lebih baik sehingga mampu merantau hingga ke Malaysia untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Setelah tiba di tempat kerja, mereka akan mengirimkan sejumlah uang kepada rumah tangga yang ada di desa.

Kondisi ini dibenarkan oleh tokoh masyarakat yang menjadi informan kunci. Ia mengatakan, sebagian penduduk desanya pergi merantau ke pulau lain atau bahkan ke luar negeri untuk mencari pekerjaan tambahan.

“Masalahnya di sini karena lahan untuk pertanian sangat kurang... dan hanya mengandalkan curah hujan setahun sekali... sehingga banyak orang Kaluppini yang merantau ke Malaysia, Kalimantan,

atau Papua untuk mencari pekerjaan. Mereka biasanya bekerja sebagai buruh atau tukang kayu. Setelah mereka berhasil mereka akan kembali ke Kaluppini karena cinta akan tanah adat kami.“ (KD, 45 tahun)

Suami atau kepala rumah tangga berperan penting untuk menghasilkan pendapatan tambahan demi meningkatkan status ketahanan pangan rumah tangga. *Ma'sompa* bisa membuat anggota rumah tangga yang masih tinggal di Kaluppini tetap berstatus tahan pangan. Oleh karena itu, akses ke pekerjaan yang menghasilkan pendapatan merupakan penentu utama kemampuan rumah tangga dalam membeli bahan pangan (Pieters dkk., 2013).

Studi lain yang dilakukan di Afrika Selatan menemukan hal yang sebaliknya. Di Zambia, pihak istri justru bertanggung jawab untuk mencari penghasilan dengan mengumpulkan kayu bakar dan menjualnya kepada penduduk kota. Hal itu menambah beban kerja perempuan karena selain mereka harus mengasuh anak-anak, juga harus menghasilkan pendapatan untuk mengatasi kekurangan makanan di saat bersamaan (Schrimpf & Feil, 2012).

Strategi bertahan yang dilakukan oleh suami juga menunjukkan bahwa suami atau kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pendapatan rumah tangga. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi para ibu sehingga mereka dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengasuh anak dan mengurangi beban kerja untuk mencari pekerjaan tambahan.

Selain itu, anak pertama atau anak yang lebih tua dari kelompok rumah tangga rawan pangan akan putus sekolah. Mereka lalu berusaha mencari pekerjaan di desa atau kota atau setidaknya membantu orang tua mereka bertani. Tujuannya adalah mengurangi beban ekonomi keluarga dan berusaha memberikan penghasilan tambahan.

“Anak pertama dan kedua saya sudah putus sekolah. Kami tidak memaksa mereka meninggalkan sekolah. Mereka berhenti sekolah karena mereka ingin membantu pekerjaan ayah mereka. Menambah penghasilan untuk keluarga” (AM, 39 tahun)

Anak putus sekolah dan memperkerjakan anak adalah strategi bertahan yang juga ditemukan di beberapa provinsi lain di Indonesia (Usfar, 2007). Kemiskinan dan kerawanan pangan dalam rumah tangga bukan hanya membuat anak berisiko putus sekolah. Kerawanan pangan juga berpotensi menyebabkan masalah gizi, perkembangan fisik, psikomotor, dan perkembangan otak anak-anak menjadi terhambat dibanding dengan anak-anak dari keluarga tahan pangan yang mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara mandiri.

Kerawanan pangan dan masalah gizi terutama pada masa remaja tidak hanya memengaruhi kehidupan individu, tetapi juga perkembangan ekonomi suatu negara. Anak-anak *stunting* sangat berpotensi tumbuh menjadi orang dewasa dengan produktivitas rendah yang menjadi beban ekonomi negara (Tamiru & Belachew, 2017). Selain itu, pada masa remaja mereka akan merasakan cemas dan khawatir selama masa kerawanan pangan (Nurbaya & Najdah, 2023).

C. Perubahan Pola Makan

Perubahan pola makan seperti hanya makan nasi saja, mengurangi jumlah makanan yang dimasak, dan membeli makanan yang harganya lebih murah adalah jenis strategi bertahan yang dilakukan masyarakat dari berbagai latar belakang (Skinner dkk., 2013). Jenis strategi ini juga ditemukan pada masyarakat Kaluppini.

Perubahan pola makan mengacu pada pengurangan jumlah makanan yang dikonsumsi atau mengubah jenis makanan yang biasa mereka konsumsi sehari-hari. Jenis strategi perubahan pola makan dilakukan dalam bentuk makan hanya nasi saja tanpa ada lauk, memasak *nande dalle* atau *nande bettawe*. *Nande dalle* atau nasi jagung adalah beras yang dimasak dan dicampur dengan jagung (Gambar 5.1), sedangkan *nande bettawe* adalah beras yang dimasak dengan campuran singkong. Hal ini bertujuan menghemat beras agar persediaan beras tidak cepat habis. Bentuk strategi lain yang mereka lakukan adalah membeli makanan yang lebih murah, mengolah makanan dari tepung, melakukan penghematan bahan makanan, dan membatasi pengeluaran.

Meskipun kedua kelompok rumah tangga ini memasak *nande dalle* atau *nande bettawe*, namun tujuan mereka berbeda. Pada rumah tangga tahan pangan, mereka mencampurnya bukan hanya untuk menghemat beras, juga untuk alasan kesehatan. Mereka percaya *nande dalle* dan *nande bettawe* bisa membuat lebih sehat. Sementara itu, bagi rumah tangga rawan pangan, tujuan utamanya adalah murni menghemat persediaan beras sehingga tidak cepat habis dan dapat bertahan lebih lama.



Gambar 5.1 *Nande Dalle*, nasi dimasak dengan campuran jagung.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di beberapa rumah tangga rawan pangan, mereka hanya memberi makan nasi saja kepada anak-anak mereka. Hal ini teramati selama tiga hari observasi. Mereka hanya mengonsumsi nasi, kadang dicampur jagung. Mereka sering memasak nasi yang dicampur jagung sehingga komposisi nasi yang mereka masak lebih padat sehingga mereka dapat menghemat beras.

“Keluarga kami lebih sering hanya makan nasi saja (tanpa lauk-pauk).” (NA, 29 tahun)

“Kadang juga saya masak *nande dalle*, nasi campur jagung. Supaya nasi kita tidak cepat habis.” (AB, 35 tahun)

Jika akhirnya rumah tangga rawan pangan sudah tidak mempunyai beras sama sekali untuk dikonsumsi, mereka akan mengolah tepung untuk dijadikan kue tradisional yang bisa dimakan lebih lama. Strategi bertahan ini hanya dilakukan oleh kelompok rumah tangga rawan pangan.

Strategi bertahan dengan mengubah pola makan dan hanya makan nasi saja tanpa lauk apa pun ditemukan pada rumah tangga rawan pangan dan juga tahan pangan. Meskipun demikian praktik makan nasi saja berbeda pada kedua kelompok rumah tangga. Rumah tangga rawan pangan benar-benar hanya makan nasi saja tanpa lauk hewani maupun nabati. Sementara rumah tangga tahan pangan, yang dulunya mereka bisa mengonsumsi nasi dengan lauk hewani dan nabati, saat situasi rawan pangan mereka mereka masih bisa memberi makan nasi dan sayur untuk anaknya. Terkadang mereka bisa membeli tahu/tempe untuk tambahan lauk.

“Kami membeli makanan yang lebih murah yang cukup untuk dikonsumsi keluarga kami, jadi kami membeli Su*erm*e (sejenis makanan instan). Cukup untuk keluarga kita sekali makan. Saya mau beli yang lain tapi uangnya tidak cukup.” (FT, 34 tahun)

Perubahan pola makan di tingkat individu terutama pengurangan jumlah dan kualitas asupan gizi sebagai akibat dari kerawanan pangan akan berdampak pada kecukupan gizi dan status kesehatan. Asupan energi merupakan aspek yang sangat spesifik dari kerawanan pangan. Individu yang mengalami kesulitan dalam memperoleh makanan cenderung beralih ke sumber energi yang lebih murah dan mengurangi kualitas asupan makanan mereka. Hal ini akan berdampak pada keanekaragaman dan kualitas asupan gizi mereka.

Anak-anak menjadi kelompok paling rentan mengalami masalah gizi kurang ketika terjadi pengurangan kualitas asupan makanan dalam rumah tangga.

Berbagai studi telah membuktikan hubungan kuat antara kerawanan pangan dan prevalensi *underweight* atau *wasting* pada anak. Sebagian besar penelitian di negara berpenghasilan rendah menunjukkan hubungan positif antara peningkatan keparahan kerawanan pangan dan risiko *underweight* serta *stunting* pada anak balita (Ghattas, 2014).

D. Akses Cepat terhadap Pangan

Akses cepat terhadap pangan adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat Kaluppini untuk dapat mengakses pangan dengan cepat sehingga dapat memenuhi kebutuhan harian mereka. Strategi yang biasa masyarakat adat Kaluppini terapkan untuk mengakses pangan dengan cepat antara lain mengolah stok gabah yang selama ini mereka simpan, meminjam beras dari kerabat, membiarkan atau menyuruh anak makan di rumah kerabat, mencari bahan pangan lain di hutan, dan mengambil pangan yang dijual warung mereka sendiri untuk dikonsumsi.

Hasil observasi menunjukkan dua cara yang sama-sama sering dilakukan oleh keluarga rawan pangan maupun tahan pangan untuk mempertahankan status ketahanan pangan mereka di tingkat rumah tangga, yaitu mengolah gabah dan mencari pangan di hutan. Selain itu, strategi yang hanya dijumpai pada rumah tangga keluarga rawan pangan adalah menyuruh anak-anak mereka makan di rumah keluarga terdekat atau mengambil makanan yang mereka jual di warung sendiri untuk dikonsumsi.

Salah satu tradisi untuk menjaga ketahanan pangan di masyarakat adat Kaluppini adalah kebiasaan menyimpan hasil panen sawah mereka dalam bentuk gabah karena daya simpannya bisa jauh lebih lama. Mereka tidak menjual beras, melainkan menyimpannya sebagai cadangan pangan (Gambar 5.2). Gabah tersebut disimpan di langit-

langit rumah mereka agar gabah tetap kering dan tidak lembab. Hal ini membuat gabah tersebut dapat bertahan hingga bertahun-tahun.



Gambar 5.2 Masyarakat Kaluppini menyimpan gabah sebagai cadangan bahan pangan.

Untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari dan selama masih mampu, mereka membeli beras dari pasar. Dalam pandangan masyarakat adat Kaluppini, gabah yang disimpan di rumah adalah cadangan makanan untuk kondisi darurat, di saat sudah benar-benar tidak ada beras atau saat mereka sudah tidak punya uang untuk membeli beras. Praktik ini dilakukan oleh kedua kelompok rumah tangga, baik rumah tangga tahan pangan maupun rawan pangan. Ketika suatu rumah tangga benar-benar sudah tidak mampu membeli beras dan sudah tidak ada cadangan beras, barulah mereka menggiling cadangan gabah yang mereka simpan selama bertahun-tahun sebagaimana dikutip dari beberapa informan.

“Kami tidak menggiling gabah kami. Kami membeli beras dulu. Kami menyimpan cadangan gabah kami. Nanti jika tidak ada uang lagi, kami akan menggiling gabah untuk kebutuhan beras sehari-hari.” (AM, 28 tahun)

“Jika beras kami habis, kami akan menggiling gabah kami. Tapi kalau masih ada rezeki, kami lebih suka membeli beras. Karena terkadang kita tidak mendapatkan hasil apa pun dari bertani. Jadi, kalau sudah tidak ada beras lagi, kami baru menggiling stok gabah untuk makanan sehari-hari.” (LN, 20 tahun)

Tradisi positif seperti ini ditemukan juga pada Kasepuhan Ciptagelar di Jawa Barat. Masyarakat adat Ciptagelar tidak membolehkan masyarakatnya menjual padi dan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Sistem seperti ini akan mempertahankan cadangan pangan selama bertahun-tahun dan digunakan saat terjadi musim kemarau atau gagal panen (Khomsan dkk., 2013). Selain itu, kegiatan produksi, pemanenan, hingga pembagian makanan pada masyarakat adat dapat menjamin keberlangsungan hidup dan menumbuhkan ikatan sosial yang kuat antarmasyarakat.

Selain menggiling cadangan gabah, masyarakat Kaluppini juga meminjam beras dari kerabat dan membayarnya di kemudian hari setelah mereka mempunyai beras. Mereka hanya meminjam beras dari kerabat terdekat, terutama dari orang tua, bukan dari orang lain karena alasan *siri'* (kehormatan pribadi, harga diri). Hal ini sebagian besar dikonfirmasi oleh informan.

“Aihh .. kami tidak pernah pinjam karena *siri'*. Di sini, jarang orang yang membiasakan diri berutang. Karena kami akan mengingatnya terus-menerus dan hanya membebani pikiran kami jika kita memiliki utang.” (LA, 43 tahun)

“Kami tidak pernah berutang. Tidak masalah kalau kami hanya punya sedikit makanan atau uang, yang penting jangan berutang. Yang terpenting, kami tidak berutang... Lebih baik kami hidup dalam kesusahan daripada harus berutang. Karena kalau nanti kita sakit... Lalu kita mati, utang menjadi beban bagi kami. Dan keluarga kami yang akan menanggung beban itu.” (LI, 49 tahun)

“Kita hanya pinjam beras pada saudara kita kalau kehabisan beras. Nanti kita bayar kembali.” (LA, 32 tahun)

“Kalau kita pinjam beras, yah kami kembalikan dalam bentuk beras juga” (MU, 50)

Hal yang sama juga dikonfirmasi oleh pemilik warung atau pedagang keliling yang biasa membawa ikan untuk dijual di Kaluppini atau daerah lain. Mereka mengatakan sejauh ini belum ada masyarakat Kaluppini yang berutang atau mengambil jualan mereka dalam bentuk kredit.

“Tidak ada yang berutang untuk makan di sini. Tidak ada yang pernah meminjam di desa ini. ” (AH, 50 tahun)

“Tidak. Tidak ada orang Kaluppini yang berutang. Yang berutang itu biasanya dari daerah lain. Bukan di Kaluppini.” (SP, 53 tahun)

Masyarakat Kaluppini memegang teguh prinsip *siri*, yaitu salah satu budaya masyarakat Bugis-Makassar yang dijunjung tinggi dan terpelihara sejak lama. Suatu konsep tentang harga diri dan kehormatan pribadi dan keluarga. Istilah *siri*’ dapat mengacu pada beberapa konsep, seperti kehormatan, harkat martabat, harga diri, dan malu. *Siri*’ menjaga pemegang prinsip ini untuk tidak melanggar hukum dan aturan adat atau norma lainnya atau melakukan perbuatan yang dapat merusak harga diri dan martabat diri serta keluarga (Tangngareng, 2017). Hal ini yang membuat mereka bertahan untuk tidak meminjam beras kepada orang lain selain kepada keluarga terdekat saja meski sedang dalam keadaan rawan pangan.

Terkadang, ketika sudah tidak ada makanan yang dapat dimakan di rumah, orang tua akan meminta dan membiarkan anak-anak mereka pergi ke rumah kerabatnya terutama rumah kakek-nenek agar bisa makan di sana. Anak-anak dibiarkan makan di rumah saudara atau orang tua saja, bukan di rumah orang lain, juga karena alasan *siri*’.

“Terkadang anak-anak saya pergi ke rumah neneknya untuk makan. Karena tidak ada makanan di rumah kami.” (AM, 39)

Strategi lain adalah mengambil makanan di warung sendiri. Hal ini akan mengurangi modal usaha mereka yang tentunya akan berdampak pada penghasilan rumah tangga. Praktik ini hanya ditemukan pada keluarga rawan pangan.

E. Akses Cepat terhadap Uang Tunai

Akses cepat terhadap uang tunai adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat Kaluppini untuk dapat mengakses uang tunai dengan cepat sehingga dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan harian. Masyarakat Kaluppini akan meminjam uang dari keluarga dan menjual kacang tanah atau jagung yang mereka simpan. Kedua strategi bertahan tersebut dilakukan oleh kedua kelompok rumah tangga. Sementara itu, strategi mengambil uang tabungan hanya dilakukan oleh rumah tangga rawan pangan.

Masyarakat Kaluppini hanya meminjam uang dari kerabatnya, terutama orang tuanya. Hal ini karena mereka memegang prinsip *siri'*, masyarakat Kaluppini tidak akan meminjam uang atau beras dari orang lain atau bahkan dari warung. Budaya *siri'* dalam tradisi masyarakat Bugis Makassar adalah rasa malu atau kondisi psikologis yang terurai ke dalam harkat derajat manusia. *Siri'* adalah suatu sistem nilai sosial, budaya, dan kepribadian yang sifatnya tabu atau saklar bagi masyarakat Bugis Makassar dalam berinteraksi dengan orang lain (Subri, 2016).

Ketika mereka meminjam uang untuk membeli bahan makanan, mereka akan mengembalikannya dalam bentuk uang dengan jumlah yang sama. Uang yang mereka pinjam tersebut akan digunakan untuk membeli bahan pangan. Begitu pula jika meminjam beras, akan dikembalikan dalam bentuk beras pula.

“Kami tidak pernah meminjam uang ke orang lain. Kami hanya meminjam dari keluarga terutama orang tua. Kami *siri'* untuk dipinjam kepada tetangga kami atau orang lain.” (IN, 33 tahun)

“Masyarakat di sini adalah mempunyai *siri'* untuk berutang. Lebih baik kita makan makanan apa adanya daripada harus berutang seperti itu.” AH, 50 tahun)

Siri' telah menjadi falsafah hidup bagi masyarakat Bugis Makassar yang terwujud dalam adat serta diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama sehari-hari. Selain itu, *siri'* dapat berfungsi sebagai falsafah hidup yang membangun jiwa usaha atau etos kerja yang tinggi. Oleh karena itu, *siri'* menjadi nilai inti kebudayaan orang Bugis Makassar. Prinsip *siri'* pula yang berlaku pada masyarakat adat Kaluppini. Mereka menjaga harkat dan martabat mereka dengan tidak meminjam atau meminta sesuatu kepada orang lain (Normasunah, 2019; Subri, 2016; Riswandi dkk., 2019).

Sama seperti menyimpan gabah, mereka pun menyimpan kacang tanah dan jagung hasil kebun mereka tanpa mengupas kulitnya agar kualitasnya tetap terjaga dan daya simpannya lebih lama (Gambar 5.3 dan 5.4). Setelah panen, sebagian dijual dan sebagian lagi disimpan untuk cadangan saat rawan pangan.



Gambar 5.3 Stok Kacang Tanah yang Dibiarkan Utuh dengan Kulit



Gambar 5.4 Cadangan Jagung yang Siap Dicampur dengan Beras Menjadi *Nande Dalle*

Ketika rumah tangga mengalami kerawanan pangan, mereka akan menjual kacang tanah atau jagung tersebut. Uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli beras atau kebutuhan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Malawi yang menunjukkan bahwa penjualan jagung dan tanaman pertanian lainnya memiliki efek positif pada status ketahanan pangan rumah tangga. Pendapatan tunai yang dihasilkan dari penjualan produk pertanian tersebut dapat digunakan untuk membeli beragam makanan di pasar untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga (Koppmair dkk., 2017). Masyarakat Kaluppini juga tetap menyimpan jagung untuk dimasak dengan nasi dan dijadikan *nande dalle*. Kedua kelompok rumah tangga, baik yang berstatus tahan pangan maupun rawan pangan menerapkan strategi tersebut.

Strategi lain untuk mengakses uang tunai adalah dengan mengambil uang dari tabungan mereka. Ketika mereka sudah tidak mempunyai jagung atau kacang tanah untuk dijual, pilihan terakhir adalah mengambil uang tabungan. Strategi ini hanya ditemukan pada rumah tangga rawan pangan.



Gambar 5.5 Seorang masyarakat adat mengupas kulit kacang.

Kelompok rumah tangga tahan pangan cenderung tidak mengambil uang tunai dari tabungan mereka karena mereka masih mempunyai sumber pendapatan lain. Mereka mempunyai cadangan kacang tanah dan jagung yang lebih banyak sehingga bisa dijual kapan saja ketika mereka membutuhkan uang tunai.

Membeli makanan dengan meminjam uang atau berutang untuk menyediakan makanan bagi anggota rumah tangga merupakan strategi penanggulangan yang umum dilakukan oleh masyarakat. Sebuah studi yang dilakukan oleh Usfar dkk. menemukan bahwa jenis strategi tersebut banyak diterapkan baik pada masyarakat pedesaan maupun perkotaan di Indonesia. Mereka meminjam uang dari kerabat atau koperasi (Usfar, 2007; Usfar, dkk., 2007).

Strategi ini juga ditemukan pada tiga komunitas adat di Anambra States, Nigeria, yang meminjam atau membeli makanan dalam bentuk kredit untuk mengatasi kerawanan pangan yang mereka hadapi (Ezeama dkk., 2015). Namun pada masyarakat Kaluppini, hal ini cukup berbeda. Mereka hanya meminjam uang dari orang tuanya, bukan dari orang lain atau koperasi. Mereka malu meminjam uang

atau beras dari orang lain karena budaya *siri'* yang mereka pegang teguh.

F. Strategi Bertahan Tradisional

Strategi bertahan secara tradisional merupakan strategi yang secara tradisional diterapkan oleh masyarakat Kaluppini dari generasi ke generasi. Strategi ini terkait dengan tradisi, ritual dan sifatnya musiman. Beberapa bentuk strategi ini adalah membawa pulang *nande sesa*, melakukan *sumaro*, menyimpan gabah/jagung/kacang tanah, dan *ma'kambi*.

Strategi bertahan secara tradisional dilakukan secara berbeda oleh keluarga tahan pangan dan keluarga rawan pangan. Secara umum, baik keluarga tahan pangan maupun keluarga rawan pangan secara tradisional telah memanfaatkan *nande sesa* sebagai salah satu strategi bertahan. Strategi lain adalah menyimpan gabah/kacang tanah/jagung dan *sumaro* dengan bekerja di kebun orang lain dengan sistem bagi hasil secara tradisional. Sementara itu, *ma'kambi* (merawat ternak) dan *ma'tanan uma sa'de bola* (menanam tanaman pangan di pekarangan rumah) merupakan strategi bertahan yang hanya diterapkan oleh keluarga rawan pangan.

1. *Nande Sesa*

Pada setiap ritual adat, kegiatan *kumande samaturu'* atau makan bersama-sama adalah hal yang wajib. *Kumande samaturu'* merupakan makan bersama yang dilakukan setelah makanan dibagikan kepada seluruh masyarakat yang hadir tanpa membedakan laki-laki, perempuan, tua atau muda, semua mendapatkan porsi yang sama. Pada proses *kumande samaturu'*, masyarakat makan menggunakan wadah dari daun jati atau dalam bahasa setempat dinamakan *ma'balla*.

Setelah ritual selesai, masyarakat Kaluppini akan membawa nasi yang lengkap dengan lauk daging sapi atau ayam pulang ke rumah masing-masing. Nasi dengan lauk ini dibungkus daun jati yang disebut sebagai *nande sesa*. Masyarakat Kaluppini percaya bahwa menutupi

makanan dengan daun jati dapat membuat makanan tidak cepat basi. *Nande sesa* inilah yang mereka bawa pulang ke rumah dan menjadi sumber makanan bagi setiap keluarga.

“Sudah menjadi tradisi kami sejak dulu kita, makan dengan menggunakan alasan daun jati... Salah satu fungsinya adalah kita bisa langsung bungkus makanannya dan dibawa pulang.” (AH, 50 tahun)

“Kalau ada upacara adat, kadang kami dapat nasi dengan daging. Kami bungkus, bawa pulang. Kadang-kadang cukup untuk makan selama 2 hari ke depan.” (IN, 33 tahun)

Komposisi *nande sesa* terdiri atas beras ketan, nasi, dan ayam yang dimasak dengan bumbu sederhana (Gambar 5.6) memakai alas daun jati yang diambil di hutan. Ketika upacara adat telah selesai, masyarakat dapat langsung membungkusnya dan membawa pulang ke rumah.



Gambar 5.6 Komposisi *Nande Sesa*

Nande sesa membantu kedua kelompok rumah tangga dapat menghemat beras hingga dua hari dan menyediakan sumber protein hewani seperti ayam dan daging sapi yang biasanya hanya dikonsumsi

saat ada ritual. Jika *nande sesa* tidak habis selama dua hari, rumah tangga rawan pangan akan memproses *nande sesa* lebih lanjut sehingga tidak terbuang. Mereka mengeringkannya dan akan dijadikan kerupuk beras (Gambar 5.7).



Gambar 5.7 *Nande Sesa* dikeringkan untuk diolah menjadi kerupuk.

Berdasarkan hasil observasi selama upacara adat, semua masyarakat adat hadir. Semua anggota rumah tangga akan berkumpul di lokasi upacara. Dan mereka semua akan membawa pulang *nande sesa*. Itulah mengapa dalam satu rumah tangga dapat membawa pulang banyak *nande sesa*. Jumlahnya yang banyak dapat bertahan hingga 2–3 hari. Upacara adat menjadi salah satu sarana berbagi makanan secara tradisional dan menguatkan jaring sosial yang meningkatkan ketahanan pangan pada masyarakat adat. Menurut salah satu tokoh adat, upacara adat menjadi wadah untuk saling membantu dan bekerja sama di masyarakat Kaluppini.

“Rasa gotong-royong memang tertanam dalam acara ritual yang kami adakan di sini. Sudah menjadi tradisi dari nenek moyang kami” (AH, 50 tahun)

Pada banyak masyarakat adat umumnya dijumpai tradisi bahwa makanan harus dibagikan, bukan dijual (Dweba & Mearns, 2011). Tradisi berbagi juga ditemukan di kalangan masyarakat Kaluppini

dan mencerminkan *peppasang* yang menjadi falsafah hidup Kalupini. *Kumande samaturu* 'tradisi berbagi makanan' masih berfungsi dengan baik dan masih ada hingga saat ini dalam bentuk *nande sesa* yang dibagikan saat ritual. Jejaring sosial yang terbentuk dalam berbagai upacara adat (seperti pada kegiatan memanen, memasak, dan menyiapkan makanan saat ritual) membentuk sistem pangan pada masyarakat adat yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tersebut (Kuhnlein dkk., 2009). Praktik berbagi makanan tersebut dapat membantu ketersediaan pangan di rumah tangga (Chege dkk., 2015). Oleh karena itu, setiap kali ada ritual, mereka akan menyediakan makanan dalam jumlah besar untuk dibagikan kepada masyarakat yang hadir.

Hal yang sama juga ditemukan oleh Skinner dkk. (2013) dalam studinya pada masyarakat adat Fort Albany, Kanada. Berbagi makanan antara keluarga dan komunitas adalah kunci utama dari strategi bertahan ketika mereka mengalami kerawanan pangan. Anggota komunitas akan saling berbagi makanan dan hasil buruan mereka. Selain itu, mereka saling bertukar makanan sehingga dapat menambah keragaman bahan pangan yang mereka konsumsi (Skinner dkk., 2013).

Makanan tradisional sangat penting bagi kesehatan dan budaya masyarakat adat dan bahkan secara luas diakui berkontribusi pada kesejahteraan fisik, sosial, dan spiritual. Kegiatan memanen dan mempersiapkan bahan makanan menyatukan individu-individu dalam komunitas. Hal ini membantu memelihara hubungan sosial, memfasilitasi transfer pengetahuan, serta mempertahankan hubungan spiritual dengan alam.

Bahkan, meskipun dikonsumsi dalam jumlah kecil, makanan tradisional tersebut telah memberikan asupan gizi yang penting ke dalam tubuh sehingga tiap individu memiliki asupan zat gizi mikro yang jauh lebih tinggi pada hari-hari pelaksanaan ritual adat (Schuster dkk., 2011). Tambahan lagi, pengetahuan dan praktik tradisional masyarakat adat terkait dengan pengolahan bahan pangan dan tradisi berbagi makanan merupakan kekayaan informasi yang harus diwariskan ke generasi selanjutnya.

2. *Sumaro*

Sumaro merupakan strategi mengatasi masalah keuangan dan pangan dalam rumah tangga di masyarakat Kaluppini. *Sumaro* adalah istilah bagi orang yang membantu kegiatan memanen dan sebagai imbalannya mereka mendapat sebagian dari hasil panen. Pemilik lahan akan mendapatkan 6 bagian, sedangkan yang mengerjakan *sumaro* mendapatkan 1 bagian. Sistem pembagian ini hanya untuk panen padi.

“Kadang kalau ada yang mau panen, kami dipanggil ikut membantu mereka, hasilnya nanti mereka kasih gabah. Biasanya kalau dihitung pakai ember, mereka mendapat 6 ember dan kami 1 ember.” (TN, 42 tahun)

“Kadang suami saya pergi ma'*sumaro* atau bekerja sebagai tukang batu di luar Kaluppini. Jika kami merasa stok makanan kami berkurang maka kami akan mencari pekerjaan tambahan.” (IN, 33 tahun)

Sumaro dapat dilakukan oleh anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan. Strategi ini sifatnya musiman, hanya saat musim panen saja. Kadang dilakukan di dalam desa sendiri atau ke daerah lain yang membutuhkan tenaga bantuan untuk panen. Mereka mendapat hasil dari *sumaro* dalam bentuk bahan pangan yang dipanen. Mereka akan menyimpannya untuk dijadikan sebagai cadangan bahan pangan di masa depan.

3. *Mattanan uma sa'de bola dan ma'kambi*

Mattanan uma sa'de bola dan *ma'kambi* adalah jenis strategi bertahan yang hanya dilakukan oleh keluarga rawan pangan. *Mattanan uma sa'de bola* artinya menanam sayuran di pekarangan rumah. Sebagian besar rumah tangga rawan pangan memanfaatkan pekarangan rumah mereka dengan menanam sayuran seperti kangkung dan tomat.

Gambar 5.8 merupakan salah satu contoh rumah tangga yang menerapkan *mattanan uma sa'de bola* dengan memanfaatkan lahan

kosong dan terbatas yang ada di sekitar rumah. Mereka menanam tomat, cabai, dan bayam yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sayur sehari-hari. Jika hasil kebun mereka berlebih, mereka kadang menjualnya di pasar *Kalimu'* yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan lain.



Gambar 5.8 Memanfaatkan Pekarangan untuk Tanaman Pangan

Mattanan uma sa'de bola atau taman gizi adalah praktik positif dilakukan oleh rumah tangga rawan pangan di Kaluppini. Mereka menanam sayur mayur di pekarangan rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya sayuran. Upaya pembangunan pertanian lokal harus fokus pada keanekaragaman hayati dan menekankan kesehatan ekosistem termasuk tanah, lingkungan, dan manusia (*ecohealth*). Pemanfaatan pangan lokal, termasuk sayuran dapat menyediakan dan memenuhi keragaman makanan serta menjadi sumber zat gizi untuk menjaga status gizi dan kesehatan yang optimal di tingkat rumah tangga. Banyak penelitian menemukan bahwa produksi pangan skala rumahan untuk konsumsi rumah tangga merupakan sumber pangan penting (United Nations, 2012). Manfaat lain dari berkebun di rumah adalah praktik ini dapat menjamin keberlangsungan keanekaragaman hayati pertanian (Erni, 2015).

Ketersediaan pangan tradisional yang tersedia secara lokal di tingkat rumah tangga dapat meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga. Kegiatan memanfaatkan pekarangan dengan bertanam berbagai tanaman pangan terbukti dapat menyokong ketersediaan pangan di rumah tangga. Hasil panen tanaman pekarangan ini dapat menjadi sumber vitamin dan mineral yang melengkapi asupan zat gizi makro penghuni rumah.

Sementara itu, *ma'kambi* adalah merawat hewan ternak milik orang lain yang hasilnya akan dibagi ketika ternak tersebut telah besar dan bertambah banyak. Ternak yang biasa dipelihara untuk *ma'kambi* adalah sapi. Rumah tangga rawan pangan akan memelihara ternak tersebut hingga beranak pinak atau sesuai dengan durasi kesepakatan dengan pemilik ternak. Strategi *ma'kambi* adalah strategi bertahan untuk jangka panjang, hasilnya tidak dapat langsung diperoleh seperti *sumaro*.

Selain itu, praktik memelihara hewan ternak, seperti sapi, kambing, ayam, atau bebek pun sama penting. Ternak peliharaan dapat menjadi sumber protein hewani, menghemat pengeluaran tambahan, bahkan dapat menjadi sumber penghasilan tambahan penghasilan rumah tangga. Seperti kegiatan *ma'kambi* yang dilakukan oleh masyarakat adat Kaluppini. Praktik ini perlu dicontoh dan terus dikembangkan pada kelompok masyarakat lain.

4. Menyimpan cadangan gabah/kacang tanah/jagung

Jenis strategi ini sangat terkait dengan strategi lainnya, yaitu akses langsung ke makanan dan uang tunai. Stok gabah digunakan untuk akses cepat terhadap kebutuhan pangan. Sementara stok jagung dan kacang tanah berhubungan dengan akses cepat terhadap uang tunai.

Masyarakat Kaluppini menyimpan hasil panen mereka dalam bentuk gabah dan menggilingnya menjadi beras saat persediaan beras sudah habis. Stok gabah, kacang tanah, dan jagung mereka simpan di atas langit-langit rumah mereka masing-masing (Gambar 5.9). Penyimpanan bahan pangan ini bersifat individu. Setiap rumah mempunyai tempat penyimpanannya masing-masing.



Gambar 5.9 Cara Penyimpanan Cadangan Pangan Rumah Tangga

Langit-langit rumah memiliki makna filosofis bagi masyarakat adat Kaluppini. Mereka percaya bahwa lokasi rumah bagian atas mengandung unsur kebaikan, dekat dengan langit yang dimaknai dekat dengan Sang Pencipta. Oleh karena itu, mereka menyimpan persediaan pangan mereka di langit-langit rumah. Tradisi menyimpan bahan makanan di langit-langit rumah telah dilakukan dari generasi ke generasi secara turun-temurun.

Praktik menyimpan hasil panen dalam bentuk gabah juga ditemukan di masyarakat adat Ciptagelar, Jawa Barat dan juga pada Kasepuhan Karang, Banten, Jawa Barat. Namun, berbeda dengan Kaluppini yang menyimpannya secara individu di rumah masing-masing, masyarakat Ciptagelar menyimpannya secara kolektif di *leuit* (lumbung padi). Walaupun demikian, ada juga sebagian kecil rumah tangga yang memiliki *leuit* sendiri.

Leuit adalah bangunan yang terpisah dari rumah utama masyarakat Ciptagelar yang diperuntukan khusus untuk menyimpan padi yang telah dikeringkan. Ketersediaan *leuit* inilah yang menjadi indikator status ketahanan pangan pada masyarakat tersebut (Khomsan dkk., 2013).



Sumber: Iqbal (2018)

Gambar 5.10 *Leuit* juga ada di kawasan adat Kasepuhan Karang.

Leuit juga terdapat pada Kasepuhan Karang di Banten, Jawa Barat (Gambar 5.10). Penyimpanan cadangan makanan adalah bagian penting dari sistem pangan. Fasilitas penyimpanan bahan pangan memungkinkan kelancaran pasokan makanan yang diproduksi dalam satu tahun untuk dikonsumsi di tahun berikutnya (Saint Ville dkk., 2019). Pola penyimpanan padi tersebut tertata rapi. Saat akan digunakan, masyarakat akan mengambil padi yang berada pada tumpukan paling bawah terlebih dahulu (*first in, first out*). Cara penyimpanan seperti ini membuat padi dapat bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama.

Praktik menyimpan cadangan pangan dalam suatu masyarakat adat sangat penting untuk menjamin ketersediaan pangan pada saat kondisi rawan pangan atau musim kemarau. Pada dasarnya, selama masyarakat Kaluppini memiliki uang, mereka akan membeli beras di pasar untuk konsumsi sehari-hari. Mereka menyimpan gabah dan hanya menggilingnya jika tidak punya cukup uang untuk membeli beras. Tradisi ini perlu terus dilestarikan, bahkan dapat dimodifikasi oleh kelompok masyarakat lain untuk terus menjamin ketersediaan pangan.

BAB 6

Epilog: Merawat Tradisi, Menjaga Kedaulatan Pangan Masyarakat Adat

Setiap manusia berhak atas pemenuhan pangan yang layak dan sesuai kebutuhan sehari-hari untuk tetap dapat hidup sehat. Bagi masyarakat adat, pangan bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan tubuh saja, melainkan juga media bagi mereka untuk berbagi dengan sesama manusia, dan media rasa syukur atas penghidupan yang diberikan Pencipta selama ini. Meskipun demikian, banyak penelitian telah dilakukan di beberapa negara membuktikan bahwa masyarakat adat sangat rentan mengalami kerawanan pangan dan gizi.

Penelitian yang dilakukan pada masyarakat adat Mentawai menunjukkan rentannya masyarakat adat tersebut terhadap kerawanan pangan akibat alih fungsi pertanian dan mengubah sumber pangan utama mereka dari sagu ke beras (Pradipta, 2019). Secara global, FAO telah melaporkan kelompok masyarakat adat yang rentan mengalami kerawanan pangan, termasuk suku-suku yang tinggal di sekitar sungai Amazon hingga masyarakat adat Yagua di Kolombia (FAO, 2021).

Di Indonesia sendiri, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa masyarakat adat mulai mengalami kesulitan dalam mengakses sumber pangan yang selama ini menjadi penghidupan mereka. Sebagai contoh, Orang Rimba di provinsi Jambi dan masyarakat adat

Mentawai di Sumatra Barat adalah dua masyarakat adat Indonesia yang mulai mengalami kerawanan pangan. Kebijakan transmigrasi, alih fungsi hutan, dan perubahan iklim dicurigai menjadi penyebab utama sulitnya mengakses sagu dan bahan pangan lain yang berasal dari hutan. Ketika hutan sebagai sumber pangan utama telah beralih fungsi menjadi perkebunan atau kualitas tanahnya mengalami degradasi maka potensi kerawanan pangan akan makin tinggi.

Sebanyak 63,5% rumah tangga di Kaluppini mengalami kerawanan pangan tanpa ada anggota keluarga yang mengalami kelaparan (*food insecurity without hunger*) dan sebanyak 14,3% rumah tangga yang mengalami kelaparan. Angka kerawanan pangan ini cukup tinggi dan berisiko berdampak pada masa depan anak-anak Kaluppini sebagai kelompok yang rentan mengalami masalah gizi karena kekurangan asupan makanan. Salah satu manifestasi kekurangan asupan pangan pada anak adalah *stunting* yang bukan hanya menghambat pertumbuhan fisik anak, namun juga menghambat pertumbuhan otak yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia ke depannya.

Status ketahanan pangan masyarakat adat Kaluppini dipengaruhi oleh banyak hal termasuk perubahan iklim yang berdampak pada sistem pertanian, ketersediaan air dan pangan lokal, serta sulitnya akses terhadap pasar. Namun, buku ini hanya mengukur ketersediaan dan akses pangan yang dikumpulkan melalui pendekatan kualitatif.

Berdasarkan pengakuan masyarakat Kaluppini, perubahan iklim dan curah hujan membuat masyarakat tersebut sering mengalami gagal panen. Beberapa tahun terakhir produksi padi makin berkurang karena sistem pertanian di masyarakat Kaluppini sepenuhnya meng-andalkan curah hujan. Mereka menilai produksi beras di daerah mereka tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga mereka tetap harus membeli beras dari pasar. Dampak perubahan iklim dan curah hujan pada sistem pertanian di Kaluppini yang mungkin dapat memengaruhi ketersediaan pangan pada masyarakat tersebut menjadi hal menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Selain itu, kondisi geografis Kaluppini yang berupa daerah pegunungan, sulitnya transportasi, dan jalan yang rusak parah membuat

masyarakat sulit mengakses pasar yang terletak di kota. Kondisi ini menambah pengeluaran rumah tangga untuk biaya transportasi yang relatif mahal.

Perubahan pola makan menjadi pilihan yang tidak dapat dihindarkan oleh rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan. Mereka hanya makan nasi saja tanpa tambahan sayur atau lauk. Jika ada cadangan jagung, mereka akan memasak nasi dicampur jagung atau ubi. Tujuannya menghemat beras agar bisa bertahan lebih lama. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa kerawanan pangan di tingkat rumah tangga berasosiasi dengan pola konsumsi rendah energi dan kualitas pola makan yang buruk.

Kerawanan pangan menyebabkan rumah tangga melakukan substitusi bahan pangan yang tinggi kalori namun rendah kandungan zat gizi lainnya, seperti hanya mengonsumsi nasi jagung saja (Morales & Berkowitz, 2016). Individu dari rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan terbukti memiliki asupan gizi yang lebih rendah, termasuk asupan sayuran dan buah. Asupan gizi individu rawan pangan yang kurang optimal dapat meningkatkan risiko *stunting* pada anak dan masalah kekurangan zat gizi mikro lainnya.

Masyarakat adat Kaluppini melakukan beberapa upaya untuk mengatasi dan keluar dari situasi kerawanan pangan yang mereka alami. Beberapa strategi yang dilakukan di tingkat rumah tangga adalah suami atau anggota keluarga akan mencari pekerjaan tambahan di kota atau pergi *ma'sompa* ke luar pulau atau luar negeri untuk menjadi TKI. Selain itu, sistem *sumaro* dan *ma'kambi* menjadi pilihan yang dapat dilakukan masyarakat adat Kaluppini untuk menambah penghasilan dan menambah ketersediaan cadangan pangan. *Mattanana uma sa'de bola* atau membuat taman gizi di pekarangan rumah merupakan praktik positif yang perlu dikembangkan di tingkat rumah tangga. Kebiasaan memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami sayuran dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, menambah penghasilan, dan mengurangi pengeluaran rumah tangga.

Salah satu tradisi unik dan praktik baik di Kaluppini adalah *kumande samaturu'* atau makan bersama pada setiap upacara adat.

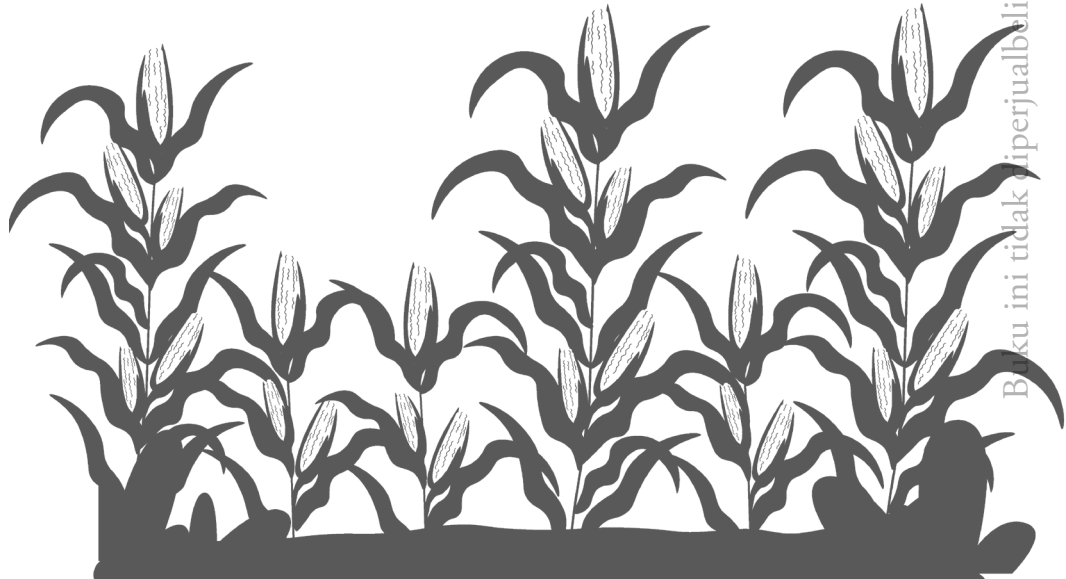
Kumande samaturu' adalah salah satu tradisi yang masih bertahan sampai sekarang. Tradisi makan bersama dan berbagi makanan (*food sharing tradition*) sudah mulai pudar bahkan hilang di beberapa kelompok masyarakat adat di beberapa negara. Namun, tradisi *kumande samaturu'* masih bertahan dan terus dilaksanakan hingga saat ini. Hal ini menunjukkan kebersamaan dan kebersahajaan masyarakat adat Kaluppini.

Setelah acara *kumande samaturu'*, makanan yang telah dibagikan dibungkus menggunakan daun jati yang disebut *nande sesa*. *Nande sesa* tersebut dibawa pulang ke rumah dan membantu mereka menghemat beras selama beberapa hari dan memberikan asupan protein hewani berupa daging ayam atau sapi. Upacara adat telah menjadi media berkumpul masyarakat adat Kaluppini dalam menjaga sistem kekeluargaan dan menjaga rasa gotong-royong. Tradisi *kumande samaturu'* mencerminkan kekuatan dan kebersamaan masyarakat Kaluppini yang berpegang teguh pada *peppasang* yang menjadi falsafah hidup mereka.

Adat dan budaya yang terus terjaga pada suatu masyarakat adat merupakan penentu utama kedaulatan pangan masyarakat adat tersebut, termasuk ketersediaan pangan yang beragam mulai dari produksi, persiapan dan pengolahan bahan pangan, hingga kegiatan berbagi makanan (*food sharing*). Melalui upacara adat, masyarakat Kaluppini melestarikan tradisi berbagi makanan seperti berbagi *nande sesa* dan bekerja sama secara komunal. Tradisi berbagi makan menjadi salah satu kunci ketahanan pangan berbagai masyarakat adat di dunia. Tradisi ini perlu dilestarikan.

Selain melestarikan tradisi positif tersebut, upaya untuk meningkatkan status ketahanan pangan masyarakat adat tetap perlu dilakukan. Perlu ada upaya meningkatkan akses ekonomi untuk pangan yang bergizi dan adekuat, terutama untuk rumah tangga rawan pangan. Mengenai masalah pertanian akibat perubahan iklim, perlu ada upaya mitigasi untuk mengatasi kerentanan terhadap risiko perubahan iklim yang makin meningkat.

Selanjutnya, diperlukan percepatan intervensi untuk mencegah masalah *stunting* dan gizi kurang akibat kerawanan pangan yang dialami oleh masyarakat adat Kaluppini. Kerawanan pangan yang berdampak pada status gizi kelompok rentan merupakan masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pemangku kepentingan atau sektor saja. Upaya perbaikan status kesehatan, pangan, dan gizi tersebut membutuhkan kerja sama semua pihak. Ini adalah tanggung jawab bersama. Setiap warga negara berhak atas ketersediaan pangan yang adekuat dan beragam, termasuk masyarakat adat di seluruh Indonesia.



Buku ini tidak diperjualbelikan.

Daftar Singkatan

AKG	:	angka kecukupan gizi
ASEAN	:	Association of Southeast Asian Nations
CSI	:	<i>coping strategies index</i>
FAO	:	Food and Agriculture Organization
FSIN	:	Food Security Information Network
HFIAS	:	household food insecurity access scale
MDGs	:	<i>Millennium Development Goals</i>
OECD	:	Organization for Economic Cooperation and Development
Riskesdas	:	riset kesehatan dasar
US-HFSSM	:	United States Household Food Security Survey Module
WFP	:	World Food Programme
WHO	:	World Health Organization



Buku ini tidak diperjualbelikan.

Glosarium

- Biofuel* : Bahan bakar dari biomassa yang bahan dasarnya yang berasal dari tumbuhan dan hewan).
- Coping strategy* : strategi bertahan
- Coping Strategies Index* : Indikator kerawanan pangan yang menilai frekuensi terjadinya strategi bertahan yang makin parah, yaitu perilaku yang dilakukan oleh individu atau rumah tangga ketika mereka tidak dapat mengakses makanan yang cukup.
- Deprivasi : kebebasan, keleluasaan pribadi
- Dietary change* : perubahan diet atau pola makan
- Food accessibility* : akses pangan
- Food availability* : ketersediaan pangan

- Food and Nutrition Security* : Ketahanan pangan dan gizi. Suatu kondisi ketika semua orang setiap saat memiliki akses fisik, sosial dan ekonomi terhadap pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup dalam hal keragaman, kandungan gizi, dan keamanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan preferensi pangan untuk kehidupan yang aktif dan sehat yang dilengkapi dengan lingkungan sanitasi yang bersih, kesehatan, pendidikan, dan pola asuh yang memadai.
- Food insecure with hunger (moderate)* : kondisi rawan pangan dengan kelaparan (tingkat sedang)
- Food insecure with hunger (severe)* : kondisi rawan pangan dengan kelaparan (parah)
- Food insecure without hunger* : kondisi rawan pangan tanpa kelaparan
- Food insecurity* : Kerawanan pangan. Suatu kondisi ketika ketersediaan pangan yang cukup, aman dan bergizi, dan kemampuan untuk mengakses pangan tersebut menjadi terbatas dan tidak ada kepastian.
- Food security* : Ketahanan pangan. Suatu kondisi ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi ke bahan makanan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan makanan dan preferensi makanan untuk hidup aktif dan sehat.
- Food stability* : Stabilitas pangan. Stabilitas pangan biasanya terkait dengan potensi kerentanan dan faktor-faktor risiko lainnya yang dapat menyebabkan kerawanan pangan seperti faktor stabilitas ekonomi dan sosial-politik.

<i>Food utilization</i>	: pemanfaatan pangan, kemampuan tubuh dalam menyerap makanan di dalam tubuh
<i>Hunger</i>	: Lapar, yaitu sensasi fisik yang tidak nyaman atau menyakitkan yang disebabkan oleh konsumsi energi makanan yang tidak mencukupi.
<i>Indigenous people</i>	: masyarakat adat
<i>Leuit</i>	: Bangunan khusus yang terpisah dari rumah utama masyarakat Ciptagelar diperuntukkan untuk menyimpan padi yang telah dikeringkan.
<i>Low food security</i>	: status ketahanan pangan yang rendah
<i>Ma'kambi'</i>	: merawat hewan ternak milik orang lain yang hasilnya akan dibagi ketika ternak tersebut telah besar dan bertambah banyak
<i>Ma'sompa</i>	: istilah yang mengacu pada tindakan pergi merantau ke luar pulau atau negara
<i>Pangewaran</i>	: ritual adat Kaluppini yang dilaksanakan setiap delapan tahun sekali
<i>Nande bettawe</i>	: nasi yang dimasak dicampur dengan ubi
<i>Nande dalle</i>	: nasi yang dimasak dicampur dengan jagung
<i>Nande sesa</i>	: nasi dibungkus daun jati yang dibagikan pada saat acara adat
<i>Nutrition security</i>	: Ketahanan gizi. Suatu kondisi ketika ketahanan pangan dipadukan dengan sanitasi yang baik, layanan kesehatan yang memadai, pola asuh yang optimal serta praktik pemberian makan yang benar untuk memastikan kehidupan yang sehat bagi semua anggota rumah tangga.
<i>Program</i>	: kumpulan dari beberapa proyek terkait yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan umum

- Siri'* : *Siri'* mengacu pada beberapa konsep, seperti kehormatan, harkat martabat, harga diri, dan malu. *Siri'* mengajak pemegang prinsip ini untuk tidak melanggar hukum dan aturan adat atau norma lainnya atau melakukan perbuatan yang dapat merusak harga diri dan martabat diri dan keluarga.
- Starvation* : suatu kondisi kelaparan ekstrem akibat kekurangan zat gizi dalam waktu lama
- Stunting* : Status gizi pendek, masalah gizi kronis ditunjukkan dengan TB/U -2SD sampai -3SD atau kurang dari -3SD baku WHO.
- Sumaro* : istilah bagi orang yang membantu panen dan sebagai imbalannya mereka mendapat sebagian dari hasil panen
- Underweight* : gizi kurang, gangguan kesehatan akibat kekurangan asupan energi dan protein ditunjukkan dengan BB/U -2SD sampai -2SD dan kurang dari -3SD baku WHO.
- Very low food security* : status ketahanan pangan yang sangat rendah
- Wasting* : Kurus, gizi kurang akut ditunjukkan dengan BB/TB -2SD sampai -3SD dan kurang dari -3SD baku WHO.

Daftar Pustaka

- Asian Development Bank (ADB). (2002). *Indigenous peoples/ethnic minorities and poverty reduction: Indonesia*. <https://www.adb.org/publications/series/indigenous-peoples-ethnic-minorities-and-poverty-reduction>
- Adiasih, N., Murdiati, C. W., & Yulianti, R. (Ed.). (2020). *Kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam mewujudkan kedaulatan pangan di tengah pandemi Covid-19*. Lembaga Studi Hukum Indonesia.
- Asia Indigenous Peoples' Pact (AIPP) & the International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA). (2010). *ASEAN's Indigenous peoples*. <https://www.iwgia.org/en/documents-and-publications/documents/publications-pdfs/english-publications/180-asean-briefing-paper-web/file.html>
- Akram-Lodhi, A. H. (2013). *Food sovereignty: A critical dialogue, How to build food sovereignty* [Presentasi Makalah]. International Conference, Yale, USA, 14–15 September 2013. https://www.iss.nl/sites/corporate/files/15_AkramLodi_2013-1.pdf
- Anglicare. (2012). *2012 State of the Family report – When there's not enough to eat*. <https://www.anglicare.asn.au/publications/2012-state-of-the-family-report-when-theres-not-enough-to-eat/>
- Apriliani, U., & Wilujeng, B. Y. (2020). Bentuk dan makna pada tata rias busana serta aksesoris tari remo jombangan. *Jurnal Tata Rias*, 09(1), 97–106. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-tata-riais/article/view/33109>

- Arif, S., Isdijoso, W., Fatah, A. R., & Tamyis, A. R. (2020). *Strategic review of food security and nutrition in Indonesia*. <https://www.wfp.org/publications/strategic-review-food-security-and-nutrition-indonesia-2019-2020-update>
- Arnawa, I. K. (2011). Kajian tentang pelestarian subak ditinjau dari aktivitasnya yang berlandaskan konsep Tri Hita Karana. *Agrimeta*, 1(1).
- Arnold, M., Powell, B., Shanley, P., & Sunderland, T. C. H. (2011). Editorial: Forests, biodiversity and food security. *International Forestry Review*, 13(3), 259–264. <https://doi.org/10.1505/146554811798293962>
- Ashley, J. M. (2016). *Food Security in the developing world* (Edisi 1). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/C2013-0-23223-2>
- Badan Ketahanan Pangan. (2019). *Bahan e-learning bidang kerawanan pangan*. http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/Kepegawaian/2020/Materi_e-learning_bid_kerawanan_pangan.pdf
- Balta, A., Tessema, A. & H/Wold, D. (2015). Assessment of household food security and coping strategies in Wolaita Zone: The case of Sodo Zuria Woreda. *Journal of Poverty, Investment and Development*, 18, 23–40. <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JPID/article/view/27255/27951>
- Bernstein, H., & Bachriadi, D. (2014). *Tantangan kedaulatan pangan* (Triagung, Penerj.). ARCBooks. <http://arc.or.id/wp-content/uploads/2015/02/Tantangan-Kedaulatan-Pangan.pdf>
- Bourdon, M. H., & Dupraz, C. L. (2014). *National food security: A framework for public policy and international trade* (Foodsecure working paper No. 17). RePEc: Research Papers in Economics. <https://doi.org/10.22004/ag.econ.285148>
- Brück, T., & d'Errico, M. (2019). Food security and violent conflict: Introduction to the special issue. *World Development*, 117, 167–171. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.01.007>
- Brück, T., Habibi, N., Martin-Shields, C., Sneyers, A., Stojetz, W., & van Weezel, S. (2016). *The relationship between food security and national security*. Report to FAO. ISDC. <https://isdc.org/wp-content/uploads/2019/08/Food-Security-and-Conflict-2016-12-22.pdf>
- Cangara, A. R. (2022). The UN MDGs in Indonesia: Analyzing its failure in eradicating poverty in Indonesia. *Journal of Social and Political Sciences*, 5(1). <https://doi.org/10.31014/aior.1991.05.01.340>
- Chandra, W. (2019). Ritual Pangewarang: Tahapan, pantangan, dan identitas komunitas Kaluppini di Kabupaten Enrekang. *Emik: Jurnal Ilmiah*

- Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(2), 160–179. <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/emik/article/view/278>
- Charlton, K. E. (2016). Food security, food systems and food sovereignty in the 21st century: A new paradigm required to meet Sustainable Development Goals. *Nutrition & Dietetics*, 73(1), 3–12. <https://doi.org/10.1111/1747-0080.12264>
- Chege, P. M., Kimiywe, J. O., & Ndungu, Z. W. (2015). Influence of culture on dietary practices of children under five years among Maasai Pastoralists in Kajiado, Kenya. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 12 (131). <https://doi.org/10.1186/s12966-015-0284-3>
- Coates, J., Swindale, A., & Bilinsky, P. (2007). *Household food insecurity access scale (HFIAS) for measurement of food access: Indicator guide (Version 3)*. FHI360/FANTA.
- Delormier, T., & Marquis, K. (2019). Building healthy community relationships through food security and food sovereignty. *Current Developments in Nutrition*, 3(5), 25–31. <https://doi.org/10.1093/cdn/nzy088>
- Dewan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, & World Food Programme. (2015). *Peta ketahanan dan kerentanan pangan Indonesia 2015: Versi rangkuman*. <https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp276252.pdf>
- Dweba, T. P., & Mearns, M. A. (2011). Conserving indigenous knowledge as the key to the current and future use of traditional vegetables. *International Journal of Information Management*, 31(6), 564–571. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2011.02.009>
- Ecker, O., & Breisinger, C. (2012). *The food security system: A new conceptual framework*. IFPRI discussion paper. The International Food Policy Research Institute (IFPRI). <https://reliefweb.int/report/world/food-security-system-new-conceptual-framework>
- Egeland, G. M., Johnson-Down, L., R. Cao, Z. R., Sheikh, N., & Weiler, H. (2011). Food insecurity and nutrition transition combine to affect nutrient intakes in Canadian Arctic Communities. *The Journal of Nutrition*, 141(9), 1746–1753. <https://doi.org/10.3945/jn.111.139006>
- El Bilali, H., Callenius, C., Strassner, C., & Probst, L. (2019). Food and nutrition security and sustainability transitions in food systems. *Food and Energy Security*, 8(2), Artikel e0014. <https://doi.org/10.1002/fes3.154>

- Erni, C. (Ed.). (2015). *Shifting cultivation, livelihood and food security: New and old challenges for indigenous peoples in Asia*. FAO, IWGIA, dan AIPP. https://www.fao.org/3/i4580e/i4580e.pdf?source=post_page
- Ezeama, N. N., Ibeh, C., & Adinma, E. (2015). Coping with household food insecurity: perspectives of mothers in Anambra State, Nigeria. *Journal of Food Security*, 3(6), 145–154. <http://pubs.sciepub.com/jfs/3/6/2/>
- Ezeomah, B., & Farag, K. (2016). Effects of development on indigenous dietary pattern: A Nigerian case study. *Appetite*, 107, 59–68. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2016.07.025>
- FAO. (2010). *FAO policy on indigenous and tribal peoples*. <http://www.fao.org/docrep/013/i1857e/i1857e00.pdf>
- FAO, IFAD, dan WFP. (2015). *The state of food insecurity in the world 2015: Meeting the 2015 international hunger targets: Taking stock of uneven progress*. FAO. <http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf>
- FAO. (2021). *Indigenous peoples' food systems: Insights on sustainability and resilience from the front line of climate change*. FAO, Alliance of Bioversity International, and CIAT. <https://doi.org/10.4060/cb5131en>
- FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. (2019). *The state of food security and nutrition in the world 2019: Safeguarding against economic slowdowns and downturns*. FAO. <https://www.fao.org/3/ca5162en/ca5162en.pdf>
- Fatmaningrum, D., Roshita, A., & Februhartanty, J. (2016). Coping strategies for food insecurity among adolescent girls during the lean season in East Nusa Tenggara, Indonesia: a qualitative study. *British Journal of Nutrition*, 116(S1), S42–S48. <https://doi.org/10.1017/S0007114515004092>
- Ferreira, A. A., Welch, J. R., Santos, R. V., Gugelmin, S. A., & Coimbra Jr, C. E. A. (2012). Nutritional status and growth of indigenous Xavante children, Central Brazil. *Nutrition Journal*, 11(1), Artikel 3. <https://doi.org/10.1186/1475-2891-11-3>
- Food Security Information Network. (2020). *Global report on food crisis 2020*. <https://www.wfp.org/publications/2020-global-report-food-crises>
- Fram, S., Ritchie, D. L., Rosen, N., & Frongillo, E. A. (2015). Child experience of food insecurity is associated with child diet and physical activity. *The Journal of Nutrition*, 145(3), 499–504. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25733465/>
- Friedman, H. S. (2016). *Encyclopedia of mental health* (Edisi 2). Academic Press.
- Ghattas, H. (2014). *Food security and nutrition in the context of the global nutrition transition*. FAO. <https://www.fao.org/3/i3862e/i3862e.pdf>

- Gödecke, T., Stein, A. J., & Qaim, M. (2018). The global burden of chronic and hidden hunger: Trends and determinants. *Global Food Security*, 17, 21–29. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2018.03.004>
- Gomez y Paloma, S., Riesgo, L., & Louhichi, K. (Ed.). (2020). *The role of smallholder farms in food and nutrition security*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-42148-9>
- Google Earth. (t.t.). [Lokasi Kabupaten Enrekang]. Diakses pada 5 Februari, 2020, dari <https://earth.googlecom/web/search/Enrekang,+South+Sulawesi/@3.53209233,119.89227677,581.26005384a,148570.58551211d,35y,0h,0t,0r/data=CoIBGlgSUGokMHgyZDk0M2RmOWNlNzU0ZmE5OjB4MzAzMGJmYmNhZjc2ZmMwGVNy8zIvrAvAIAxQHtRq-F1AKhhFbnJla2FuZywgU291dGggU3VsYXdlc2kYAIAbIiYKJamezC60HaWSvxFBK2qtjDYbwBkBZ9PGCo9fQCG7ov9SjoRcQA>
- Haering, S. A., & Shamsuzzoha B. Syed. (2009). *Community food security in United States cities: A survey of the relevant scientific literature*. Report. Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.
- Hendriks, S. L. (2016). The Food security continuum: A novel tool for understanding food insecurity as a range of experiences. Dalam A. Hassan (Ed.), *Food security and child malnutrition: The impact on health, growth, and well-being* (27–48). Apple Academic Press; CRC Press.
- Hermanto, N. (2015). Ketahanan pangan Indonesia di kawasan ASEAN. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 33(1), 19–31. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/fae/article/view/1901/1887>
- Hikmah, N., Saenal, S., & Rahma, M. (2019). Makna tari pa'jaga dalam upacara rombutuka (Tobotting) di Desa Kaluppini kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *Jurnal Pakarena*, 4(2), 98–105. <https://doi.org/10.26858/p.v4i2.12089>
- Hromi-Fiedler, A., Bermúdez-Millán, A., Segura-Pérez, S., Damio, G., & Pérez-Escamilla, R. (2009). Adaptation of the US household food security survey module for low-income pregnant Latinas: Qualitative phase. *Journal of Hunger & Environmental Nutrition*, 4(1), 62–80. <https://doi.org/10.1080/19320240802706841>
- IFAD. (2013). *Smallholders, food security, and the environment*. https://www.ifad.org/documents/38714170/39135645/smallholders_report.pdf/133e8903-0204-4e7d-a780-bca847933f2e
- International Food Policy Research Institute (IFPRI). (2014). *2013 Annual report*. <http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/128150>

- International Food Policy Research Institute (IFPRI). (2016). *2016 Global food policy report*. <http://dx.doi.org/10.2499/9780896295827>
- Iqbal, D. (2018, 4 Desember). Kasepuhan Karang: Pengakuan wilayah didapat, ekonomi pun berbenah. *Mongabay*. <https://www.mongabay.co.id/2018/12/04/kasepuhan-karang-pengakuan-wilayah-didapat-ekonomi-pun-berbenah/>
- Kementerian Kesehatan. (2018). *Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar 2018*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://cegahstunting.id/download/864/>
- Kementerian Pertanian. (2019). *Peta ketahanan dan kerentanan pangan Indonesia 2019*. Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian.
- Kendall, A., Olson, C. M., & Frongillo Jr., E. A. (1995). Validation of the Radimer/Cornell measures of hunger and food insecurity. *The Journal of Nutrition*, 125(11), 2793–2801. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7472659/>
- Khomsan, A., Riyadi, H., & Marliyati, S. A. (2013). Ketahanan pangan dan gizi serta mekanisme bertahan pada masyarakat tradisional suku Ciptagelar di Jawa Barat. *JlPI Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 18(3), 186–193. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/JlPI/article/view/8396>
- Kimani-Murage, E. W., Holding, P. A., Fotso, J. C., Ezech, A. C., Madise, N. J., Kahurani, E. N., & Zulu, E. M. (2011). Food security and nutritional outcomes among urban poor orphans in Nairobi, Kenya. *Journal of Urban Health*, 88(SUPPL. 2), 215–230. <https://doi.org/10.1007/s11524-010-9491-z>
- Koppmair, S., Kassie, M., & Qaim, M. (2017). Farm production, market access, and dietary diversity in Malawi. *Public Health Nutrition*, 20(2), 325–335. <https://doi.org/10.1017/S1368980016002135>
- Kuhnlein, H. V. (2017). Gender roles, food system biodiversity, and food security in Indigenous Peoples' communities. *Matern and Child Nutr*, 13(S3), Artikel e12529. <https://doi.org/10.1111/mcn.12529>
- Kuhnlein, H. V., Erasmus, B., & Spigelski, D. (2009). *Indigenous peoples' food systems: The many dimensions of culture, diversity and environment for nutrition and health* (Edisi 1). Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Kumalasari, A. N. & Juwariyah, A. (2020). Makna simbolis gerak dan tata busana tari satriyo pinayungan di sanggar sayuwit Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *APRON: Jurnal Pemikiran Seni Pertunjukan*, 10(2). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/apron/article/view/49463>

- Leroy, J. L., Ruel, M., Frongillo, E. A., Harris, J., & Ballard, T. J. (2015). Measuring the food access dimension of food security: A critical review and mapping of indicators. *Food and Nutrition Bulletin*, 36(2), 167–195. <https://doi.org/10.1177/0379572115587274>
- Maxwell, D. G., & Caldwell, R. (2008). *The coping strategies index: Field methods manual*. CARE. https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/manual_guide_proced/wfp211058.pdf
- Maxwell, D., Watkins, B., Wheeler, R., & Collins, G. (2003, 23–25 September). *The coping strategies index: A tool for rapidly measuring food security and the impact of food aid programmes in emergencies* [Presentasi makalah]. FAO International Workshop on Food security in complex emergencies: Building policy frameworks to address longer-term programming challenges, Tivoli, Italia. <https://www.fao.org/3/ae513e/ae513e.pdf>
- Mbow, C., C. Rosenzweig, L.G. Barioni, T.G. Benton, M. Herrero, M. Krishnapillai, E. Liwenga, P. Pradhan, M.G. Rivera-Ferre, T. Sapkota, F.N. Tubiello, Y. Xu. (2019). Food security. Dalam P.R. Shukla, J. Skea, E. Calvo Buendia, V. Masson-Delmotte, H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, P. Zhai, R. Slade, S. Connors, R. van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey, S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. Petzold, J. Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley,... J. Malley (Ed.), *Climate change and land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems* (439–550). IPCC. <https://doi.org/10.1017/9781009157988.007>
- McKerchar, C., Bowers, S., Heta, C., Signal, L., & Matoe, L. (2015). Enhancing Maori food security using traditional kai. *Global Health Promotion*, 22(3), 15–24. <https://doi.org/10.1177/1757975914543573>
- Montenegro, R. A., & Stephens, C. (2006). Indigenous health in Latin America and the Caribbean. *The Lancet*, 367(9525), 1859–1869. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(06\)68808-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)68808-9)
- Morales, M. E., & Berkowitz, S. A. (2016). The relationship between food insecurity, dietary patterns, and obesity. *Current Nutrition Reports*, 5, 54–60. <https://doi.org/10.1007/s13668-016-0153-y>
- Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 10(1), 73–96. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384>
- Normasunah. (2019). Analisis budaya siri' dalam kajian semantik pada masyarakat adat Bugis di Marabuan Kecamatan Pulau Sembilan

- Kabupaten Kotabaru. *CENDEKIA: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 7(2), 235–244. <https://doi.org/10.33659/cip.v7i2.139>
- Nurbaya, Chandra, W., & Hapsari, P. W. (2020). Traditional medicine for children among Kaluppini indigenous people in South Sulawesi. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 5(2), 319–331. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v5i2.9905>
- Nurbaya. (2017). Violation of women's rights, food insecurity, and the future of indigenous peoples. Dalam *Best Essays of 2016*. Indonesian Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF). <http://isrsf.org/files/download/430>
- Nurbaya, & Chandra, W. (2020). Sando Pea: between tradition and health challenge among Kaluppini indigenous people. *Antropologi Indonesia*, 41(2).
- Nurbaya, & Najdah. (2023). Food security status and coping strategies among adolescents during the Covid-19 pandemic in Mamuju. *Poltekita : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 17(1), 130–136. <https://doi.org/10.33860/jik.v17i1.1894>
- Nurbiyanti, Ismawan, & Hartati, T. (2017). Makna simbolik properti tari jathilan di Desa Damar Mulyo Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Seni, Drama, Tari & Musik*, 2(4), 326–342. <https://jim.usk.ac.id/sendratasik/article/view/9603>
- Osmani, S. R., Ahmed, A., Ahmed, T., Hossain, N., Huq, S., & Shahan, A. (2016). *Strategic review of food security and nutrition in Bangladesh*. World Food Programme. https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000039588/download/?_ga=2.43937509.1304391062.1701152572-213571331.1701152572
- Pangaribowo, E. H., Gerber, N., & Torero, M. (2013). *Food and nutrition security indicators: A review*. ZEF Working Paper No. 108. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2237992>
- Parnell, W. R., & Gray, A. R. (2014). Development of a food security measurement tool for New Zealand households. *British Journal of Nutrition*, 112(8), 1393–1401. <https://doi.org/10.1017/S0007114514002104>
- Patel, R. (2009). What does food sovereignty look like?. *Journal of Peasant Studies*, 36(3), 663–706. <https://doi.org/10.1080/03066150903143079>
- Perry, G. E., Arias, O. S., Lopez, J. H., Maloney, W. F., & Serven, L. (2006). *Poverty reduction and growth: Virtuous and vicious Circles*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6511-3>

- Pieters, H., Guariso, A., & Vandeplass, A. (2013). *Conceptual framework for the analysis of the determinants of food and nutrition security*. <http://dx.doi.org/10.22004/ag.econ.285141>
- Pollard, C. M., & Booth, S. (2019). Addressing food and nutrition security in developed countries. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(13), Artikel 2370. <https://doi.org/10.3390/ijerph16132370>
- Power, E. M. (2008). Conceptualizing food security for Aboriginal People in Canada. *Canadian Journal of Public Health*, 99(2), 95–97. <http://www.jstor.org/stable/41995048>
- Pradipta, L. (2019). Peralihan pangan pokok dari sagu ke beras: Sebuah kajian ketahanan pangan dan masyarakat adat. *Society*, 7(1), 37–47. <https://doi.org/10.33019/society.v7i1.76>
- Pritchard, B. (2016). Food and nutrition security: future priorities for search and policy. Dalam B. Pritchard, R. Ortiz, & M. Shekar (Ed.), *Routledge handbook of food and nutrition security*. Routledge.
- Russell, J., Flood, V., Yeatman, H., & Mitchell, P. (2011). Food security in older Australians. *Journal of Nutrition Education and Behavior*, 43(2), 1–60. <https://doi.org/10.1016/j.jneb.2010.12.007>
- Sagurung, B. (2016). *Sagu, makanan pokok yang mulai ditinggalkan suku Mentawai*. MentawaiKita. <https://www.mentawaiKita.com/assets/foto/berita/200416075243-Sagu-Makanan-Pokok-yang-Mulai-Ditinggalkan-Suku.jpeg>
- Saint Ville, A., Po, J. Y. T., Sen, A., Bui, A., & Melgar-Quiñonez, H. (2019). Food security and the food insecurity experience scale (FIES): Ensuring progress by 2030. *Food Security*, 11, 483–491. <https://doi.org/10.1007/s12571-019-00936-9>
- Santoso, R. F., & Falatehan, S. F. (2021). Analisis kedaulatan pangan pada komunitas adat Cireundeu. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 5(2), 256–271. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i2.812>
- Schrimpf, B., & Feil, P. (2012). *Traditional food crisis coping mechanisms: A regional perspective from Southern Africa*. Diakonie Werk der EKD. https://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/Fachinformationen/Dialog/dialog07_tfccm.pdf
- Schuster, R. C., Wein, E. E., Dickson, C., & Chan, H. M. (2011). Importance of traditional foods for the food security of two First Nations communities in the Yukon, Canada. *International Journal*

- of *Circumpolar Health*, 70(3), 286–300. <https://doi.org/10.3402/ijch.v70i3.17833>
- Siti. (2017). *Tradisi Pangewaran di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*. [Skripsi, UIN Alauddin Makassar]. Repositori UIN Alauddin Makassar. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/11273/1/SKRIPSI%20SITI.PDF>
- Skinner, K., Hanning, R. M., Desjardins, E., & Tsuji, L. J. S. (2013). Giving voice to food insecurity in a remote indigenous community in Subarctic Ontario, Canada: Traditional ways, ways to cope, ways forward. *BMC Public Health*, 13, Artikel 427. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-427>
- Skinner, K., Pratley, E., & Burnett, K. (2016). Eating in the city: A review of the literature on food insecurity and indigenous people living in urban spaces. *Societies*, 6(2), Artikel 7. <https://doi.org/10.3390/soc6020007>
- Subri, S. (2016). Kajian rekonstruksi “budaya siri” Bugis ditinjau dari pendidikan islam. *Al-Ishlah: Jurnal Studi Pendidikan*, 14(2), 155–177 <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/alishlah/article/view/395/304>
- Sufyan, D. L., Syah, M. N. H., & Nurbaya. (2021). Prevalence and factors associated to household food insecurity during COVID-19 outbreak. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 12(2), 143–153. <https://doi.org/10.26553/jikm.2021.12.2.143-153>
- Tamiru, D., & Belachew, T. (2017). The association of food insecurity and school absenteeism: Systematic review. *Agriculture and Food Security*, 6, Artikel 5. <https://doi.org/10.1186/s40066-016-0083-3>
- Tangngareng, T. (2017). Upaya pewarisan budaya Siri` dalam rumah tangga di kalangan masyarakat Bugis Makassar di Kota Makassar. *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 3(1), 7–19. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosioreligius/article/view/5994>
- Riswandi, Patawari, A. T. Y. A., & Fathiah, N. (2019). Pengaruh nilai budaya siri` na pacce dalam pelayanan publik di Kabupaten Bone. *Plenojure: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 60–67.
- Trauger, A. (Ed.) (2015). *Food sovereignty in international context: Discourse, politics and practice*. Routledge.
- Umar, S., & Musa, M. W. (2015). Determinants of the use of indigenous coping strategies against climate change among smallholder farmers in Katsina State, Nigeria. *Journal of Agriculture and Ecology Research International*, 3(1), 24–32. <https://doi.org/10.9734/JAERI/2015/14785>

- United Nations. (2012). *Baseline nutrition and food security survey 2012*. <http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Baseline%20Nutrition%20and%20Food%20Security%20Survey.pdf>
- UN Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). (2013). *State of the world's indigenous peoples: Indigenous peoples' access to health services*. United Nations. <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/03/The-State-of-The-Worlds-Indigenous-Peoples-WEB.pdf>
- UN Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII). (2006). *Who are indigenous peoples?* https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf
- UN Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII). (2007). *Indigenous Peoples - Lands, Territories and Natural Resources*. https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/6_session_factsheet1.pdf
- Ufsar, A. A. (2007). The alarming food insecurity in Indonesia: Analysis of 13 studies in 6 provinces within 2004–2006 and its relationship with livelihood security. *Gizi Indonesia*, 30(2), 98–111. <http://dx.doi.org/10.36457/gizindo.v30i2.43>
- Ufsar, A. A., Fahmida, U., & Februhartanty, J. (2007). Household food security status measured by the US- household food security/hunger survey module (US- FSSM) is in line with coping strategy indicators found in Urban and Rural Indonesia. *Asia Pac. J. Clin.*, 16(2), 368–374. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17468096/>
- Utami, D. N. (2019). Kajian dampak perubahan iklim terhadap degradasi tanah. *Jurnal Alami: Jurnal Teknologi Reduksi Risiko Bencana*, 3(2), 122–131. <https://doi.org/10.29122/alami.v3i2.3744>
- Wardani, E. M. (2011). Food for indigenous communities in times of global crisis: Reflection from the experiences of Orang Rimba community (Jambi Province, Indonesia) and Ifugao community (Ifugao Province, the Philippines). *Jurnal Kajian Wilayah*, 2(1), 19–34. <https://jkw.psdri.lipi.go.id/index.php/jkw/article/view/318/189>
- Wittman, H. (2011). Food sovereignty: A new rights framework for food and nature? *Environment and Society*, 2(1), 87–105. <https://doi.org/10.3167/ares.2011.020106>
- Yang, R. Y., & Hanson, P. M. (2009). Improved food availability for food security in Asia-Pacific region. *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition*, 18(4), 633–637. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19965357>



Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tentang Penulis



Nurbaya. Saat ini Nurbaya aktif sebagai pengajar di Jurusan Gizi, Poltekkes Kemenkes Mamuju, Sulawesi Barat. Nurbaya meraih gelar Sarjana Gizi (S.Gz.) di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Gizi, Universitas Hasanuddin pada tahun 2010. Pada tahun 2014, ia berhasil meraih beasiswa USAID-PRESTASI untuk program Magister dan menyelesaikan studinya pada bidang Gizi Komunitas di Seameo-Recfon, Universitas Indonesia. Nurbaya merupakan salah satu alumni South East Asian Nutrition Leadership Program (SEANLP).

Saat ini Nurbaya mengemban amanah sebagai Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Mamuju dan Sekretaris DPD PERSAGI Sulawesi Barat.

Fokus riset Nurbaya pada bidang ketahanan pangan dan gizi, kesehatan masyarakat adat, gizi remaja, serta ASI dan konseling menyusui. Latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang gizi dan kesehatan serta kemampuannya dalam menulis telah membawa Nurbaya meraih beberapa juara, penghargaan, dan *fellowship*. Penghargaan yang diterimanya antara lain *The second prize winner*

on essay competition for Indonesian women oleh The Indonesian Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF)(2016), Juara 1 Lomba Gizi kategori *essay* yang dilaksanakan oleh Seameo-Recfon dan GAIN (2020). Selain itu, pada 2021, Nurbaya juga berhasil meraih juara 1 lomba penulisan buku ajar nasional yang dilaksanakan oleh Unsyiah Kuala University Press. Nurbaya dapat dihubungi melalui surel: nurbaya.m.gizi@mail.com.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Indeks

- Ada'*, 64
aksesibilitas pangan, 9
- biofuel*, 34, 40
- Coping strategies index, 54
coping strategy, 20, 52, 53, 89, 137
- defisiensi, 2, 3
Degradasi, 36
deprivasi, 36
diare, 27
- Food and Nutrition Security, 29,
123, 135
food availability, 26, 137
Food insecure with hunger
(*moderate*), 45
- Food insecure with hunger (severe)*,
45, 124
Food insecure without hunger, 45
food insecurity, 1, 45, 76, 116, 121,
129, 130, 131, 132, 133, 135,
136
food security, 1, 15, 41, 42, 44, 121,
125, 126, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137
food stability, 27
food utilization, 27
- gula rafinasi, 25
holistik, 18, 60
- hunger*, 1, 2, 45, 76, 116, 124, 130,
132, 137

Imam, 64
Indigenous people, 10

 kalori, 25, 31, 42, 50, 117
 Kedaulatan Pangan, 1, 18, 28, 115
 Kerawanan Pangan, 9, 30, 34, 49, 51
 ketahanan pangan, 1, 2, 5, 7, 14, 15,
 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25,
 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 39,
 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
 48, 51, 52, 54, 55, 59, 75, 76,
 79, 80, 81, 86, 89, 92, 93, 94,
 98, 104, 108, 111, 113, 116,
 118, 125, 126, 135, 139
 ketersediaan pangan, 12, 14, 15, 23,
 24, 25, 27, 29, 31, 36, 39, 42,
 44, 50, 53, 77, 78, 79, 83, 86,
 87, 109, 112, 114, 116, 118,
 119, 124
 Khali, 64

 lemak, 25, 39
 Leuit, 113, 114, 124
low food security, 41, 42, 126

ma'sompa, 93, 117
 masyarakat adat, 9, 10, 11, 12, 13,
 14, 15, 17, 19, 20, 21, 59, 60,
 62, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 75,
 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 86,
 87, 89, 93, 98, 99, 100, 102,
 103, 105, 108, 109, 112, 113,
 114, 115, 116, 117, 118, 119,
 133, 135, 139
Mattanan uma sa'de bola, 110, 111,
 117

 mikronutrien, 2

nande bettawe, 91, 95, 96
nande dalle, 91, 95, 96, 97, 104
nande sesa, 21, 69, 106, 107, 108,
 109, 118
 neoliberal, 17
nutrition security, 25, 129, 130, 134,
 135

 observasi, 71, 96, 98, 108

Pasa' Kalimu, 84
 pola konsumsi, 37, 50, 117
 protein, 81, 107, 112, 118, 126
 psikologis, 46, 49, 50, 52, 53, 102

Siri', 101, 102, 103, 125
 stabilitas pangan, 15, 37
Starvation, 125
stunting, 3, 6, 7, 12, 17, 76, 95, 98,
 116, 117, 119
 sumaro, 106, 110, 112, 117

tanah onko sa'pulo tallu, 61
Tomakaka, 64

underweight, 12, 76, 98

Very low food security, 42, 126

wasting, 12, 76, 98

 zat gizi makro, 25, 112
 zat gizi mikro, 2, 3, 109, 117

Kedaulatan pangan merupakan hak masyarakat atas pangan sehat dan dapat diterima secara budaya. Selain itu, pangan tersebut diproduksi melalui metode yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan memprioritaskan produksi pertanian lokal. Konsep kedaulatan pangan berusaha mengadvokasi kepentingan dan hak masyarakat sebagai produsen, distributor, dan konsumen, termasuk menjaga kemampuan masyarakat adat untuk menentukan sistem pangan mereka. Oleh karena itu, upaya kedaulatan pangan merupakan prasyarat logis bagi terciptanya ketahanan pangan pada masyarakat adat.

Masyarakat adat Kaluppini berusaha mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan mereka dengan pengetahuan tradisional serta merawat tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi, yaitu berbagi *nande sesa* dan *kumande samaturu'* yang dilaksanakan pada berbagai upacara adat. Berbagai strategi bertahan atau *coping strategies* pada situasi rawan pangan dilakukan dengan tetap memegang teguh prinsip *siri'*, salah satu budaya masyarakat Bugis, Makassar yang dijunjung tinggi dan terpelihara sejak lama.

Buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih baik bagi pemangku kepentingan yang terkait dalam upaya perbaikan status kesehatan, pangan, dan gizi. Setiap warga negara berhak atas ketersediaan pangan yang adekuat dan beragam, termasuk masyarakat adat di seluruh Indonesia.

BRIN Publishing
The Legacy of Knowledge

Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, Anggota Ikapi
Gedung B.J. Habibie Lantai 8,
Jl. M.H. Thamrin No. 8,
Jakarta Pusat 10340
Whatsapp: +62 811-1064-6770
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id

DOI: 10.55981/brin.666



ISBN 978-623-8372-23-2



9786238 372232